

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 16,17, 21 Dan 31 Juli 2018



**TENTANG
RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194
Rembang 59212



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (I)

DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

Hari : Senin
Tanggal : 16 Juli 2018
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

II. SIFAT RAPAT : Terbuka

III. ACARA RAPAT :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017;
3. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : **H. MAJID KAMIL MZ**

2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : **Drs. DRUPODO, M.Si.**

2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
<hr/>	
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 5 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
5. Fraksi Gerindra	: 4 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
<hr/>	
Jumlah	: 39 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: - orang
2. Fraksi Demokrat	: 3 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: - orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang
5. Fraksi Gerindra	: 1 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: - orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
<hr/>	
Jumlah	: 6 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL. MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;
- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali rapat paripurna ini, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dengan keadaan sehat walafiat pada hari ini Senin tanggal 16 Juli 2018 dapat melaksanakan dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD, dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Pada Pasal 80 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, menjelaskan bahwa rapat paripurna untuk menetapkan peraturan daerah dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD. Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 39 orang. Dengan demikian Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum.

Selanjutnya dengan mengucap “*Bismillahirrohmanirrohim*” tepat pukul 12.20 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Sebelumnya, akan kami sampaikan kronologi pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 Juni 2017 telah kami terima buku-buku Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 dari Pemerintah Kabupaten Rembang, melalui surat Sekretaris Daerah Nomor : 900/1572/2018 Tanggal 26 Juni 2017 Perihal Pengiriman Buku Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.
- Pada tanggal 28 Juni 2018 telah kami terima permohonan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 oleh Saudara Bupati, melalui surat

Nomor : 900/1582/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal Pengiriman Raperda.

- Selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2018 dilaksanakan Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama TAPD Kabupaten Rembang, dengan hasil telah ditetapkannya jadwal pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017, dan rapat paripurna hari ini merupakan rapat paripurna pertama dari empat rapat paripurna yang diagendakan.

Untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna hari ini sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2017;
3. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Kita masuk acara kedua yang merupakan acara pokok dalam rapat paripurna ini, yaitu Penjelasan Bupati atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.

Kepada Saudara Bupati Rembang, waktu dan tempat dipersilahkan.

===== **PENJELASAN BUPATI** =====

- *(Penjelasan Bupati atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 terlampir)*

Terima kasih Sdr. Bupati atas penjelasannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Demikian tadi penjelasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 oleh Saudara Bupati Rembang. Dari penjelasan bupati ini, selanjutnya akan dibahas oleh fraksi-fraksi, yang selanjutnya akan disampaikan melalui pemandangan umum fraksi-fraksi dan penyampaiannya dilaksanakan dalam rapat paripurna II besuk pagi hari Selasa tanggal 17 Juli 2018.

Akhirnya, dengan mengucap “*Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 12.30 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf bila ada kesalahan saya ketika memimpin rapat paripurna ini.

Sekian

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,



SEKRETARIS,



**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2017**

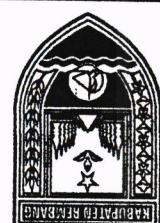
- LAMPIRAN I** : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II** : Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017;

RAPAT PARIPURNA (II)	
I.	JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
II.	SIFAT RAPAT : Terbuka
III.	ACARA RAPAT :
IV.	1. Pembukaan; 2. Penyampaian Permendangan Umu Fraksi-Fraksi atas Raporda Peranggunganjawaan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017; 3. Penutup.
V.	SEKRETARIS RAPAT 1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si. 2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang PLIMPINAN RAPAT 1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ 2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

**RAPERA PERTANGUNGANJAWAAN PELAKSANAN
TANGGAL : 17 Juli 2018
WAKTU : 10.00 WIB.
TEMPAT : Gedung DPRD Kabupaten Rembang**

RISALAH

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No.88 Telep. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG**



VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
<hr/> Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Demokrat	: 6 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 2 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
<hr/> Jumlah	<hr/> : 34 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
2. Fraksi Demokrat	: 2 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 2 orang
7. Fraksi Harapan	: - orang
<hr/> Jumlah	<hr/> : 11 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;
- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini, kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna Kedua dalam rangka membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017, dengan agenda pokok penyampaian pemandangan umum fraksi – fraksi Atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Keabsahan kuorum yang berlaku pada rapat paripurna ini adalah sama dengan yang berlaku pada rapat paripurna pertama hari Senin

tanggal 16 Juli 2018 kemarin, yaitu dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 34 orang. Dengan demikian kuorum Rapat Paripurna hari ini telah terpenuhi.

Dengan mengucap " *Bismillahirrohmaanirrohiim* " tepat pukul 11.05 WIB rapat paripurna hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Sebelum acara berlangsung lebih lanjut, akan saya bacakan susunan acara dalam rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017;
3. Penutup.
- 4.

Marilah kita masuki acara kedua yaitu Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017. Agar di dalam penyampaiannya dapat berjalan tertib, kepada Saudara-saudara

yang ditunjuk untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi, saya persilahkan menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. Zaimul Umam NS
2. Fraksi Demokrat : Sdr. Eka Siswa Kartika
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Ilyas
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Sdr. Widodo
5. Fraksi Partai Gerindra : Sdr. Puji Santoso, S.P.,M.H.
6. Fraksi Karya Sejahtera : Sdr. H. Ismari,S.H.
7. Fraksi Harapan : Sdri. Nur Jannah

Selanjutnya dimulai dari Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dipersilahkan untuk menyampaikan Pemandangan Umumnya.

==== PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI ===

➤ (*Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 terlampir*)

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Agenda dalam rapat paripurna hari ini telah kita lalui, maka selesai sudah acara rapat paripurna ini. Untuk rapat paripurna ketiga dengan agenda Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017, akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018.

Akhirnya dengan mengucap “*Alhamdulillahirobbil ‘alamin*“ tepat pukul 12.00 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

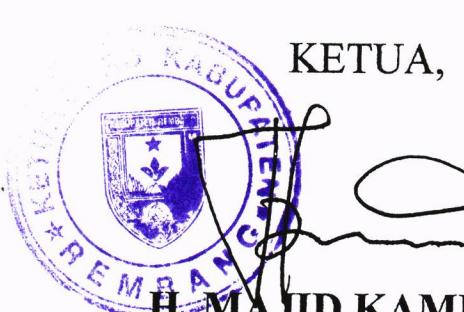
(*Ketuk palu 3 kali*)

Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam memimpin rapat.

Sekian.

Wassalamu ’alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



KETUA,

H. MAJID KAMIL MZ



SEKRETARIS,

Drs. DRUPODO, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670421 199303 1 009

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (II) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2017**

- LAMPIRAN I** : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II** : Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

Hari : Sabtu
Tanggal : 21 Juli 2017
Waktu : 11.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten
Rembang

II. SIFAT RAPAT : Terbuka

III. ACARA RAPAT :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017;
3. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : **H. MAJID KAMIL MZ**
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : **Drs. DRUPODO, M.Si.**
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
<hr/> Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 9 orang
2. Fraksi Demokrat	: 7 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 5 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 3 orang
<hr/> Jumlah	<hr/> : 35 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
2. Fraksi Demokrat	: 1 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: - orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 3 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
<hr/> Jumlah	<hr/> : 10 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;
- Camat Se Kabupaten Rembang;
- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa marilah untuk senantiasa kita selalu bersyukur kehadirat-Nya, karena atas kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, pada hari ini Sabtu tanggal 21 Juli 2018 kita kembali bertemu untuk melaksanakan Rapat Paripurna Ketiga dalam rangka membahas Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017. Sesuai hasil rapat Badan Musyawarah dan TAPD Kabupaten Rembang, yang menjadi agenda pokok dalam rapat paripurna ini adalah Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir dalam Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebanyak 35 orang.

Adapun keabsahan kuorum yang berlaku dalam Rapat Paripurna Ketiga hari ini, adalah sama dengan yang berlaku pada Rapat Paripurna Pertama maupun Rapat Paripurna Kedua dalam membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017, yaitu dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD. Dengan demikian kuorum dalam rapat paripurna ini telah terpenuhi, dan rapat paripurna dapat kita lanjutkan.

Selanjutnya dengan membaca "***Bismillahirrohmanirrohim***" tepat pukul 11.05 WIB Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Rapat paripurna ketiga ini merupakan tindak lanjut atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017, yang penyampaiannya dilaksanakan pada rapat paripurna kedua pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018.

Untuk selengkapnya, akan saya bacakan susunan acara yang menjadi agenda dalam Rapat Paripurna hari ini, yaitu :

1. Pembukaan.
2. Jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017;
3. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Marilah kita masuki acara kedua, dan merupakan agenda pokok dalam rapat paripurna ini yaitu Penyampaian Jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.

Kepada Saudara Bupati , waktu dan tempat dipersilahkan.

==JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ==

➤(*Penyampaian Jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 terlampir*)

Terimakasih Saudara Bupati atas jawabannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Demikian tadi telah kita ikuti dan dengar bersama, jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017. Dengan telah disampaikannya jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi, maka selesai sudah rapat paripurna ini. Kami atas nama Pimpinan DPRD mengucapkan terima kasih atas perhatian,

kehadiran serta kebersamaannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan Rapat Paripurna hari ini.

Setelah rapat paripurna ini, selanjutnya akan dilaksanakan Rapat Badan Anggaran dan TAPD, dilanjutkan dengan Rapat Badan Anggaran dan Pimpinan Komisi-Komisi. Sedangkan rapat paripurna terakhir, yaitu rapat paripurna ke empat akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018.

Akhirnya, dengan mengucap “ *Alhamdulillahirobbil ‘alamin* ” tepat pukul 12.00 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG


KETUA,
H. MAJID KAMIL MZ


SEKRETARIS,
Drs. DRUPODO, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670421 199303 1 009

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (III) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2017**

- LAMPIRAN I** : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II** : Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.

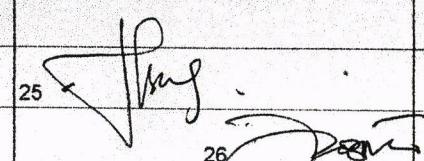
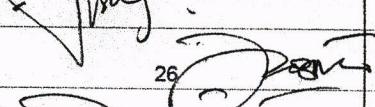
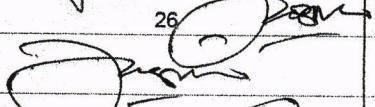
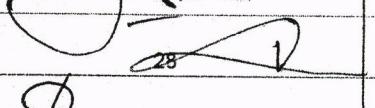
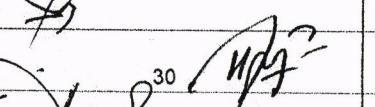
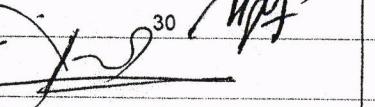
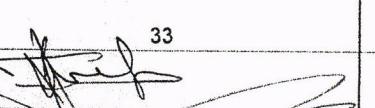
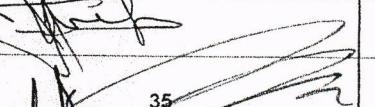
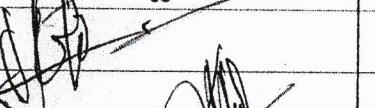
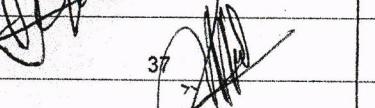
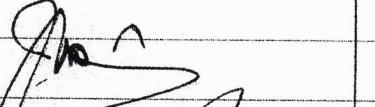
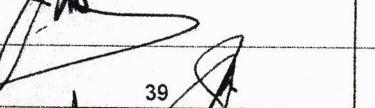
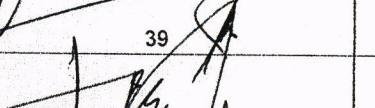
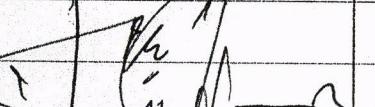
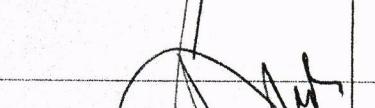
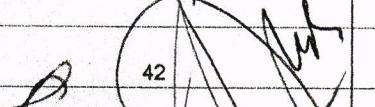
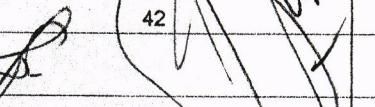
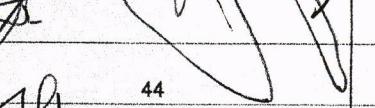
I

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN
2017

HARI/TANGGAL : SENIN, 16 JULI 2018
PUKUL : 10.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	Onomah
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	Tn-
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, M.H.	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICAH, S.E, M.H.	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15	Saud
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, S.E.	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	18	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22	
23	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi.	Anggota	23	
24	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	24	

	FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM		
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25 
26	JASMANI	Anggota	26 
27	WIDODO	Anggota	27 
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28 
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29 
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30 
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31 
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spi.	Anggota	32 
	FRAKSI PARTAI GERINDRA		
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33 
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34 
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35 
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36 
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37 
	FRAKSI KARYA SEJAHTERA		
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38 
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39 
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40 
41	CATUR WINANTO, S.H.	Anggota	41 
	FRAKSI HARAPAN		
42	SUKARMAIN	Anggota	42 
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43 
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44 
45	NUR JANNAH	Anggota	45 

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

DPRD KABUPATEN REMBANG

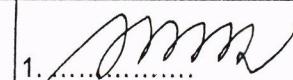
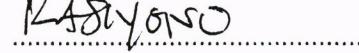
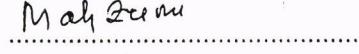
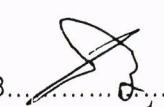
KETUA,

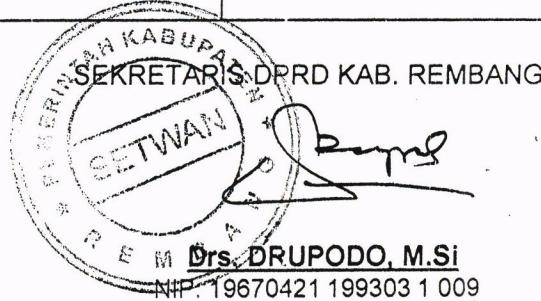

H. MAJID KAMIL MZ

DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN
ANGGARAN 2017

HARI/TANGGAL : SENIN, 16 JULI 2018

PUKUL : 10 00 WIB

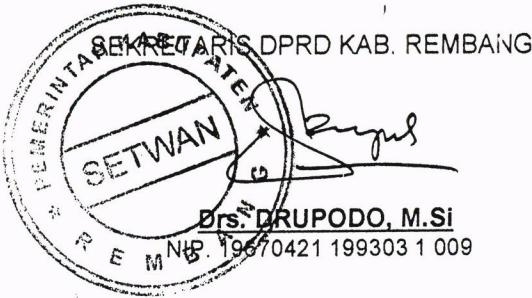
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3		Kejaksaan Negeri Rembang	3. 
4		Pengadilan Negeri Rembang	4. 
5		Dandim 0720 Rembang	5. 
6		Kepolisian Resort Rembang	6. 
7		Pengadilan Agama Kab. Rembang	7. 
8	Drs. SUBAKTI	Sekertaris Daerah	8. 



DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN
ANGGARAN 2017

HARI/TANGGAL : SENIN, 16 JULI 2018
PUKUL : 10.00 WIB

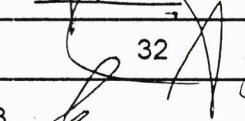
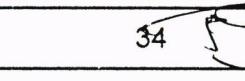
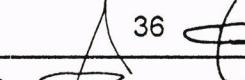
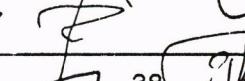
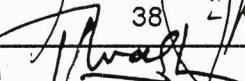
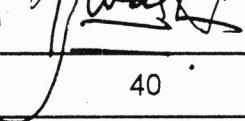
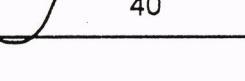
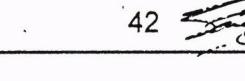
NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	M. UGUSTO GITA	1
2	CAMAT KALIORI	2
3	CAMAT SUMBER	KAM.DANI.....	3
4	CAMAT SULANG	S. Sulang	4
5	CAMAT BULU	S. Marjuk	5
6	CAMAT PAMOTAN	M. W. YOTO	6
7	CAMAT GUNEM	Gulino	7
8	CAMAT SALE	SUBHAN	8
9	CAMAT LASEM	9
10	CAMAT PANCUR	Kulawati	10
11	CAMAT SEDAN	SUBHAN	11
12	CAMAT SLUKE	H. Al-Yadi	12
13	CAMAT KRAGAN	M. Aisy	13
14	CAMAT SARANG	14



DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

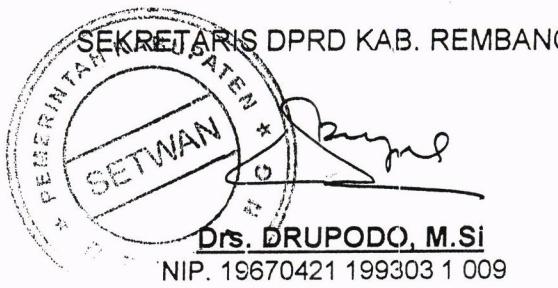
HARI/TANGGAL : SENIN, 16 JULI 2018
PUKUL : 10.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA	Wan Effendi		7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN			8
9	BAG. HUKUM	Mi dlo jaub		9
10	BAG. HUMAS	Kusumah		10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Aqsa kurni H		11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Latifah		13
14	BAG. ORGANISASI & KEPERGAWAIAN			14
15	BAG. UMUM	Ganharto		15
16	BPPKAD	M. Nofrizi		16
17	INSPEKTORAT	SRI WIATINI		17
18	BAPPEDA	Nur		18
19	DINSOSP2KB	Fajri Wahyuni		19
20	BKD			20
21	B P B D	Purnawati San	ba laki	21
22	DPU TATA RUANG	SUCI HARYATO	Ica das	22
23	DINPERKIM	ges henarni	Ka. Dinas	23
24	DINAS KESEHATAN	Ali Syaqi	Ku. Dinas	24
25	DINDIKPORA	Mardji	Kadinas	25
26	DINPERINDAGKOP & UMKM	AHSANUDDIN	Kadinas	26
27	DINTANPAN	Suratnur		27
28	DINLUTKAN	Septianan	Omertan	28
29	DINKOMINFO	Wartomo		29
30	DINAS PERHUBUNGAN	Sutarto	Sutarto	30

BADAN/BAG/DINAS/KANTOR		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
31	DINAS DUKCAPIL	Hasmin		31 
32	DINPERMADES	Sulistiwi	Kabid	32 
33	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	TARSONO	Sekdiri	33 
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	SULHARDI	As. DLH	34 
35	KANTOR KESBANGPOLINMAS			35
36	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN	H. Agus Sula	Ka. Arsip	36 
37	DINAS PMPTSP NAKER	ANJAR	Sekdiri	37 
38	RSUD dr. R. SUTRASNO	Siti Kartik	Kabag TU	38 
39	SATPOL PP	H. WILALUYO		39 
40	TIM PKK KAB. REMBANG			40 
41	P D A M			41
42	PERCETAKAN DAERAH	SANGGA Sihombing	Ka. Umpt.	42 
43	PD. BANK PASAR			43
44	BANK JATENG CAB. REMBANG			44
45	BRI CAB. REMBANG			45
46	PD BPR BKK LASEM			46
47	PT. R B S J			47
48	APOTIK DAERAH			48
49	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA			49
50	DIPENDA PROPINSI			50
51	BPS KAB. REMBANG			51
52	RUMAH TAHANAN			52
53	PERHUTANI KPH MANTINGAN			53
54	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			54
55	KANTOR PERHUTANI SPH IV			55
56	KANTOR POS DAN GIRO			56
57	TELKOM REMBANG			57
58	PLN CAB. REMBANG			58
59	BAWASLU KAB. REMBANG			59
60	BPN KAB. REMBANG			60
61	KANTOR PAJAK			61
62	UP3AD (ASET DAERAH)			62
63	KANTOR PELABUHAN			63
64	KETUA KPU KAB. REMBANG			64

1	2	3	4	5
65	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			65
66	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			66
67	BTPN KCP. REMBANG			67
68	PERUM PEGADAIAN			68
69	BSM.BANK DANAMON			69
70	DHARMA WANITA PERSATUAN			70
71	GERAKAN PRAMUKA			71
72	PMI CAB. REMBANG			72
73	STIE. YPPI REMBANG			73
74	DPC PPP			74
75	DPC PARTAI DEMOKRAT	Farmanus	Agus DPE.	75
76	DPD PARTAI GOLKAR			76
77	DPD PAN			77
78	DPC PARTAI HANURA			78
79	DPC PKS			79
80	DPC PARTAI NASDEM	R. Kusum	Wati	80
81	DPC PARTAI GERINDRA			81
82	DPC PKB			82
83	DPC PDI PERJUANGAN			83
84	SUARA MERDEKA			84
85	CAKRA TV			85
86	RADIO CBFM	Masudi	Repor. L	86
87	RADIO R2B			87
88	MAJALAH BANGKIT			88
89	PATI EKSPRESS			89
90	RADIO MATA AIR			90

1	2	3	4	5
91		1. Kartini	SA FRS	91
92	Sri Nurjanti	PPPKAD		92
93	Sriwindu	—u—		93
94	Suryanti	Medi agu		94
95	Jawa Pos Padar Kudus	Khout		95
96	Int Dian	Aguo		96
97	H. MUSLICH 07	PERP		97
98				98
99				99
100				100

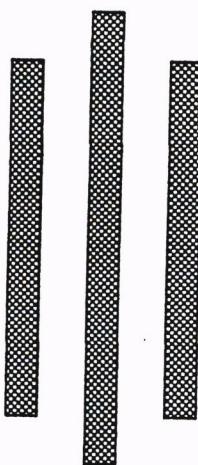




BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

P E N G A N T A R
N O T A K E U A N G A N

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG



TAHUN ANGGARAN 2017



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PENGANTAR NOTA KEUANGAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2017

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

- Yth. Saudara Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
- Yth. Saudara Staff Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat dan Hadirin yang berbahagia.

Mengawali sambutan ini, marilah terlebih dahulu kita menyampaikan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita sehingga dapat bertemu dalam Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini perkenankan Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan segenap anggota DPRD serta jajaran eksekutif atas dukungan dan kerjasama yang baik selama ini dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan untuk kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang yang kita cintai.

Oleh karena itu pada setiap akhir Tahun Anggaran kami menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan tahap akhir dari pada siklus anggaran yang memuat data realisasi pelaksanaan anggaran sebagai cerminan dari hasil-hasil yang telah dicapai dan sekaligus memberikan gambaran mengenai berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 .

Penyampaian Pengantar Nota Keuangan ini merupakan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 sebagai kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dalam pasal 101 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Selanjutnya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa struktur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Dari rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.763.792.031.109,60 dapat direalisasikan sebesar Rp.1.722.252.909.030,04 atau 97,64%. Untuk Belanja Daerah dari yang direncanakan sebesar Rp.1.969.222.098.819,18 realisasinya adalah sebesar Rp.1.829.088.241.098,22 atau 92,88% meliputi atas Belanja dan Transfer dengan rincian untuk Belanja dari yang direncanakan sebesar Rp.1.597.256.286.598,18 realisasinya adalah sebesar Rp.1.457.482.172.598,22 dan Transfer dari yang direncanakan sebesar Rp.371.965.812.221,00 realisasinya adalah sebesar Rp.371.606.068.500,00

Sedangkan pada kelompok Pembiayaan yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp.214.875.906.410,58 realisasinya sebesar Rp.232.225.166.662,58 atau 108,07% dan Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp.9.445.838.701,00 realisasinya sebesar Rp.8.228.389.150,00 atau 87,11%

Berikut ini kami sampaikan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 :

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(%)
4	PENDAPATAN - LRA	1.763.792.031.109,60	1.722.252.909.030,04	97,64
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	308.606.440.109,60	300.319.284.807,04	97,31
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	52.840.500.000,00	59.734.946.872,00	113,05
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	22.043.335.000,00	20.730.064.301,00	94,04
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	9.213.262.848,00	9.212.738.532,00	99,99
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	224.509.342.261,60	210.641.535.102,04	93,82
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.452.618.687.000,00	1.420.221.823.549,00	97,77
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	942.518.198.000,00	927.645.131.515,00	98,42
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	25.078.792.000,00	28.022.881.056,00	111,74
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	18.349.096.000,00	17.340.981.751,00	94,51
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	771.584.367.000,00	771.584.367.000,00	100,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	127.505.943.000,00	110.696.901.708,00	86,82
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	386.243.246.000,00	375.414.444.034,00	97,20
4.2.2.3	Dana Penyesuaian - LRA	386.243.246.000,00	375.414.444.034,00	97,20
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	96.743.553.000,00	92.803.709.000,00	95,93
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	96.743.553.000,00	92.803.709.000,00	95,93
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	27.113.690.000,00	24.358.539.000,00	89,84
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	27.113.690.000,00	24.358.539.000,00	89,84
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	2.566.904.000,00	1.711.800.674,00	66,69
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	2.566.904.000,00	1.711.800.674,00	66,69
5	BELANJA	1.597.256.286.598,18	1.457.482.172.598,22	91,25
5.1	BELANJA OPERASI	1.176.620.595.362,28	1.102.895.850.531,00	93,73
5.1.1	Belanja Pegawai	844.586.125.211,68	797.129.312.468,00	94,38
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	272.562.067.650,60	250.388.658.063,00	91,86

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(%)
5 . 1 . 3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	49.960.402.500,00	46.450.880.000,00	92,98
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	9.512.000.000,00	8.927.000.000,00	93,85
5 . 2	BELANJA MODAL	419.803.691.235,90	353.770.714.067,22	84,27
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	2.600.000.000,00	528.142.667,00	20,31
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.949.549.034,90	64.631.248.279,22	81,86
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	115.999.457.192,00	104.140.195.865,00	89,78
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	196.742.520.350,00	173.930.573.900,00	88,41
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.512.164.659,00	10.540.553.356,00	41,32
5 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	832.000.000,00	815.608.000,00	98,03
5 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	832.000.000,00	815.608.000,00	98,03
6	TRANSFER	371.965.812.221,00	371.606.068.500,00	99,90
6 . 1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	6.455.961.000,00	6.437.223.500,00	99,71
6 . 1 . 1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	3.735.350.000,00	3.735.350.000,00	100,00
6 . 1 . 2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.720.611.000,00	2.701.873.500,00	99,31
6 . 2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	365.509.851.221,00	365.168.845.000,00	99,91
6 . 2 . 2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	364.418.895.221,00	364.077.895.000,00	99,91
6 . 2 . 3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.090.956.000,00	1.090.950.000,00	100,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(205.430.067.709,58)	(106.835.332.068,18)	52,01
7	PEMBIAYAAN			
7 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	214.875.906.410,58	232.225.166.662,58	108,07
7 . 1 . 1	Penggunaan SILPA	214.875.906.410,58	214.495.185.982,58	99,82
7 . 1 . 2	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Perbankan	0,00	17.729.980.680,00	0,00
7 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.445.838.701,00	8.228.389.150,00	87,11
7 . 2 . 2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	8.189.000.000,00	8.189.000.000,00	100,00
7 . 2 . 3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00
7 . 2 . 7	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	1.256.838.701,00	39.389.150,00	3,13
	PEMBIAYAAN NETTO	205.430.067.709,58	223.996.777.512,58	109,04
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	117.161.445.444,40	-

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Berdasarkan angka-angka realisasi dan penjelasan secara garis besar yang tertuang dalam Pengantar Nota Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 maka terlihat bahwa pelaksanaan

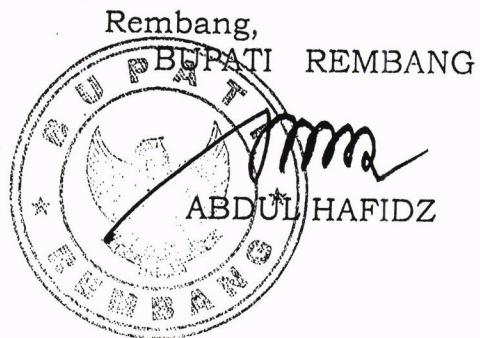
APBD Kabupaten Rembang pada umumnya dapat berjalan lancar dan terdapat beberapa peningkatan.

Namun perlu dipahami, bahwa disamping kemajuan-kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai dan dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Rembang masih juga terdapat kekurangan-kekurangan dan hambatan yang semua itu harus dihadapi sebagai pelajaran dan tantangan demi tercapainya kesempurnaan tugas-tugas mendatang. Oleh karenanya masih diperlukan kerja keras dengan segala kemampuan yang ada sehingga pada gilirannya dapat memberikan hasil yang lebih sempurna.

Bersama Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 ini dilampirkan buku-buku Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2017 dengan harapan untuk segera dibahas dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam rangka membangun Kabupaten Rembang.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb.





BUPATI REMBANG

**SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA PENGANTAR NOTA KEUANGAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017**

Tanggal, 16 Juli 2018

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Ykh. - Ketua DPRD Kabupaten Rembang;
- Ykh. - Para Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Ykh. - Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
- Ykh. - Staff Ahli Bupati, Para Asisten Sekda dan Kepala OPD se-Kabupaten Rembang;
- Ykh. - Para Camat dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

2

Mengawali pertemuan kali ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan RidhoNya-lah kita dapat berkumpul bersama dalam Rapat Paripurna DPRD dengan acara **“Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017”** dalam keadaan sehat wal'fiat.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini perkenankan saya menyampaikan ucapan **terima kasih** dan penghargaan yang tinggi kepada Pimpinan dan segenap anggota DPRD serta jajaran eksekutif atas dukungan dan kerjasama yang baik selama ini dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan untuk kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang yang kita cintai.

Oleh karena itu, pada setiap akhir Tahun Anggaran, kami menyampaikan

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan tahap akhir dari siklus anggaran yang memuat data realisasi pelaksanaan anggaran sebagai cerminan dari hasil-hasil yang telah dicapai dan sekaligus memberikan gambaran mengenai berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.

Penyampaian Pengantar Nota Keuangan ini merupakan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 sebagai kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dalam Pasal 101 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran terakhir.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Selanjutnya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa struktur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Dari rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.763.792.031.109,60 (*Satu trilyun tujuh ratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tiga puluh satu ribu seratus sembilan koma enam puluh rupiah*) dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.722.252.909.030,04 (*Satu trilyun tujuh ratus dua puluh dua milyar dua ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu tiga puluh koma nol empat rupiah*) atau 97,64%.

Untuk Belanja Daerah dari yang direncanakan sebesar Rp.1.969.222.098.819,18 (*Satu trilyun sembilan ratus enam puluh sembilan milyar dua*

ratus dua puluh dua juta Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus Sembilan belas koma delapan belas rupiah) direalisasikan sebesar Rp. 1.829.088.241.098,22 (Satu trilyun delapan ratus dua puluh sembilan milyar delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu Sembilan puluh delapan koma dua puluh dua rupiah) atau 92,88%, meliputi belanja dan transfer dengan rincian untuk belanja dari yang direncanakan sebesar Rp. 1.597.256.286.598,18 (Satu triliun lima ratus sembilan puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus Sembilan puluh delapan koma delapan belas rupiah) realisasinya adalah sebesar Rp. 1.457.482.172.598,22 (Satu triliun empat ratus lima puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh delapan koma dua puluh dua rupiah) dan transfer dari yang direncanakan sebesar Rp. 371.965.812.221,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu milyar sembilan ratus enam puluh

lima juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) realisasinya adalah sebesar Rp. 371.606.068.500,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu milyar enam ratus enam juta enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Sedangkan pada kelompok Pembiayaan yang terdiri atas penerimaan pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp. 214.875.906.410,58 (*Dua ratus empat belas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam ribu empat ratus sepuluh koma lima puluh delapan rupiah*) realisasinya sebesar Rp. 232.225.166.662,58 (*Dua ratus tiga puluh dua milyar dua ratus dua puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua koma lima puluh delapan rupiah*) atau 108,07%. Dan Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp. 9.445.838.701,00 (*Sembilan milyar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus satu rupiah*) realisasinya sebesar Rp. 8.228.389.150,00 (*Delapan milyar dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan*

puluhan Sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) 7
atau 87,11%.

Berdasarkan angka-angka realisasi dan penjelasan secara garis besar yang tertuang dalam Pengantar Nota Laporan Pertanggungjawaban Pelaksaraan APBD Tahun Anggaran 2017, maka terlihat bahwa pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang pada umumnya dapat berjalan lancar dan terdapat beberapa peningkatan.

Namun perlu dipahami, bahwa disamping kemajuan-kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai masih terdapat kekurangan dan hambatan yang semua itu harus dihadapi sebagai pelajaran dan tantangan serta perlu penyelesaian demi tercapainya kesempurnaan tugas-tugas mendatang. Oleh karenanya masih diperlukan kerja keras dengan segala kemampuan yang ada sehingga pada gilirannya dapat memberikan hasil yang lebih sempurna.

Bersama Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 ini dilampirkan buku-buku

Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2017 dengan harapan untuk segera dibahas dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam rangka membangun Kabupaten Rembang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

II

DATI AKTAR
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN
2017

HARI/TANGGAL : SELASA, 17 JULI 2018
PUKUL : 10.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
	FRAKSI DEMOKRAT			
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, M.H.	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICAH, S.E, M.H.	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, S.E.	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22	
23	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi.	Anggota	23	
24	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	24	

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM

25	SUMARSHI	Wakil Ketua DPRD	25
26	JASMANI	Anggota	26
27	WIDODO	Anggota	27
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spi.	Anggota	32

FRAKSI PARTAI GERINDRA

33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40
41	CATUR WINANTO, S.H.	Anggota	41

FRAKSI HARAPAN

42	SUKARMAIN	Anggota	42
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44
45	NUR JANNAH	Anggota	45

Keterangan :

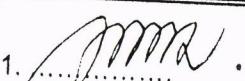
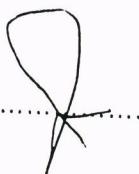
- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

DPRD KABUPATEN REMBANG

KETUA,
H. MAJID KAMIL MZ

DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN
ANGGARAN 2017

HARI/TANGGAL : SELASA, 17 JULI 2018
PUKUL : 10.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3	Kejaksaan Negeri Rembang	3.
4	DRUPODO, M.Si	Pengadilan Negeri Rembang	4. 
5	RAPIXONO	Dandim 0720 Rembang	5. 
6	MARTOTO, S.Pd	Kepolisian Resort Rembang	6. 
7	Maj. suan	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7. 
8	Drs. SUBAKTI	Sekertaris Daerah	8.

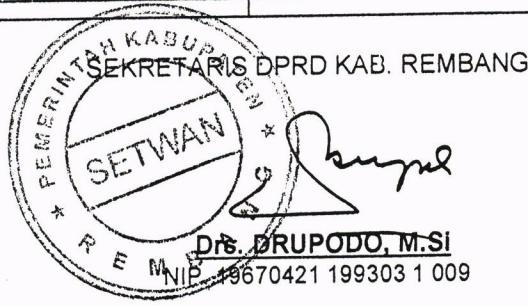


Drs. DRUPODO, M.Si
NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN
ANGGARAN 2017

HARI/TANGGAL : SELASA, 17 JULI 2018
 PUKUL : 10.00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	Acung Bawana	1
2	CAMAT KALIORI	2
3	CAMAT SUMBER	3
4	CAMAT SULANG	4
5	CAMAT BULU	5
6	CAMAT PAMOTAN	Acung BUMANTO	6
7	CAMAT GUNEM	7
8	CAMAT SALE	8
9	CAMAT LASEM	Hayas	9 13
10	CAMAT PANCUR	Subur	10
11	CAMAT SEDAN	11
12	CAMAT SLUKE	Mulyammad	12
13	CAMAT KRAGAN	13
14	CAMAT SARANG	14



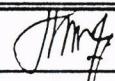
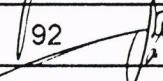
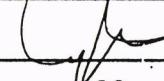
DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

HARI/TANGGAL : SELASA, 17 JULI 2018
PUKUL : 10.00 WIB

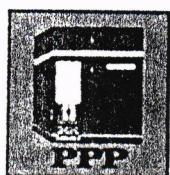
NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN			8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS			
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Agus Lur H	Kadis	11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Letkol Hm	Kadis	13
14	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN	Isti Handayani	Ko Subbag	14
15	BAG. UMUM	Gaufontu		15
16	BPPKAD	MCF		16
17	INSPEKTORAT			
18	BAPPEDA	Dwi Bhyati		18
19	DINSOSP2KB	NGKT YNH	akut	19
20	BKD			20
21	B P B D	Purwadi Saeni	balai	21
22	DPU TATA RUANG	Jilli Harsito	Kadis	22
23	DINPERKIM			23
24	DINAS KESEHATAN	Supriyo Utomo	Sekdir	24
25	DINDIKPORA	Budiyono	Jekdir	25
26	DINPERINDAGKOP & UMKM			26
27	DINTANPAN	Gunturin	Kadis	27
28	DINLUTKAN	Cedraman	Kadis	28
29	DINKOMINFO	Kartono	Kadis	29
30	DINAS PERHUBUNGAN	Suyono	K. Dinas	30

1	2	3	4	5
31	DINAS DUKCAPIL			31
32	DINPERMADES	Surur	Kadu	32
33	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Kansono.	Sekdin	33
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Susron	K. L.	34
35	KANTOR KESBANGPOLINMAS	Indar Asri Y		35
36	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN	H. Hary Sulaiman	Kadu	36
37	DINAS PMPTSP NAKER	Febriyati, G	Kadu	37
38	RSUD dr. R. SUTRASNO	Luah	Per.	38
39	SATPOL PP	H. WALUYO		39
40	TIM PKK KAB. REMBANG			40
41	P D A M			41
42	PERCETAKAN DAERAH	Sugeng dihombo	Ka Unit	42
43	PD. BANK PASAR			43
44	BANK JATENG CAB. REMBANG			44
45	BRI CAB. REMBANG			45
46	PD BPR BKK LASEM			46
47	PT. R B S J			47
48	APOTIK DAERAH			48
49	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA			49
50	DIPENDA PROPINSI			50
51	BPS KAB. REMBANG			51
52	RUMAH TAHANAN			52
53	PERHUTANI KPH MANTINGAN			53
54	PERHUTANI KPH KERONHARJO			54
55	KANTOR PERHUTANI SPH IV			55
56	KANTOR POS DAN GIRO			56
57	TELKOM REMBANG			57
58	PLN CAB. REMBANG			58
59	BAWASLU KAB. REMBANG			59
60	B P N KAB. REMBANG			60
61	KANTOR PAJAK			61
62	UP3AD (ASET DAERAH)			62
63	KANTOR PELABUHAN			63
64	KETUA KPU KAB. REMBANG	Surur		64

1	2	3	4	5
65	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			65
66	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AQUNG			66
67	BTPN KCP. REMBANG			67
68	PERUM PEGADAIAN			68
69	BSM BANK DANAMON			69
70	DHARMA WANITA PERSATUAN			70
71	GERAKAN PRAMUKA			71
72	PMI CAB. REMBANG			72
73	STIE. YPPI REMBANG			73
74	DPC PPP			74
75	DPC PARTAI DEMOKRAT			75
76	DPD PARTAI GOLKAR			76
77	DPD PAN			77
78	DPC PARTAI HANURA			78
79	DPC PKS			79
80	DPC PARTAI NASDEM			80
81	DPC PARTAI GERINDRA			81
82	DPC PKB			82
83	DPC PDI PERJUANGAN			83
84	SUARA MERDEKA			84
85	CAKRA TV			85
86	RADIO CBFM			86
87	RADIO R2B			87
88	MAJALAH BANGKIT			88
89	PATI EKSPRESS			89
90	RADIO MATA AIR			90

/BAG/DINAS/KANTOR		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
2	3	4	5	
	PPPKAD	Sri Nurjanti	Kabid	91 
92	Kotam	Apus	Int	92 
93	Dewan Pendidikan	A. Surur	Ketua	93 
94		A. Warsono	SS. KCE	94 
95	Pakar Kudus	Phond		95 
96				96 
97				97 
98				98 
99				99 
100				100 





PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Selasa , 17 Juli 2018

Dibacakan oleh : Zaimul Umam NS

Assalamu a'laikum Warohmatullahi wabarakatuh....

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

Alhamdulillahi Robbil a'lamiin, asholatu wassalamu a'la Sayyidina Wamaulana Muhammaddin, wa'ala alih wosohbihi ajma'iin..., Amma ba'du ...

Yang kami hormati :

- => Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- => Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- => Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- => sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala

Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang

=> Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf

=> Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, dan semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian Pemandangan Umum ini, terlebih dahulu marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ILAHI ROBBI , atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan kepada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat Paripurna DPRD ini, dalam keadaan sehat Wal afiat.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita, MUHAMMAD SAW, para shahabat, dan seluruh keluarganya.

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan sidang, dan segenap Sidang Dewan, yang kami Hormati...

Mengawali penyampaian Pemandangan umum kami, terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang tahun 2017, yang Nota Keuangannya telah disampaikan oleh sdr. Bupati , pada rapat paripurna Senin, tanggal 16 Juli 2018 kemarin , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang, yang telah bekerja keras, meskipun capaian realisasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 ini , belum ada kenaikan yang berarti, dibanding dengan tahun sebelumnya, yakni realisasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016 mencapai 92,50 %, dan realisasi APBD tahun anggaran 2017 hanya mencapai 92,88 % . Walaupun sampai saat ini, masih banyak hal yang belum dapat memenuhi harapan masyarakat luas , kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan selalu memberikan dorongan, dengan harapan untuk capaian realisasi pelaksanaan APBD tahun berjalan ini, dapat meningkat lebih baik lagi.

Dalam kesempatan yang baik ini , dan kebetulan masih dalam suasana dekat bulan sawal , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan bathin, atas semua kesalahan dan khilaf yang pernah ada .

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati...,

Sehubungan dengan Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 ini , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, sesuai tugas pokok dan funfsi DPRD, untuk kepentingan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang , menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Terkait dengan hasil LHP BPK atas Laporan keuangan Pemkab Rembang Tahun 2017, bahwa dari hasil Pemeriksaan BPK tersebut, Pemkab Rembang masih

mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) , karena dalam LHP BPK masih ditemukan beberapa kelemahan tentang pengendalian internal, dan juga adanya temuan tentang ketidak patuhan terhadap Peraturan perundang-undangan yang ada. Dan menurut pendapat serta masukan dari beberapa pihak, bahwa Pemkab Rembang sudah layak menerima predikat opini WTP. Maka kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, mendorong dan meminta kepada Pemkab Rembang, agar meningkatkan kinerja yang lebih serius dan melakukan langkah-langkah strategis, supaya di tahun mendatang Pemkab Rembang mendapatkan status Opini WTP.

2. Terkait dengan LKPJ Bupati dan LPP APBD tahun 2017 , dari hasil audit BPK , ditemukan adanya ketidak konsistenan laporan realisasi anggaran tahun 2017, antara dokumen LKPJ Bupati dengan LPP APBD tahun 2017 yaitu , di dalam pendapatan terdapat selisih sebesar : Rp. 16.660.862.009,96 dan pada realisasi belanja terdapat selisih sebesar : Rp. 49.838.414,78 . Hal tersebut karena adanya koreksi hasil pemeriksaan BPK, atas realisasi pendapatan dan belanja , sehingga mempengaruhi besaran silpa tahun berjalan. Di dalam catatan Pembiayaan Netto dan Silpa tahun 2017, pada LKPJ Bupati tidak dilaporkan realisasinya, sehingga dalam LKPJ Bupati tidak dapat diketahui besaran Silpa -----tahun berjalan.

Atas ditemukanya perbedaan/selisih dalam pelaporan keuangan tersebut , agar menjadikan perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah, karena hal tersebut sebagai bukti kurangnya derajat Akuntabilitas pengelolaan Keuangan daerah pada tahun 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut kami dari Fraksi Partai Perstuan Pembangunan mohon Penjelasan dan apa solusinya , agar kedepan tidak terulang kembali.

3. Terkait dengan Kas di Kasda sebesar Rp. 100.720.810.818,57 yang disimpan pada Giro dan Rekening Deposito Bank Jateng , BRI dan BNI , sesuai dalam CALK yang ada, Kami Fraksi Partai Perstuan Pembangunan memberikan apresiasi langkah penyimpanan tersebut, namun perlu mohon penjelasan terkait atas dasar apa memilih penyimpanan di bank tersebut diatas..? Sistem deposito apa yang dipilih, dan berapa tingkat suku bunga yang disepakati di masing-masing bank tersebut.
4. Terkait dengan Persediaan , Saldo persediaan sampai 31 Desember 2017 dengan nilai sebesar Rp. 17.464.344.818,13 . Merupakan persediaan barang atau perlengkapan, yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pelayanan, yang untuk dijual dan/atau diserahkan kepada masyarakat., baik berupa barang habis pakai ataupun obat-obatan di RSUD. Sesuai dengan SAP (Standart Akutansi Pemerintah), penetuan nilai persediaan dilakukan dengan cara *Stock Opname*, yaitu infentarisasi fisik atas nilai persediaan yang masih tersisa di setiap unit pengguna anggaran. Dari persediaan tersebut berada di DKK dan RSUD + Dinsos PPKB sebesar Rp. 15.331.895.551,93 . Mohon dijelaskan apakah stock obat-obatan yang RSUD dilakukan stock opname..? untuk mengevaluasi

persediaan obat yang masih dapat digunakan atau sudah kedaluwarsa ..?
Sehingga perencanaan penganggaran kedepan bisa lebih baik dan tepat.

5. Berkaitan dengan Piutang Pendapatan Kabupaten Rembang :

Besaran saldo penyisihan piutang pada Pendapatan daerah per 31 desember 2017, nilainya lebih besar dibanding dengan tahun sebelumnya ditahun 2016 , dengan besaran sesuai tercantum dalam daftar lampiran Laporan. Piutang tersebut berada pada pos Pajak , Retribusi , Piutang lain-lain yang sah dan pada piutang transfer Pemerintah pusat , dan hal ini pemerintah tidak kehilangan hak tagih, kepada pihak yang bertanggung jawab , untuk itu diperlukan *Roodmap* yang jelas dan terukur, agar berbagai jenis piutang pendapatan, yang telah disisihkan secara administrasi tersebut, dapat terselesaikan dan masuk kas daerah. Sehubungan dengan hal tersebut kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, mohon penjelasan :

- Mengapa piutang tersebut berpotensi macet ...?
- Apa masalah dan hambatanya sehingga berbagai piutang tersebut tidak tertagih...?
- Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam melakukan penagihan piutang tsb... ?

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2017. Ahirnya mari kita mohon pada ALLAH SWT, semoga kita selalu diberikan petunjuk, kemudahan dan kelancaran dalam beraktifitas , sehingga upaya dan usaha kita, mandapatkan hasil yang bermanfaat untuk masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Trimakasih atas segala perhatianya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya.....

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarakatuh....

Rembang , 17 Juli 2018

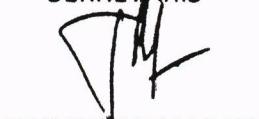
**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA



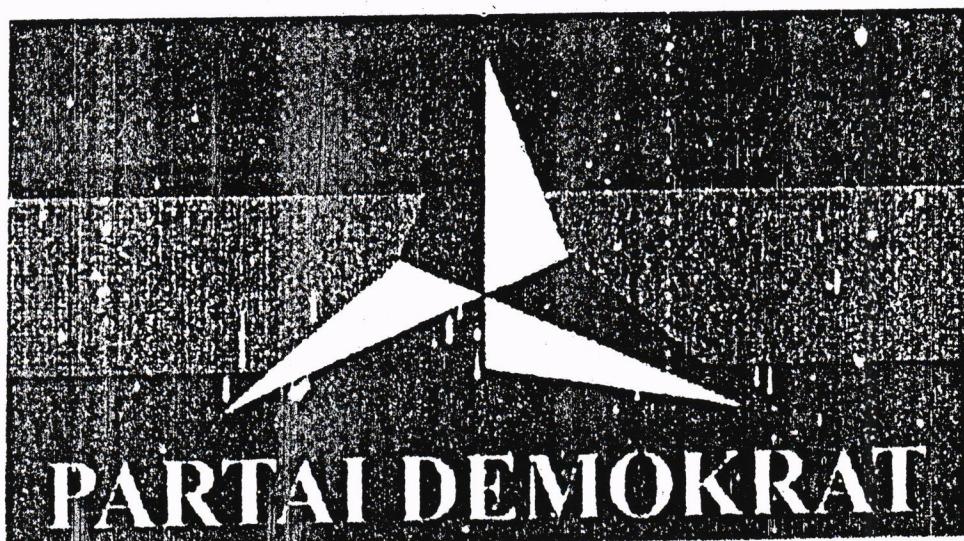
SUGIHARTO

SEKRETARIS



ZAIMUL UMAM NS

**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
ATAS RAPERDA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017**



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Rembang, 17 JULI 2018

Dibacakan oleh : EKA SISWA KARTIKA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI DEMOKRAT
Jl. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194

**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
ATAS RAPERDA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017**

SELASA, 17 JULI 2018

Dibacakan oleh : EKA SISWA KARTIKA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua :

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. FORKOPIMDA Kabupaten Rembang
4. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
5. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
6. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staff
7. Saudara Pimpinan Organisasi Kernasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Mengawali penyampaian pandangan fraksi ini, perkenankanlah kami mengajak hadirin semuanya untuk memanajatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, keselamatan dan berkah kepada kita semua sehingga kita bisa hadir mengikuti persidangan yang berbahagia ini.

Secara umum kami memberi apresiasi yang sangat tinggi terhadap kinerja PEMKAB Rembang pada tahun 2017, walau masih banyak kendala dan kekurangan di mana-mana terutama dengan masalah OPD yang sebagian besar masih malas melaksanakan kegiatanya.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat

Dalam kesempatan ini, kami memberi beberapa masukan untuk ditindak lanjuti, diantaranya :

1. Kinerja OPD masih sangat lamban sehingga program yang direncanakan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan penyerapan anggaran kurang maksimal, untuk itu perlu peningkatan sumber daya manusia yang mumpuni.
2. Kami berharap untuk hibah dan bansos supaya secepatnya direalisasikan dan dilaksanakan, karena masyarakat sudah menunggu dan membutuhkannya.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Demikianlah pandangan umum Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan, Kami ucapan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

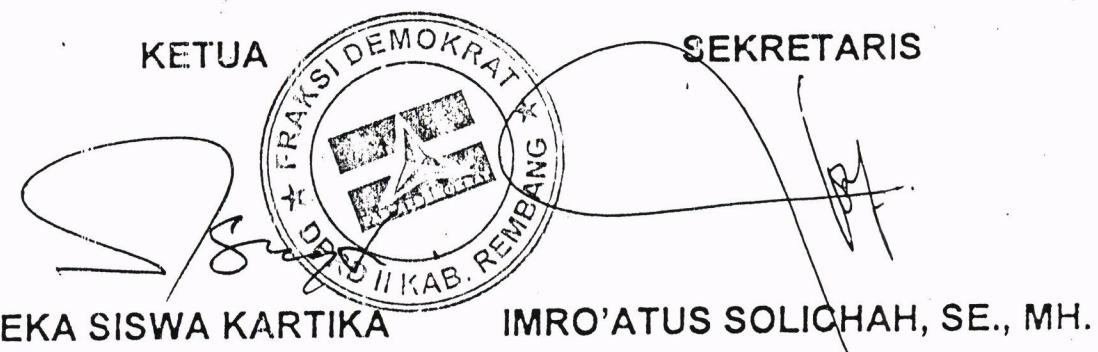
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 17 Juli 2018

FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA

SEKRETARIS





3

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

Pemandangan Umum

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
ATAS**

**RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TA. 2017**

Disampaikan oleh :
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang
Selasa , 17 Juli 2018

Assalamu 'alaikum wb. wb.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang Kami Hormati, segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten

Yang kami Hormati, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang,
beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.

Yang kami hormati para pimpinan kesatuan TNI-POLRI, Pengadilan Negeri dan
Kejaksaan Negeri Rembang

Yang kami Hormati, Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD kabupaten
Rembang beserta jajarannya.

Yang kami hormati Para Pejabat dilingkungan Pemkab. Rembang Serta Para Camat
Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas,
Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali Penyampaian Pemandangan Umum FPKB ini, terlebih Dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat , Taufiq dan Hidayah-nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Sidang paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kab. Rembang *Atas Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017* dalam Keadaan Sehat Wal afiat tanpa suatu halangan apapun, semoga kehadiran kita senantiasa mendapatkan ridho Allah SWT. Amiin

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia

Selanjutnya FPKB mengucapkan terima kasih kepada Bupati yang telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017. Tentu kami, **FPKB** menyetujui apabila Raperda ini segera di bahas melalui mekanisme rapat-rapat berikutnya di DPRD sehingga hasilnya bisa menjadi sarana evaluasi diri bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Rembang, untuk menjadi motivasi peningkatan kualitas kinerja dan hasil kerja pada tahun-tahun yang akan datang.

Hadirin sidang paripurna yang terhormat,

Terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 yang telah disampaikan Saudara Bupati dalam sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 16 Juli 2018, FPKB memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Rembang yang mana berdasarkan angka-angka realisasi dan penjelasan yang tertuang dalam Pengantar Nota Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan APBD TA. 2017 pada umumnya dapat berjalan lancar dan penyerapan anggaran cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya. FPKB berharap semoga capaian ini bisa lebih ditingkatkan dimasa-masa mendatang.

Namun perlu juga kami sampaikan, menurut hemat kami jalannya pemerintahan dan APBD yang baik tidak hanya diukur dari angka-angka realisasi dan penyerapan anggaran saja. Ada banyak asas yang harus diperhatikan dan dipenuhi sebagai

indikator kualitas pelaksanaan APBD seperti : ketertiban, ketaatan pada aturan perundang-undangan, efektifitas, efisiensi, ekonomisasi, transparansi, pertanggungjawaban, keadilan dan lain-lain. Maka dari itu FPKB merasa perlu memberikan catatan-catatan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.

Hadirin sidang paripurna yang terhormat,

Berikut ini catatan-catatan dan masukan yang kami berikan atas Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2017 :

1. FPKB prihatin dengan belum tercapainya target opini WTP pada hasil audit BPK atas LKPD pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2017 masih ada masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu pengelolaan keuangan daerah secara administrasi belum dapat dipertanggungjawabkan sesuai Standart Akuntansi Pemerintah. Maka dari itu, FPKB menekankan kepada Pemkab Rembang agar segera menindak-lanjuti seluruh temuan BPK dengan menjalankan rekomendasi-rekomendasi BPK. Pemkab juga perlu mengambil langkah-langkah strategis dan sistematis untuk mengatasi masalah-masalah yang menjadi pengecualian dalam Opini WDP. Begitu juga dengan masalah aset yang selama ini menjadi salah satu sebab pengecualian dalam opini WDP, kami berharap pemkab mengoptimalkan OPD-OPD terkait agar bekerja secara sinergis untuk Pengendalian Pencatatan Aset Daerah.
2. FPKB menemukan adanya ketidak-konsistenan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2017 antara dokumen LKPJ Bupati 2017 dengan LPP APBD 2017. Jika LPP APBD 2017 audited BPK diperbandingkan dengan laporan keuangan dalam dokumen LKPJ Bupati 2017, terdapat selisih realisasi pendapatan sebesar **Rp.16.660.862.009,96,-** dan realisasi belanja selisih **Rp.49.838.414,78,-**. Hal tersebut disebabkan karena adanya koreksi BPK atas realisasi pendapatan dan belanja, sehingga mempengaruhi besaran silpa tahun berjalan. Karena perbedaan tersebut menunjukkan kurangnya derajat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2017, FPKB berharap hal ini menjadi perhatian pemkab dan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

3. Banyaknya temuan-temuan BPK atas prmasalahan-permasalahan yang mengakibatkan : Kekurangan penerimaan kontribusi Pengelolaan Aset Daerah, Potensi kehilangan pendapatan daerah, terjadinya kelebihan pembayaran, adanya pembayaran yang tidak dapat diyakini kewajarannya, Indikasi kerugian atas kelebihan realisasi Belanja dan lain-lain menunjukkan lemahnya sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi perencanaan maupun kelalaian oleh pejabat teknis dalam melaksanakan penggunaan anggaran. Guna mengantisipasi hal seperti ini terulang maka penyempurnaan sistem akuntansi keuangan mutlak diperlukan. Langkah konkret terhadap penyempurnaan sistem akuntansi keuangan kami harapkan menjadi prioritas pada pelaksanaan APBD berikutnya.
4. Pemberian sanksi tegas atas kelalaian pejabat teknis dalam kegiatan tersebut menurut kami juga diperlukan sebagai peringatan agar tidak ada kelalaian atau bahkan kesengajaan yang dapat menimbulkan potensi kerugian keuangan daerah.
5. Terkait realisasi PAD TA 2017 yang bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp. 59.734.946.872 dari target Rp. 52.840.500.000 atau 113,05%. Menurut pandangan FPKB jika dilihat dari aspek perencanaan ada ketidak-cermatan dalam menentukan target capaian. Asumsi yang digambarkan dalam target berarti masih mentah, terlalu dangkal sehingga realisasinya justru melonjak dari ekspektasi awal. Dari sisi hasil memang bagus karena ada peningkatan PAD yang bersumber dari pajak daerah secara signifikan, tetapi tidak baik bila dilihat dari sisi proses penyusunan perencanaan. FPKB berharap agar dilakukan kajian potensi pajak daerah yang komprehensif sehingga target pendapatan benar-benar diangka yang akurat.
6. Terkait SiLPA tahun anggaran sebesar Rp. **117.161.445.444,40**. FPKB mencermati bahwa SiLPA masih terlalu besar. Dilihat dari aspek perencanaan berarti masih banyak kegiatan yang tertunda bahkan tidak dapat dilaksanakan. Ini berarti target yang sudah ditetapkan tidak terealisasi. Seharusnya perencanaan dan penetapan program kegiatan sudah melalui kajian yang menyeluruh sehingga tidak ada lagi alasan kegiatan tidak bisa dilaksanakan hanya karena persoalan-persoalan teknis seperti gagal lelang, kehabisan waktu, dll.

7. Orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi. Untuk itu FPKB menekankan agar pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan harus didahulukan dan harus ada semangat afirmasi yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Demikian Pandangan Umum FPKB terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017, akhirnya kami ucapan terima kasih atas perhatiannya,

Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq

Wassalamualaikum Wr. Wb

Rembang, 17 Juli 2018

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Ketua
Muhammad Imron



sekretaris


Illyas



FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

C
=

PEMANDANGAN UMUM

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasional Demokrat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Atas Raperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2017

Hari / Tanggal : Selasa / 17 Juli 2018

Dibacakan oleh : :

Assalamu' alaikum Wr, Wb

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Merdeka.....Merdeka.....Merdeka....!!! Salam Restorasi.....

Yang terhormat, Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kab. Rembang

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA)

Kab. Rembang

Yang Terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Semua Kabag di lingkungan Setda Rembang

Yang terhormat, Ka Dinas,Badan , Ka. Kantor dan Camat se- Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang, Kabag beserta jajarannya.

LSNI, Rekan Wartawan, Ormas dan semua pihak yang telah hadir pada hari ini yang karni hormati

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Mulyakan,

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas nikmatnya lah kita pada hari ini dapat menghadiri rapat Paripurna, Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem berpendapat bahwa terkait dengan kesehatan kami berharap ada perbaikan penanganan dan pelayanan secara maksimal terutama di Puskesmas – Puskesmas.

Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem dalam bidang pendidikan yang terkait dengan penerimaan siswa baru di tingkat SMA walaupun sudah menjadi wewenang provinsi setidaknya Pemkab ikut bertanggung jawab utamanya masalah dengan SKTM karen ini menjadi keresahan orang tua siswa

Selanjutnya terkait silpa anggaran TA. 2017 sebesar Rp. 117.161.445.444 masih terlalu besar ,himbauan dari fraksi PDI Perjuangan Nasdem dimasa yang akan datang aspek perencanaan harus lebih baik lagi.

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Mulyakan,

Semoga ini menjadi evaluasi kita bersama dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Rembang ini supaya perencanaan tahun – tahun selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi . ini harapan kita bersama...

Demikian pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Nasdem,Walaupun singkat semoga bermanfaat. Aamiin...

Wabillah: taufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr, Wb,

Merdeka....Merdeka....Merdeka....Salam Restorasi.

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

Ketua



Jasmani

Sekretaris

Ali Ircham,ST



5

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2017



REMBANG, 17 Juli 2018

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

**RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017**

Disampaikan oleh puji santoso
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Selasa 17 Juli 2018

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;

Yang kami hormati Sdr. Para Anggota Forkompimda dan Ketua Pengadilan Negeri

Yang kami hormati Sdr. Para Komandan / Kepala Kesatuan TNI-POLRI

Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah dan Para Pejabat dilingkungan Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Sdr.Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali kalimat pembuka, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada kesempatan yang baik ini, kita dapat melaksanakan rapat paripurna pada hari ini dengan baik dan lancar, semoga apa yang telah kita kerjakan ini menjadikan amal dan ibadah yang bermanfaat. *Amiin Ya Robbal alamiin*

Selanjutnya sholawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rosullullah Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran bagi umat manusia, dan semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Pimpinan Sidang dan Anggota Paripurna yang terhormat;

Sehubungan dengan pembahasan Raperda Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017, Fraksi Gerindra memberikan beberapa catatan-catatan sebagai berikut :

1. Berdasarkan laporan dalam LRA APBD Kabupaten Rembang Tahun 2017 (Audit BPK) bahwa, Realisasi Pendapatan daerah Tahun 2017 sebesar Rp. 1,722 T, sedangkan Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp. 1,457 T sehingga terjadi pergeseran defisit anggaran Daerah. Pada APBD tahun 2017 setelah Perubahan semula di proyeksi Defisit Rp. 205,430 M, tetapi Realisasinya Defisit berkurang, yaitu tinggal Rp. 106,835 M, sedangkan Silpa tahun berjalan dilaporkan sebesar Rp. 117,161 M. Hal menunjukkan bahwa terdapat ketidak konsistenan laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017 antara Dokumen LKPJ Bupati tahun 2017 dengan LPP APBD tahun 2017. Jika LPP APBD Tahun 2017 Audit BPK dibandingkan dengan Laporan keuangan dalam Dokumen LKPJ Bupati Tahun 2017, terdapat selisih Pendapatan sebesar Rp. 16,660 M dan Realisasi Belanja selisih Rp. 49.838.414,78, Hal tersebut disebabkan karena adanya koreksi BPK atas Realisasi pendapatan dan Belanja, sehingga mempengaruhi besarnya Silpa tahun berjalan. Sebagai catatan bahwa pembiayaan Netto dan Silpa Tahun 2017 dalam LKPJ Bupati Tahun 2017 Tidak dilaporkan realisasinya sehingga dalam LKPJ Bupati Tahun 2017 Tidak diketahui berapa silpa Tahun berjalan.

Atas perbedaan pelaporan tersebut diatas, maka kami Fraksi Gerindra memohon Penjelasan!

Menurut kami bahwa perbedaan tersebut menunjukkan kurangnya derajat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2017.

Solusi apa yang harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang ditahun-tahun yang akan datang?

Dari Silpa tersebut, berapa jumlah anggaran yang sudah terikat penggunaannya (Sisa DAK, DBHCHT, Bos dan lain-lain)? Karena informasi ini sangat penting untuk pembahasan APBD Perubahan.

2. Dari informasi dalam Neraca Daerah per tanggal 31 Desember 2017, dapat diketahui bahwa total aset Pemerintah Daerah kabupaten rembang sebesar Rp.1.699 T menurun sebesar Rp.100,065 M (tumbuh minus 5,6%), Bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2016, dimana nilai aset tahun 2016 sebesar Rp. 1,799 T.

Jenis aset Kabupaten Rembang terdiri dari Aset Lancar (Kas, Piutang, Persediaan), Investasi jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan aset lainnya. Kas di Kasda sebesar Rp. 100,720 M, ditempatkan pada rekening giro bank dan di rekening deposito pada beberapa bank seperti Bank Jateng, BRI dan BNI.

Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas penempatan kas di kas daerah tahun 2017 lebih besar pada jenis rekening Deposito dari pada Rekening giro yaitu sebesar Rp.95.000.000.000,- , sementara sisanya sebesar Rp.5.720.810.818,57 berada di rekening giro. Dengan demikian Pemerintah daerah tidak kehilangan potensi pendapatan yang lebih besar dari perbedaan tingkat suku bunga antara deposito dan giro. Namun demikian pemerintah daerah belum menjelaskan secara transparan dalam CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan). Apa alasan pemilihan pada bank tersebut (Bank jateng, BNI, BRI)? Serta apa sistem deposito yang dipilih? Berapa tingkat suku bunga yang telah disepakati pada masing-masing Bank tersebut?

Demikian juga kas di BLUD RSUD R. Soetrasno sebesar Rp. 13.597.048.661,- yang seluruhnya disimpan dalam rekening giro, jika sebagian besar ditempatkan pada deposito dengan sistem ARO , tentunya akan mempunyai manfaat yang lebih besar. Mohon Penjelasan!

3. Saldo piutang daerah mencerminkan hak Pemerintah Daerah yang dinilai dengan uang, dan akan diterima kembali pada periode mendatang. Terdapat saldo penyisihan piutang tidak tertagih (piutang macet) Pemerintah Kabupaten rembang per tanggal 31 Desember 2017, penyisihan piutang pajak bersaldo kredit sebesar Rp. 15,638 M, penyisihan piutang retribusi Rp. 390.830.084,-, penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah Rp. 290,371 M, penyisihan piutang transfer pemerintah pusat – dana perimbangan Rp. 2,850 M, yang meningkat dibanding Tahun 2016. Atas penyisihan berbagai piutang yang cukup besar dan meningkat ditahun sebelumnya, tentu harus dipahami bahwa Pemerintah Daerah tidak kehilangan hak tagih kepada pihak yang bertanggungjawab, untuk itu diperlukan *roadmap* yang jelas dan terukur agar berbagai jenis piutang pendapatan yang telah disisihkan secara administrasi tersebut dapat segera diselesaikan dan dimasukan ke kas daerah. Mohon dijelaskan, mengapa piutang tersebut berpotensi macet? Apa masalah dan hambatannya sehingga berbagai

piutang tersebut tidak tertagih? Bagaimana upaya pemerintah Daerah selama ini dalam penagihan berbagai piutang tersebut?

4. Saldo persediaan per 31 desember 2017 sebesar Rp.17,464 M, merupakan persediaan barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional dan barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan kepada masyarakat yang belum digunakan atau dijual/diserahkan per tanggal 31 Desember 2017. Sesuai dengan SAP penentuan nilai persediaan dilakukan dengan cara *stock opname* (inventarisasi fisik atas nilai persediaan yang masih tersisa disetiap unit pengguna anggaran). Jenis persediaan obat-obatan merupakan jumlah persediaan terbesar, yang nilainya sejumlah Rp. 15,331 M (obat milik Dinas Kesehatan dan RSUD, Dinsos PPKB). Dari jumlah tersebut, berapakah persediaan obat yang kadaluarsa dan yang tidak layak digunakan?
5. Kami juga mengapresiasi realisasi capaian kinerja dari pemerintah daerah kabupaten rembang yang rata-rata mencapai ~~97,64~~^{92,88} persen, tetapi di DPU TR serapannya masih dibawah 90 %, kami mendorong kedepan kegiatan pemeliharaan jalan bisa ditingkatkan, untuk memperbaiki jalan di wilayah Kabupaten Rembang untuk mendukung program jalan mulus tanpa lubang dari Bupati Rembang, karena sampai saat ini masih banyak jalan yang berlubang / rusak.
6. Untuk Mendukung Program *E – Planning* dan *E-Budgeting* kami meminta kepada Kepala Daerah agar Perencanaan Pekerjaan fisik yang ada di semua Dinas bisa dikerjakan pada Tahun-1 (T-1) dan diusahakan pada Anggaran perubahan sudah tersedia anggaran untuk membuat dokumen perencanaan sebuah kegiatan fisik, hal ini sangat penting dilaksanakan agar memudahkan dalam pembahasan Anggarannya bisa Tepat dalam menentukan jumlah Volume pekerjaan dengan Anggarannya, Pekerjaan tersebut bisa langsung dikerjakan di awal tahun tanpa harus menunggu Perencanaan terlebih dahulu sehingga prestasi serapan Anggaran tidak bisa berjalan Normal dan lancar.
7. Kami juga mendorong agar Pemerintah Daerah berusaha secara serius dan sekuat tenaga, agar pengelolaan keuangan Daerah bisa mendapatkan opini WTP dari BPK, dimana penilaian WTP merupakan standarisasi pengelolaan keuangan daerah. Karena sampai saat ini pemerintah Kabupaten Rembang

merupakan satu-satunya Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang Belum sama sekali mendapatkan opini WTP.

Demikian pandangan umum Fraksi Gerindra ini kami sampaikan, Teriring doa dan semangat kerakyatan semoga Raperda ini bisa dibahas dengan penuh tanggung jawab, cermat, hikmad, dan tepat. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu menuntun niat baik ini. Serta membawa hasil yang optimal, berguna, dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Rembang. *Amiin..Amiin..Ya Robbal Alalamiin*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

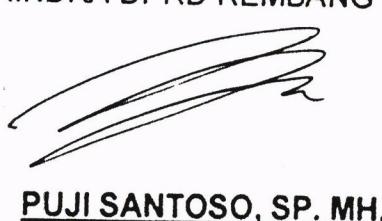
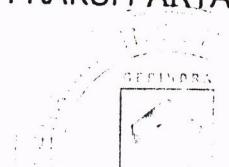
Rembang, 17 Juli 2018

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD REMBANG



H. CHASANUDDIN

Wakil Ketua



PUJI SANTOSO, SP. MH.

Sekretaris

6



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



PEMANDANGAN UMUM FRAKSI KARYA SEJAHTERA DPRD KABUPATEN REMBANG

atas
Rancangan Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Rembang
Hari Selasa, 17 Juli 2018

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Assisten SEKDA dan Kabag di lingkungan SETDA Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Instansi Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Camat, para wartawan dan hadirin yang berbahagia

Dalam mengawali pemandangan umum fraksi kali ini, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, anugerah dan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa hadir dalam suasana yang baik ini.

Saudara Bupati dan para hadirin yang terhormat,

Perkenankanlah kami menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Karya Sejahtera atas RAPERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 yang penuh dengan pertanyaan al,

1. Dari RPJMD, Saudara Bupati menargetkan pada tahun 2018 mendapat opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK namun dalam hasil pemeriksaan BPK tahun ini masih WDP

(wajar dengan pengecualian), hal ini sebagai indikator pengelolaan keuangan pemerintah daerah belum bisa menjamin pertanggung-jawaban sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Mohon penjelasan

2. Terdapat in-konsisten antara laporan realisasi anggaran LKPJ 2017 dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017. Jika dalam laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD 2017 audit BPK diperbandingkan dengan laporan keuangan LKPJ bupati 2017 terdapat selisih pendapatan sebesar Rp 16.660.852.009,96 dan realisasi belanja selisih Rp 49.838,414,78. Hal tsb disebabkan oleh adanya koreksi BPK atas realisasi pendapatan dan belanja sehingga mempengaruhi besaran SILPA tahun anggaran berjalan. Sebagai catatan pembiayaan netto dan SILPA th 2017 dalam LKPJ Bupati 2017 tidak dilaporkan realisasinya sehingga dalam LKPJ Bupati 2017 tidak diketahui SILPA tahun berjalan.

Mohon penjelasan.

3. Dalam penjelasan CALK (catatan atas laporan keuangan) tidak menyajikan informasi besaran SILPA tahun berjalan berdasarkan sumbernya sehingga menimbulkan penafsiran yang keliru bagi siapapun yang membaca.

Mohon penjelasan.

4. Pemkab Rembang belum dapat menghitung dan menyajikan nilai piutang denda pajak dan retribusi daerah dalam laporan keuangan pemerintah daerah sehingga nilai piutang tidak dapat diyakini.

Mohon penjelasan

5. Investasi non permanen belum disajikan berdasarkan prinsip net realizable value (nilai kenyataan bersih) yang berdampak nilai investasi non permanen tidak diyakini kewajarannya.
Mohon penjelasan.
6. Pengendalian pengelolaan aset tetap, belum memadai terkait dengan penilaian, pencatatan dan kapitalisasi, sehingga saldo aset tetap sebesar Rp 492,899 miliar dan akumulasi penyusutan Rp 1,06 trilyun serta beban penyusutan Rp 81,46 miliar tidak diyakini kewajarannya.
Mohon penjelasan.
7. Dari resume LHP BPK ditemukan adanya ketidak patuhan dan kecurangan terhadap peraturan perundangan. BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan terkait dengan sistem pengendalian internal dan operasinya. Kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang yang ditemukan BPK antara lain sbb.
 - 1)Terdapat “kekurangan volume pekerjaan” pada belanja modal senilai Rp 1.921.652.407,- sehingga beberapa OPD harus mengembalikan “kelebihan pembayaran” sejumlah uang tsb. ke Kas Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa:
 - a. Kepala OPD selaku pengguna anggaran tidak sepenuhnya melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak optimal dalam pengendalian pekerjaan
 - c. Pengawas / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tidak cermat dalam pengawasan pekerjaan.

2) Pertanggung-jawaban belanja barang berupa belanja makanan dan minuman, belanja ATK dan belanja penggandaan pada beberapa OPD sebesar Rp 463.880.455,- “tidak sesuai dengan ketentuan”.

3) Prosedur pengadaan pakaian batik untuk pegawai yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga mengakibatkan “kelebihan pembayaran” minimal sebesar Rp 615.398.305,- dan potensi kerugian negara atas pakaian batik yang belum jelas senilai Rp 25.245.030,- lebih lanjut Pemkab Rembang tidak bisa memanfaatkan pakaian batik yang sudah diterima tadi.

Disamping itu masih banyak temuan BPK yang lain, mohon penjelasan.

8. Investasi non permanen pada Dinas Indagkop UMKM senilai Rp 3.221.157.177,-. Nilai tsb merupakan piutang UKM (sisa pokok pinjaman) tahun 2001 - 2007, namun sampai hari ini belum ada penyelesaian.

Mohon penjelasan

9. Sesuai SAP (standar akuntansi pemerintah), stock opname (inventarisasi fisik) atas nilai persediaan yang masih tersisa di setiap unit penggunaan anggaran, persediaan obat-obatan di Dinas Kesehatan, RSUD dan Dinsos PP & KB sebesar Rp 15.331.895.551,- mohon penjelasan berapa persediaan obat yang kedaluwarsa dan yang tidak layak digunakan.

Mohon penjelasan

Itulah pemandangan umum Fraksi Karya Sejahtera terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang kemudian akan

dibahas dalam rapat-rapat komisi bersama OPD (organisasi perangkat daerah) Kabupaten Rembang.

Hadirin yang terhormat,

Menutup pemandangan umum ini kami ingin mengutip piweling pujangga besar R. Ng. Ronggowsito yang kiranya masih relevan dengan situasi saat ini, sbb.

“Amenangi jaman edan, ewuh aya ing pambudi.

Melu edan ora tahan, yen tan melu anglakoni.

Beja bejane kang lali, luwih beja kang eling lan waspada”.

Bahasa Indonesia: “Hidup didalam jaman gila, memang serba repot. Akan mengikuti tidak sampai hati, walau tidak mengikuti tetap mengalami. Bagaimanapun juga walaupun orang yang lupa itu beruntung, namun masih lebih beruntung bagi orang yang senantiasa ingat dan waspada”.

Demikian, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga kita senantiasa diberi ridho dan kekuatan untuk membangun Kabupaten Rembang tercinta. Amien.

Rahayu ingkang sami pinanggih, wassalamu'alaikum wr.wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Ketua,

H. ISMARI, SH

Sekretaris,

H. JOKO SUPRIHADI, S.H.



7



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI HARAPAN
DPRD KABUPATEN REMBANG**

atas
Rancangan Peraturan Daerah
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Rembang
Hari Selasa, tgl 17 Juli 2018

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Assisten SEKDA dan Kabag di lingkungan SETDA Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Instansi Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati sdr. Camat, para wartawan dan undangan yang berbahagia.

Mengawali pemandangan umum fraksi kali ini, marilah memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, anugerah dan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa hadir dalam suasana yang baik ini.

Pimpinan sidang, saudara Bupati dan para hadirin yang terhormat,

Setelah kemarin mendengarkan penjelasan Saudara Bupati tentang Laporan Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD TA 2017, kami akan menyampaikan pemandangan umum sbb.

Secara umum pelaksanaan APBD 2017 telah berjalan dengan baik dan kami sangat berterima kasih kepada semua

pihak dan seluruh elemen masyarakat, jajaran pemerintahan, eksekutif maupun legislatif serta masyarakat umum yang telah bekerja sama untuk mewujudkan hal ini.

Dari sisi pendapatan nyaris memenuhi harapan, target penerimaan Rp. 1.763.792.031.109,- (*satu trilyun, tujuh ratus enam puluh tiga milyar, tujuh ratus sembilan puluh dua juta, tiga puluh satu ribu, seratus sembilan rupiah*) tercapai realisasi sebesar Rp.1.722.252.909.030,- (*satu trilyun, tujuh ratus dua puluh dua milyar, dua ratus lima puluh dua juta, sembilan ratus sembilan ribu, tiga puluh rupiah*) atau 97,64 %. Harapan kami pada tahun ini bisa melampaui target pendapatan, terutama dari pendapatan asli daerah. Untuk itu, kami sangat mendukung upaya BPPKAD maupun SKPD yang lain untuk meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah, dengan tetap mengedepankan rasa keadilan masyarakat.

Dari sisi belanja daerah, target Rp 1.969.222.098.819,- (*satu trilyun, sembilan ratus enam puluh sembilan milyar, dua ratus dua puluh dua juta, sembilan puluh delapan ribu, delapan ratus sembilan belas rupiah*) terrealisasi sebesar Rp 1.829.088.241.098,- (*satu trilyun, delapan ratus dua puluh sembilan milyar, delapan puluh delapan juta, dua ratus empat puluh satu ribu, sembilan puluh delapan rupiah*) atau 92,88 %. Kami memandang, penyerapan anggaran yang dilakukan oleh SKPD-SKPD telah dilakukan secara optimal namun belum diimbangi dengan optimalnya kinerja dan kualitas hasil kerjanya. Kami minta Saudara Bupati memperhatikan dan mengindahkah Laporan Hasil Pemeriksaan

BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang th 2017.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Dalam keberhasilan pembangunan, salah satu unsur yang penting adalah unsur pengawasan dan evaluasi. Jika pembangunan telah selesai dilaksanakan, namun tidak disertai dengan adanya pengawasan dan evaluasi, maka yang terjadi adalah pemborosan. Pada hemat kami ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam hal membangun; yakni bisa difungsikan, kwalitasnya bagus dan terjamin pemeliharaannya.

Demikianlah pemandangan umum Fraksi Harapan, selanjutnya Raperda ini akan dibahas antara komisi-komisi DPRD bersama SKPD dan antara Badan Anggaran dengan TAPD. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga kita senantiasa diberi ridho dan kekuatan untuk membangun Kabupaten Rembang tercinta. Amien.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI HARAPAN

Ketua,
SUKARMA'IN

Sekretaris,
SAHNINGSIH, SE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'SUKARMA'IN', is enclosed within a large, roughly drawn oval. A diagonal line is drawn through the oval and the signature.

111

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG

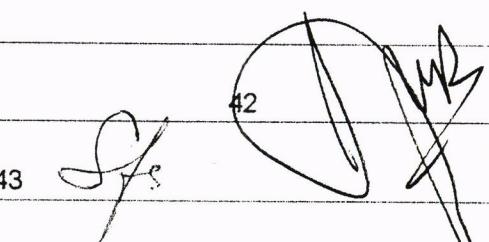
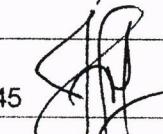
**ACARA : JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP RAPERDA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2017**

HARI/TANGGAL : SABTU, 21 JULI 2018

PUKUL : 10.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	Omroh
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	Rahay
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota	7	hy-
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, S.E	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, M.H.	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICAH, S.E, M.H.	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	M
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, S.E.	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	18	

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
2	3	4	5
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
19 M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20 MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21 ILYAS	Anggota	21	
22 SHOLEH, B.A	Anggota	22	
23 MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi.	Anggota	23	
24 Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	24	
FRAKSI PDIPERJUANGAN NASDEM			
25 SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25	
26 JASMANI	Anggota	26	
27 WIDODO	Anggota	27	
28 ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28	
29 NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29	
30 DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30	
31 FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32 MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spi.	Anggota	32	
FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33 HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33	
34 H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35 PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35	
36 H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36	
37 AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38 H. ISMARI, S.H.	Anggota	38	
39 GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39	
40 H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40	
41 ICATUR WINANTO, S.H	Anggota		

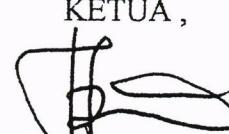
N A M A		J A B A T A N	T A N D A T A N G A N	K E T
2	3	4	5	
	FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota		
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43	 42
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota		44
45	NUR JANNAH	Anggota	45	

Keterangan :

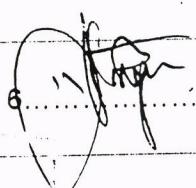
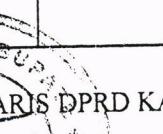
- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

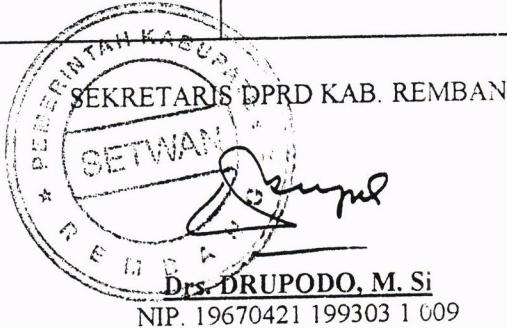
DPRD KABUPATEN REMBANG

KETUA ,


H. MAJID KAMIL, MZ

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG
ACARA : JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP RAPERDA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2017
HARI/TANGGAL : SABTU, 21 JULI 2018
PUKUL : 10.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3		Kejaksaan Negeri Rembang	3.
4		Pengadilan Negeri Rembang	4.
5	<i>Rasixyono</i>	Dandim 0720 Rembang/.....	5. 
6	<i>MARTOTO, S.P.</i>	Ka. Kepolisian Resort Rembang/.....	6. 
7		Pengadilan Agama Kab. Rembang	7. 
8	Drs. SUBAKTI	Sekretaris Daerah	8. 



DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG

**MA : JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP RAPERDA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2017**

HARI/TANGGAL : SABTU, 21 JULI 2018

PUKUL : 10.00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	1
2	CAMAT KALIORI	MUSTHOCH	2
3	CAMAT SUMBER	3
4	CAMAT SULANG	4
5	CAMAT BULU	5
6	CAMAT PAMOTAN	Sukasih	6
7	CAMAT GUNEM	Sukheru	7
8	CAMAT SALE	8
9	CAMAT LASEM	9
10	CAMAT PANCUR	10
11	CAMAT SEDAN	11
12	CAMAT SLUKE	12
13	CAMAT KRAGAN	13
14	CAMAT SARANG	14



Drs. DRUPODO, M. Si
NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG

ACARA : JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP RAPERDA

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2017

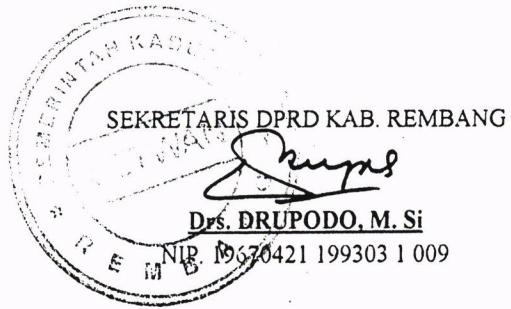
HARI/TANGGAL : SABTU, 21 JULI 2018

PUKUL : 10.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI	Hari Susanto		4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN			8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	Kukuh	Kabag.	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Aqiqah H	Sdya up	11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Lati H	Kan	13
14	BAG. UMUM	Gachanta		14
15	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN	Sri Leti H	Ka sub bag RLPP	15
16	BPPKAD	Melati		16
17	INSPEKTORAT			17
18	BAPPEDA	Ali Sanid	Kabid IPW	18
19	DINPERMADES	Fitri	Kabid	19
20	BKD			20
21	DINAS PMPTSP dan TENAGA KERJA	Anjuk	Seb	21
22	B P B D			22
23	DPU TATA RUANG	Suci Haryati	Kabid	23
24	DINPERKIM	Jazchennarni	Ka. DPKP	24
25	DINAS KESEHATAN	AL Furqan	As. Kedua	25
26	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	Budiyono	sekda	26
27	DINAS INDAGKOP & UMKM	Ahsanah	Kabid	27
28	DINTANPAN	Sarotwin	Kabid	28
29	DINLUTKAN	Sugihartoan		29
30	DISKOMINFO			30
31	DINAS PERHUBUNGAN	Suryana	Kabid	31
32	DINAS DUKCAPIL			32
33	DINSOSIAL P2 KB			33
34	DINBUDPAR	Kartono.	Shadi	34
35	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			35
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS			36
37	DINAS PERPUSTAKAAN & ARSIP	H. Rusli	Wadan	37
38	RSUD dr. R. SUTRASNO	Supriyo	Kabid Baug Info	38
39	SATPOL PP	WALUYO	Kasat	39

NAMA/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
2	3	4	5
K KAB. REMBANG			40
41 P D A M			41
42 PERCETAKAN DAERAH	P. Sihombing	Ka. Unit	42
43 PD. BANK PASAR			43
44 BANK JATENG CAB. REMBANG			44
45 BRI CAB. REMBANG			45
46 PD. BPR BKK LASEM			46
47 PT. R B S .I			47
48 APOTIK DAERAH			48
49 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA			49
50 DIPENDA PROPINSI			50
51 BPS KAB. REMBANG			51
52 RUMAH TAHANAN			52
53 PERHUTANI KPH MANTINGAN			53
54 PERHUTANI KPH KEBONHARJO			54
55 KANTOR PERHUTANI SPH IV			55
56 KANTOR POS DAN GIRO			56
57 TEL KOM REMBANG			57
58 PLN CAB. REMBANG			58
59 BAWASLU KAB. REMBANG			59
60 B P N KAB. REMBANG			60
61 KANTOR PAJAK			61
62 UP3AD (ASSET DAERAH)			62
63 KANTOR PELABUHAN			63
64 KETUA KPU KAB. REMBANG	Sekretaris	Sekretaris	64
65 SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			65
66 PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			66
67 BTN KCP. REMBANG			67
68 PERUM PEGADAIAN			68
69 BSM.BANK DANAMON			69
70 DHARMA WANITA PERSATUAN			70
71 GERAKAN PRAMUKA			71
72 PMI CAB. REMBANG			72
73 STIE. YPPI REMBANG			73
74 DPC PPP			74
75 DPC PARTAI DEMOKRAT			75
76 DPD PARTAI GOLKAR			76
77 DPD PAN			77
78 DPC PARTAI HANURA			78
79 DPC PKS			79
80 DPC PARTAI NASDEM			80
81 DPC PARTAI GERINDRA			81
82 DPC PKB			82

2	3	4	5
83 PDI PERJUANGAN			83
84 SUARA MERDEKA			84
85 CAKRA TV			85
86 RADIO CBFM	Masudi	Reporter	86
87 RADIO R2B			87
88 MAJALAH BANGKIT			88
89 PATI EKSPRESS			89
90 RADIO MATA AIR			90
91 MIMBAR RAKYAT			91
92 CARAKA CANDI			92
93 KEDAUULATAN RAKYAT			93
94 BPKAD	Sri Murnanti	Kabid	94
95 Tumai	Kartini Sulis	Ka Sub Dpt	95
96	Azwan	Anggota	96
97 Power	Marguni	Anggota	97
98			98
99			99
100			100





JAWABAN BUPATI REMBANG
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN
REMBANG
TERHADAP RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
KABUPATEN REMBANG



JAWABAN BUPATI REMBANG

ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

**Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera untuk kita semua.**

Yang terhormat, Sdr Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD;

Yang saya hormati, Rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Staff Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati, Sdr. Pimpinan Organisasi Profesi, LSM dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali jawaban kami atas pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017, terlebih dulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga kita masih diberikan nikmat kesehatan, kebahagiaan yang tak kurang suatu apapun sehingga kita dapat hadir dalam acara ini.

Sebelumnya kami sampaikan terima kasih atas masukan, saran dan koreksinya atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, selanjutnya berkenaan dengan pertanyaan, saran, pendapat dan catatan yang disampaikan dalam pemandangan umum fraksi-fraksi di Kabupaten Rembang dapat kami jelaskan sebagai berikut:

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1. FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN		
1.	<p>Tentang belum tercapainya target opini WTP atas hasil Audit BPK terhadap LKPD Pemkab Rembang TA 2017 dimana masih ada masalah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah secara administrasi belum dapat dipertanggungjawabkan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan juga terkait masalah aset yang selama ini menjadi pengecualian dalam opini WDP.</p> <p>(<i>Sekaligus menjawab pertanyaan Fraksi Demokrat, Fraksi Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Karya Sejahtera dan Fraksi Kebangkitan Bangsa</i>)</p>	<p>Terima kasih atas dukungannya terhadap upaya pencapaian Pemerintah Kabupaten Rembang untuk mendapatkan opini WTP dari BPK RI, Kami senantiasa melakukan perbaikan-perbaikan administrasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku dan menindaklanjuti hasil temuan BPK sesuai dengan yang sudah direkomendasikan. Kami bersama seluruh pimpinan OPD terus berupaya menyelesaikan pengelolaan asset di masing-masing OPD, sehingga InsyaAllah ke depan opini WTP dapat diperoleh.</p>
2.	<p>Adanya ketidakkonsistensi dalam penyusunan dokumen LPPD/LKPJ dengan LKPD Tahun Anggaran 2017 yaitu terdapat selisih pendapatan sebesar Rp.16.660.862.010,00 dan realisasi belanja sebesar Rp.49.838.415,00</p> <p>(<i>sekaligus menjawab pertanyaan fraksi Kebangkitan Bangsa, fraksi Karya Sejahtera, fraksi gerakan Indonesia raya</i>)</p>	<p>Bahwa perbedaan nilai antara LPPD/LKPJ 2017 dan LKPD <i>audited</i> 2017 karena</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan dalam Pasal 69 dan 70, LPPD/LKPJ disampaikan kepada Gubernur/DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sementara berdasarkan Pasal 320 LKPD disampaikan kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir yang telah diperiksa (audit) BPK.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN																											
		<p>2. Selisih nilai pendapatan sebesar Rp16.660.862.010,00 adalah nilai pendapatan BLUD RSUD sebesar Rp17.729.980.680,00 yang semula dalam LPPD/LKPJ tercatat pada rekening Pendapatan pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, sedangkan pada LKPD 2017 oleh BPK dikoreksi/direklasifikasi pencatatannya dalam rekening penerimaan pembiayaan BLUD. Dan juga terdapat koreksi BPK terkait nilai BOS sebesar Rp1.069.118.670,00 dicatat dalam lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.</p> <p>3. Sedangkan selisih nilai belanja sebesar Rp 49.838.415,00 adalah koreksi BPK atas pencatatan nilai BOS di Dindikpora atas perubahan jumlah siswa di satuan pendidikan yang harus disetor ke Kas Negara yang sebelumnya sudah disampaikan dalam LPPD/LKPJ.</p>																											
3.	<p>Terkait SILPA yang terlalu besar pada tahun anggaran 2017 diharapkan di masa yang akan datang aspek perencanaannya harus lebih baik lagi.</p> <p>(Sekaligus menjawab pertanyaan Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan-Nasional Demokrat, Fraksi Karya Sejahtera dan Fraksi Gerakan Indonesia Raya)</p>	<p>Akan kami perhatikan. Dan dapat kami jelaskan bahwa terkait SILPA tersebut di atas merupakan penghematan belanja dan pelampauan pencitraan sebagai berikut:</p> <table> <tbody> <tr> <td>1. Pelampauan pendapatan</td> <td>:</td> <td>9.838.535.928,00</td> </tr> <tr> <td>2. Penghematan belanja Jumlah</td> <td>:</td> <td>90.882.274.890,57</td> </tr> <tr> <td>3. Kas di Bendahara Penerimaan</td> <td>:</td> <td>100.720.810.818,57</td> </tr> <tr> <td>4. Kas di Bendahara Pengeluaran</td> <td>:</td> <td>18.958.162,00</td> </tr> <tr> <td>5. Kas di BLUD RSU</td> <td>:</td> <td>80.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>6. Kas di BLUD Puskesmas</td> <td>:</td> <td>1.107.793.063,25</td> </tr> <tr> <td>7. Kas BOS DIKNAS 2017</td> <td>:</td> <td>12.489.255.598,58</td> </tr> <tr> <td>8. SILPA 2017</td> <td>:</td> <td>2.744.627.802,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>:</td> <td>117.161.445.444,40</td> </tr> </tbody> </table>	1. Pelampauan pendapatan	:	9.838.535.928,00	2. Penghematan belanja Jumlah	:	90.882.274.890,57	3. Kas di Bendahara Penerimaan	:	100.720.810.818,57	4. Kas di Bendahara Pengeluaran	:	18.958.162,00	5. Kas di BLUD RSU	:	80.000.000,00	6. Kas di BLUD Puskesmas	:	1.107.793.063,25	7. Kas BOS DIKNAS 2017	:	12.489.255.598,58	8. SILPA 2017	:	2.744.627.802,00		:	117.161.445.444,40
1. Pelampauan pendapatan	:	9.838.535.928,00																											
2. Penghematan belanja Jumlah	:	90.882.274.890,57																											
3. Kas di Bendahara Penerimaan	:	100.720.810.818,57																											
4. Kas di Bendahara Pengeluaran	:	18.958.162,00																											
5. Kas di BLUD RSU	:	80.000.000,00																											
6. Kas di BLUD Puskesmas	:	1.107.793.063,25																											
7. Kas BOS DIKNAS 2017	:	12.489.255.598,58																											
8. SILPA 2017	:	2.744.627.802,00																											
	:	117.161.445.444,40																											

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
4.	Dasar pemilihan bank dalam penyimpanan kas daerah pada Bank Jateng, BRI, BNI serta berapa tingkat suku bunga yang disepakati di masing-masing bank tersebut (<i>sekaligus menjawab fraksi Gerakan Indonesia Raya</i>)	<p>1. Dasar pemilihan Bank dimaksud sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/ Walikota menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan/atau Bank Sentral untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah.</p> <p>2. Sistem Deposito yang digunakan adalah berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Bupati Rembang dengan Bank Umum yang berisi tentang Penempatan Investasi deposito Pemerintah Kabupaten Rembang.</p> <p>3. Terkait dengan tingkat suku bunga, besaran suku bunga dimaksud sesuai dengan counter rate yang berlaku pada masing-masing Bank Umum.</p>
5.	Mohon penjelasan apakah stock obat-obatan dilakukan stock opname untuk evaluasi persediaan obat yang masih dapat digunakan atau sudah kadaluwarsa di DKK, RSUD R. Soetrasno, DINSOSPPKB (<i>sekaligus menjawab fraksi Gerakan Indonesia Raya, fraksi Karya Sejahtera</i>)	<p>1. Dinas Kesehatan setiap bulan minggu terakhir melakukan stok opname. Nilai persediaan 31 Desember 2017 merupakan obat dan perbekalan kesehatan yang sudah dipisahkan dari obat kadaluwarsa. Data persediaan farmasi yang berubah keadaan/kadaluwarsa tahun 2017 sebesar Rp.116.281.982,00 (1,33% dari stok ketersediaan Dinas Kesehatan)</p>

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
		<p>2. Sesuai dengan Permenkes No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, maka RSUD dr. R. Soetrasno Rembang telah melakukan stock opname persediaan farmasi, Alat kesehatan dan bahan medis habis pakai tiap bulan sekali di akhir bulan dengan menggunakan sistem komputer dan manual. Total obat kadaluwarsa per tahun 2017 sebesar Rp. 5.797.862,00.</p> <p>3. Untuk persediaan obat di DINSOSPPKB tidak ada (Nihil).</p>
6.	<p>Berkaitan dengan piutang pendapatan di Kabupaten Rembang per 31 Desember 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Mengapa piutang tersebut berpotensi macet? ➢ Masalah dan hambatan sehingga piutang tersebut tidak tertagih? ➢ Upaya pemerintah daerah dalam melakukan penagihan piutang. <p>(sekaligus menjawab fraksi Gerakan Indonesia Raya)</p>	<p>Bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang senantiasa melakukan upaya-upaya penagihan terhadap Piutang Pendapatan yang ada di Kabupaten Rembang.</p> <p>Untuk Piutang PBB-P2 telah dilakukan penelusuran dan verifikasi hasil pelimpahan Pemerintah Pusat melalui KPP Pratama Pati.</p> <p>Namun demikian masih terdapat kendala-kendala sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak/Wajib Retribusi sudah tidak operasional dan tidak jelas alamatnya; 2. Pengalihan pemilik kios karena pindah atau meninggal; 3. Turunnya pendapatan pedagang.
	<p>2. PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT</p> <p>1. Tentang Hibah Bansos agar secepatnya direalisasikan dan dilaksanakan, karena masyarakat sudah menunggu dan membutuhkannya.</p>	<p>Bahwa ketentuan pelaksanaan Hibah dan Bansos sudah diatur dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018.</p> <p>Sehingga ketika tahapan dalam peraturan tersebut telah dilaksanakan maka pencairan Hibah dan Bansos akan direalisasikan.</p>

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
3. FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA		
1.	Langkah konkret Pemerintah Kabupaten terhadap penyempurnaan sistem akuntansi keuangan.	Pemerintah Kabupaten Rembang telah menyusun Sistem dan Produk Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017).
2.	Pemerintah Kabupaten Rembang agar memberikan sanksi terhadap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagai peringatan agar tidak terjadi lagi kelalaian yang dapat merugikan kcuangan daerah. <i>(sekaligus menjawab fraksi Harapan)</i>	Prinsipnya Pemerintah Daerah sependapat, bahwa Fungsi Pengawasan harus ditegakkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No 60 Tahun 2008 tentang SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), dimana Pemerintah Kabupaten Rembang sudah membuat Peraturan Bupati tentang SPIP. Dimana setiap OPD harus membentuk satgas SPIP di unit kerjanya masing-masing dengan tujuan agar proses intergrasi pada setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk bisa memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.
3.	Agar dilakukan kajian Potensi Pajak Daerah yang Komprehensif sehingga Target Pendapatan benar-benar di angka yang akurat.	Terhadap capaian pajak daerah yang melebihi target pendapatan dapat kami jelaskan bahwa angka tersebut bukan berarti kurang cermatnya perencanaan namun meningkatnya <i>omzet</i> atau usaha wajib pajak yang disertai dengan adanya kesadaran dari wajib pajak terhadap kewajibannya disamping gigihnya penagihan yang dilakukan di lapangan.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
4. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN - NASIONAL DEMOKRAT		
1.	Tentang kesehatan diharapkan ada perbaikan penanggangan dan pelayanan secara maksimal terutama di puskesmas-puskesmas	<p>Kami sudah melakukan perbaikan salah satunya dengan mengakreditasi puskesmas. Dimana salah satu indikator penilaianya adalah dalam hal pelayanan. Selain itu Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang juga melaksanakan monitoring Akreditasi 2 (dua) kali dalam setahun sesuai Juknis Akreditasi Puskesmas. Perlu kami sampaikan bahwa dari 17 UPT Puskesmas di Kabupaten Rembang, 16 UPT Puskesmas sudah terakreditasi kecuali UPT Puskesmas Sarang 2 dan akhirnya di tahun 2018 ini UPT Puskesmas Sarang 2 sudah mendapatkan nomor registrasi puskesmas dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk selanjutnya segera akan kami lakukan pengajuan menjadi Puskesmas BLUD dan pengajuan akreditasi.</p>
2.	Tentang penerimaan siswa baru di tingkat SMA, dengan menggunakan SKTM.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa penerimaan siswa baru ditingkat SMA bukan menjadi kewenangan Pemkab. Rembang akan tetapi menjadi kewenangan Pemprov. 2. Kami berikan apresiasi kepada SMA yang telah melakukan verifikasi terhadap SKTM. 3. Kedepan Kami mengimbau kepada SMA untuk melakukan koordinasi dengan kepala desa terkait penerbitan SKTM.

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
5. FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA		
1.	Mengapa Kas di BLUD RSUD R. Soetrasno sebesar Rp.13.597.048.661,00 disimpan dalam rekening giro, bukan di deposito?	<p>Kas BLUD sebesar Rp. 13.597.048.661,- adalah Kas yang tercatat pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ BLUD RSUD dr.R. Soetrasno sebesar Rp. 1.107.793.063,25; ➤ BLUD Puskesmas sebesar Rp. 12.489.255.598.58. <p>Sisa Kas BLUD RSUD dr. R. Soetrasno saat ini tidak ditempatkan pada rekening deposito dan masih ditempatkan pada rekening tabungan dengan pertimbangan bahwa sisa kas tersebut merupakan adanya penambahan pendapatan yang di peroleh dari BPJS dibulan Desember 2017, yang dipergunakan untuk pembayaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa pada awal bulan januari 2018.</p>
2.	Capaian kinerja DPUTARU Yang Masih Dibawah 90%	Terimakasih atas dorongannya dan ke depan Kami mendukung program jalan mulus tanpa lubang agar segera terwujud.
3.	Untuk mendukung Program E-Planing dan E-Budgeting kami minta agar perencanaan pekerjaan fisik yang ada di OPD bisa dikerjakan pada Tahun T-1	Menanggapi permintaan tentang pelaksanaan perencanaan pekerjaan fisik di seluruh OPD pada tahun T-1, pada prinsipnya Pemerintah Daerah sepakat atas usulan tersebut. Sebagai tindak lanjutnya akan dirumuskan lebih teknis kemungkinan pelaksanaan serta alokasi anggaran pada Anggaran Perubahan, bersamaan dengan pembahasan rumusan program dan kegiatan Perubahan RKPD. Secara simultan juga akan dilakukan sosialisasi kepada seluruh OPD yang mempunyai pekerjaan fisik untuk mempersiapkan kemungkinan penganggaran penyusunan dokumen perencanaan pekerjaan fisik pada tahun T-1 ke dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

6. FRAKSI KARYA SEJAHTERA

1.	Pemkab Rembang yang belum dapat menghitung dan menyajikan nilai Piutang Denda Pajak dan Retribusi Daerah dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah sehingga nilai Piutang tidak diyakini.	Terhadap piutang denda pajak Kami sudah sajikan di laporan keuangan namun belum Kami jelaskan secara detail dalam CaLK.
2.	Tentang Investasi Non Permanen yang masih disajikan sebesar Rp.3.221.157.177,00 dan belum dihitung berdasarkan prinsip <i>Net Realizable Value</i> (Nilai Kenyataan Bersih) yang berdampak Nilai Investasi Non Permanen tidak diyakini kebenarannya.	Pemerintah Kabupaten Rembang telah melakukan tindak lanjut dengan melakukan koordinasi dengan Bank Channeling untuk melakukan verifikasi data LP UMKM untuk menyajikan Nilai Investasi Non Permanen berdasarkan <i>Net Realizable Value</i> .
3.	Tentang pengendalian pengelolaan aset tetap yang belum memadai sehingga nilai aset tetap dan akumulasi penyusutan serta beban penyusutan tidak diyakini kewajarannya.	Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Rembang akan melakukan hal – hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi faktual Aset Tetap Lainnya yang ditempati, dikuasai dan dimiliki oleh OPD. 2. Rekonsiliasi hasil inventarisasi Aset Tetap Lainnya 3. Menentukan metode yang paling efektif dalam penghitungan penyusutan.
4.	Adanya temuan BPK berkaitan ketidakpatuhan dan kecurangan terhadap peraturan perundangan	Terhadap temuan yang bersifat material telah dilakukan penyebaran ke Kas Daerah, dan selanjutnya akan diselesaikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

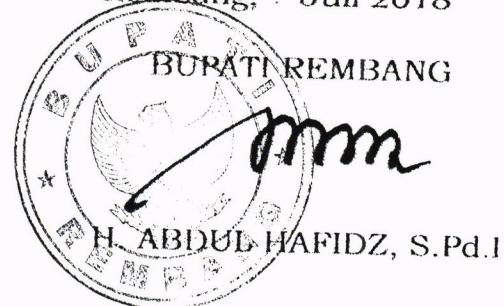
Rapat Dewan dan Hadirin yang saya hormati,

Demikian yang dapat Kami jelaskan atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Raperda Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017. Untuk selanjutnya terhadap hal-hal yang masih membutuhkan penjelasan secara teknis saya mempersilahkan untuk dibahas dan diperdalam dalam pembahasan komisi-komisi.

Akhirnya tidak lupa saya sampaikan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita sekalian.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, . Juli 2018





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (IV) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG

RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

Hari : Selasa
Tanggal : 31 Juli 2016
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
II. SIFAT RAPAT : Terbuka
III. ACARA RAPAT:

1. Pembukaan;
2. Laporan Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017;
3. Pendapat Fraksi terhadap hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017;
4. Persetujuan Penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017;

5. Penandatanganan Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang dilanjutkan Penyerahan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Raperda;
6. Penyampaian Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017;
7. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : **H. GUNASIH, S.E.**
2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : **Drs. DRUPODO, M.Si.**
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
<hr/> Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan : 8 orang
2. Fraksi Demokrat : 6 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa : 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : 6 orang

5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	: 32 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
2. Fraksi Demokrat	: 2 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 2 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: 2 orang
Jumlah	: 13 orang

IX. JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : H. GUNASIH, S.E.

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati

- Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda beserta Kepala Bagian dilingkungan Setda Kabupaten Rembang;
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Rembang;

- Camat Se Kabupaten Rembang;
- Serta para undangan dan hadirin yang berbahagia.

Segala puja dan puji serta syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini Selasa tanggal 31 Juli 2018 kita dapat hadir di Ruang Rapat Paripurna DPRD untuk mengikuti rapat paripurna terakhir, Rapat Paripurna Keempat dalam rangka membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia

Sebelum berlanjut pada acara pokok, perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 27 Juli 2018 kemarin, diperingati hari jadi Kabupaten Rembang yang ke 277. Untuk itu, kami segenap pimpinan dan anggota DPRD, mengucapkan Selamat Hari Jadi Ke-277 Kabupaten Rembang, serta memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Rembang atas penyelenggaraan serangkaian acara dalam menyambut peringatan hari Jadi Kabupaten Rembang Ke 277 dimaksud. Kami mengajak, marilah momentum hari jadi ini, kita jadikan pendorong semangat dalam meningkatkan kinerja, pendorong semangat kerjasama, untuk bahu membahu dalam membangun Kabupaten Rembang yang kita cintai. Pada hakekatnya Bupati dan DPRD berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah loro-lorong atunggal. Bupati dan DPRD seperti sepasang sepatu. Gerak dan bentuknya tidak sama namun satu tujuan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang. Tidak pernah ganti posisi namun saling melengkapi, selalu sederajat tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi, dan bila satu hilang yang lain tidak memiliki arti. Dengan posisi yang demikian semoga nantinya Kabupaten Rembang menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Aamiin ya robbal' alamin.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Kita kembali ke acara pokok.

Ketentuan kuorum dalam Rapat Paripurna Keempat ini, adalah sama dengan ketentuan kuorum yang berlaku pada Rapat Paripurna sebelumnya, baik Rapat Paripurna Pertama, Kedua, maupun Ketiga dalam rangka membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017, yakni dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.

Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari sejumlah anggota DPRD sebanyak 44 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangi daftar hadir adalah sebanyak 32 orang.

Dengan demikian rapat paripurna ini telah memenuhi kuorum, dan rapar paripurna dapat kita mulai.

Dengan membaca ***"Bismillahirrohmanirrohim"*** tepat pukul 12.10 WIB Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara yang menjadi agenda dalam rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Laporan Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017;

3. Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017;
4. Persetujuan Penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017;
5. Penandatanganan persetujuan bersama dilanjutkan penyerahan surat keputusan;
6. Penyampaian Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017;
7. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.

Kepada Saudara Drs. Drupodo, M.Si selaku Sekretaris Badan Anggaran, dipersilahkan.

==== PEMBACAAN LAPORAN BADAN ANGGARAN ===

➤ *(Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 terlampir)*

Terimakasih Saudara Drs. Drupodo, M.Si selaku Sekretaris Badan Anggaran atas laporannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Kita masuki acara ketiga yaitu Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.

Kepada yang telah ditunjuk untuk menyampaikan pendapat fraksi, saya minta menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. Muh. Zaenuri
2. Fraksi Demokrat : Sdr. Edi Kartono, S.Pd.,M.H.
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Ilyas
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Sdri. Nanik Sri Sundari
5. Fraksi Partai Gerindra : Sdr. Puji Santoso,S.P.,M.H.
6. Fraksi Karya Sejahtera : Sdr. H.Joko Suprihadi,S.H.
7. Fraksi Harapan : Sdr. Sukarmain

Selanjutnya, secara berurutan dimulai dari juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dipersilahkan .

Fraksi	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	✓		
Fraksi Demokrat	✓		
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	✓		
Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	✓		
Fraksi Partai Gerindra	✓		
Fraksi Karya Sejahtera	✓		
Fraksi Harapan	✓		

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Dari Laporan Badan Anggaran maupun Pendapat Fraksi-Fraksi, dapat disimpulkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017, dapat diterima dan disetujui menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang. Namun dalam keabsahannya, perlu persetujuan terlebih dahulu dari rekan-rekan anggota DPRD pada rapat paripurna ini.

Untuk itu saya tawarkan kepada Saudara-Saudara Anggota :

“Apakah Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 dan Rekomendasi yang dilaporkan oleh Badan Anggaran DPRD dapat disetujui ?”

=====SETUJUUUUU=====

(Dengan suara bulat semua anggota yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Kita masuki acara keempat yaitu Penandatanganan Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang dilanjutkan Penyerahan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Raperda.

Agar dalam pelaksanaannya berjalan lancar, saya minta Sekretariat DPRD untuk memandu jalannya prosesi penandatanganan dan penyerahan surat keputusan .

Waktu saya serahkan kepada Sekretariat DPRD.

**===== PENANDATANGAN PERSETUJUAN BERSAMA DAN
 PENYERAHAN SURAT KEPUTUSAN DPRD =====**

Terima kasih kepada Sekretariat DPRD atas bantuannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Acara terakhir yaitu Pendapat Akhir Bupati Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat dipersilahkan.

==== PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS RAPERDA ===

➤ *(Pendapat Akhir Bupati Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 terlampir)*

Terima kasih saudara Bupati atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Agenda dalam rapat paripurna ini telah kita lalui, maka selesai sudah acara rapat paripurna ini. Terima kasih kepada Saudara Bupati beserta jajarannya, rekan-rekan Anggota DPRD serta Sekretaris DPRD beserta seluruh stafnya yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, sehingga

pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017 dapat berjalan lancar sesuai waktu yang dijadwalkan. Dan kepada saudara-saudara yang telah mengikuti rapat , kami atas nama Pimpinan DPRD mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam memimpin rapat paripurna.

Akhirnya, dengan mengucap “ *Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 13.20 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA,

H. GUNASIH, S.E.

SEKRETARIS,

Drs. DRUPODO, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670421 199303 1 009

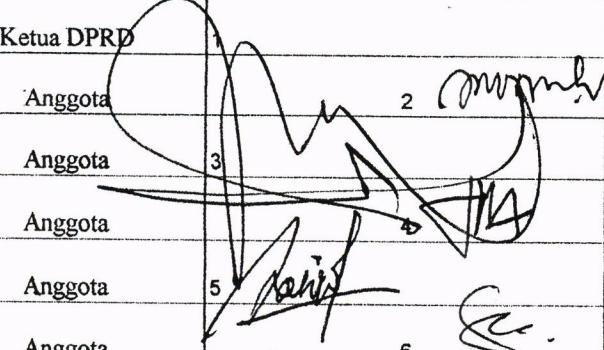
LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (IV) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

- LAMPIRAN I** : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II** : Laporan Banggar atas Hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017;
- LAMPIRAN III** : Pendapat Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017;
- LAMPIRAN IV** : Keputusan DPRD Nomor Tahun 2018 Tentang Persetujuan Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017;
- LAMPIRAN V** : Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA (IV) DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN
2017

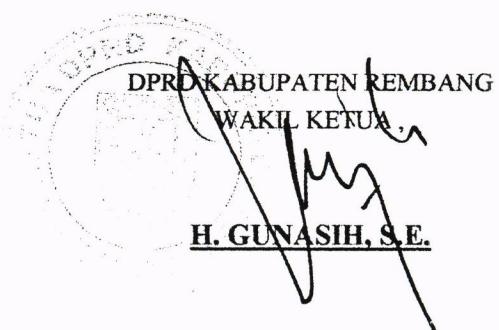
HARI/TANGGAL : SELASA, 31 JULI 2018
PUKUL : 10.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD		
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd.	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
FRAKSI DEMOKRAT				
11	H. GUNASIH, S.E.	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, M.H.	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICAH, S.E, M.H.	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, S.E.	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	18	
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOLEH, B.A	Anggota	22	
23	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi.	Anggota	23	
24	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	24	

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM			
25	SUMARSIH	Wakil Ketua DPRD	25 <i>Thung</i>
26	JASMANI	Anggota	26 <i>Desen</i>
27	WIDODO	Anggota	<i>27</i>
28	ALI IRCHAM, S.T.	Anggota	28 <i>Thay</i>
29	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	29 <i>Si</i>
30	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	30 <i>HP</i>
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31 <i>Frida</i>
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spi.	Anggota	32
FRAKSI PARTAI GERINDRA			
33	HERI KURNIAWAN, S.E.	Anggota	33 <i>Heri</i>
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34 <i>Chasanuddin</i>
35	PUJI SANTOSO, SP, M.H.	Anggota	35 <i>Puji</i>
36	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	36
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37
FRAKSI KARYA SEJAHTERA			
38	H. ISMARI, S.H.	Anggota	38 <i>Ismari</i>
39	GATOT PAERAN, S.H, M.Si.	Anggota	39 <i>Gatot</i>
40	H. JOKO SUPRIHADI, S.H.	Anggota	40
41	CATUR WINANTO, S.H.	Anggota	41
FRAKSI HARAPAN			
42	SUKARMAIN	Anggota	42 <i>Sukarmain</i>
43	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	43
44	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, S.Pd.	Anggota	44 <i>Paramita</i>
45	NUR JANNAH	Anggota	45 <i>Nur Jannah</i>

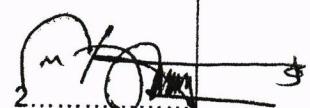
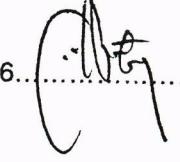
Keterangan :

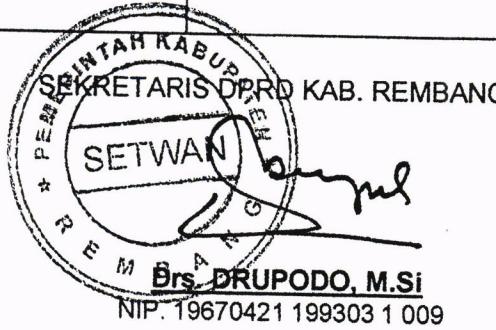
- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA (IV) DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN
ANGGARAN 2017

HARI/TANGGAL : SELASA, 31 JULI 2018
PUKUL : 10.00 WIB

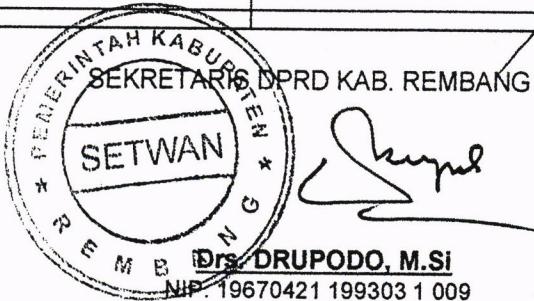
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	BAYU ANDRIYANTO, S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3	Kejaksaan Negeri Rembang	3.
4	Pengadilan Negeri Rembang	4.
5	Dandim 0720 Rembang	5.
6	<u>MARIOYO, S.H.</u>	Kepolisian Resort Rembang	6. 
7	<u>Mahzumi</u>	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7. 
8	Drs. SUBAKTI	Sekertaris Daerah	8. 



DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA (IV) DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN
ANGGARAN 2017

HARI/TANGGAL : SELASA, 31 JULI 2018
PUKUL : 10.00 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	CAMAT REMBANG	1
2	CAMAT KALIORI	2
3	CAMAT SUMBER	KAMDANI	3
4	CAMAT SULANG	S. Harayadi	4
5	CAMAT BULU	5
6	CAMAT PAMOTAN	M. Wijaya	6
7	CAMAT GUNEM	Sukisna	7
8	CAMAT SALE	Joko Irimanu	8
9	CAMAT LASEM	9
10	CAMAT PANCUR	Jukur	10
11	CAMAT SEDAN	Amby	11
12	CAMAT SLUKE	H. T. J. O. H.	12
13	CAMAT KRAGAN	13
14	CAMAT SARANG	MUTAQIN	14



DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA (IV) DPRD KABUPATEN REMBANG
TERKAIT RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2017

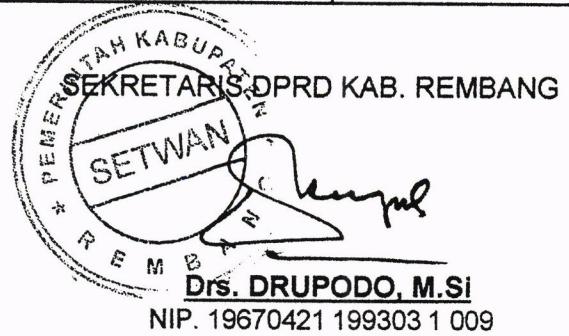
HARI/TANGGAL : SELASA, 31 JULI 2018
PUKUL : 10.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN			8
9	BAG. HUKUM	Didik P	Bahtiar	9
10	BAG. HUMAS	Agus		10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN			11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Lahip	K. Rang	13
14	BAG. ORGANISASI & KEPEGAWAIAN	Sri Leti H	Ka Subbag TLPN	14
15	BAG. UMUM	Gantant		15
16	BPPKAD	Mardin	Keb	16
17	INSPEKTORAT			17
18	BAPPEDA	Drs Wahyuni	Ka BPPN	18
19	DINSOSP2KB	Fri Wahyuni		19
20	BKD			20
21	B P B D	Pukwidi	Kolah	21
22	DPU TATA RUANG	Sutiyarto	KADIN	22
23	DINPERKIM	joestienarni		23
24	DINAS KESEHATAN	Supriyo Utomo	Secret	24
25	DINDIKPORA	Mard	Kasius	25
26	DINPERINDAGKOP & UMKM	Ach Samud	Dinindagkop	26
27	DINTANPAN	Suraanum		27
28	DINLUTKAN	BUDI YONO	Secretaris	28
29	DINKOMINFO			29
30	DINAS PERKINBANGAN			30

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
31	DINAS DUKCAPIL	POLCO S	Kan	31
32	DINPERMADES	Suli Atun	kp dinper	32
33	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA			33
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Maryam	Sebretis	34
35	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTOONO	KEBANGPOL	35
36	DINAS ARSIP & PERPUSTAKAAN	Merdyat	Kabid	36
37	DINAS PMPTSP NAKER	TEG UHL-6	Kader	37
38	RSUD dr. R. SUTRASNO	Agus Dwi	DRD	38
39	SATPOL PP	H WALLIYO		39
40	TIM PKK KAB. REMBANG			40
41	P D A M			41
42	PERCETAKAN DAERAH	Sangga Sirombing	ka. Unit percetakan	42
43	PD. BANK PASAR			43
44	BANK JATENG CAB. REMBANG			44
45	BRI CAB. REMBANG			45
46	PD BPR BKK LASEM			46
47	PT. R B S J			47
48	APOTIK DAERAH			48
49	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA			49
50	DIPENDA PROPINSI			50
51	BPS KAB. REMBANG			51
52	RUMAH TAHANAN			52
53	PERHUTANI KPH MANTINGAN			53
54	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			54
55	KANTOR PERHUTANI SPH IV			55
56	KANTOR POS DAN GIRO			56
57	TELKOM REMBANG			57
58	PLN CAB. REMBANG			58
59	BAWASLU KAB. REMBANG			59
60	B P N KAB. REMBANG			60
61	KANTOR PAJAK			61
62	UP3AD (ASET DAERAH)			62
63	KANTOR PELABUHAN			63

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
65	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			65
66	PELABUHAN PERIKANAN TASIK AGUNG			66
67	BTPN KCP. REMBANG			67
68	PERUM PEGADAIAN			68
69	BSM.BANK DANAMON			69
70	DHARMA WANITA PERSATUAN			70
71	GERAKAN PRAMUKA			71
72	PMI CAB. REMBANG			72
73	STIE. YPPI REMBANG			73
74	DPC PPP			74
75	DPC PARTAI DEMOKRAT			75
76	DPD PARTAI GOLKAR			76
77	DPD PAN			77
78	DPC PARTAI HANURA			78
79	DPC PKS			79
80	DPC PARTAI NASDEM			80
81	DPC PARTAI GERINDRA			81
82	DPC PKB			82
83	DPC PDI PERJUANGAN			83
84	SUARA MERDEKA			84
85	CAKRA TV			85
86	RADIO CBFM	Masudi	Reporter	86 
87	RADIO R2B			87
88	MAJALAH BANGKIT			88
89	PATI EKSPRESS			89
90	RADIO MATA AIR			90

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
91	badan	Agus	Int. dan	91
92	Sri Nugantti / BPPKAD	Sri Nugantti	Cabang	92
93	Ismawato / BPPKAD	Ismawato.	trabada	93
94		Agus	TA FLCs	94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100



**LAPORAN
BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG**

TENTANG

**RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN 2017**



**BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2018**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jalan P. Diponegoro Nomor 88 Rembang 59212 Telp (0295) 691194
Email : setdprd@rembangkab.go.id

LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017

I. PENDAHULUAN

1. Bawa untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 perlu diadakan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
2. Bawa hasil pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 dilaporkan oleh Badan Anggaran pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

II. DASAR

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
10. Surat Bupati Rembang Nomor 900/1572/2018 tanggal 26 Juni 2018 perihal Pengiriman Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.2017;
11. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang dengan TAPD Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 2 Juli 2018 yang mengagendakan Penjadwalan pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017.

III. PELAKSANAAN

- a. Rapat Badan Anggaran dengan TAPD Kabupaten Rembang dilakukan pada tanggal 23 Juli 2018 Jam 10.00 WIB dengan acara penjelasan lanjutan atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017.
- b. Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi – komisi DPRD Kabupaten Rembang yang dilakukan pada tanggal 23 Juli 2018 Jam 12.00 WIB membahas Strategi dan distribusi Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017.
- c. Rapat-rapat Komisi A, B, C, dan D DPRD Kabupaten Rembang dengan OPD / Instansi terkait dilaksanakan pada :

Hari	: Selasa – Kamis
Tanggal	: 24 sampai dengan 26 Juli 2018
Jam	: 11.00 WIB - Selesai
Tempat	: Ruang Komisi A,B,C dan D DPRD Kabupaten Rembang

- Acara : Pendalaman Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017.
- d. Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi-komisi DPRD Kabupaten Rembang pada :
- Hari : Kamis
Tanggal : 26 Juli 2018
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
Acara : Penyampaian Laporan Komisi kepada Banggar atas pendalaman Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017.
- e. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD pada :
- Hari : Senin
Tanggal : 30 Juli 2018
Jam : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
Acara : Sinkronisasi dan koordinasi hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017.

IV. HASIL RAPAT

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang telah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017, sebagaimana jadwal yang telah ditentukan. Adapun ringkasannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. HASIL PEMBAHASAN

RINGKASAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD 2017

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)		PEMBAHASAN		
		SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	MENJADI	BERTAMBAH (BERKURANG)	%
1	2	3	4	7	8	9
1	PENDAPATAN DAERAH	1.763.792.031.109,60	1.722.252.909.030,04	1.722.252.909.030,04	(41.539.122.079,56)	97,64
1.1	Pendapatan Asli Daerah	308.606.440.109,60	300.319.284.807,04	300.319.284.807,04	(8.287.155.302,56)	97,31
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	52.840.500.000,00	59.734.946.872,00	59.734.946.872,00	6.894.446.872,00	113,05
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	22.043.335.000,00	20.730.064.301,00	20.730.064.301,00	(1.313.270.699,00)	94,04
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.213.262.848,00	9.212.738.532,00	9.212.738.532,00	(524.316,00)	99,99
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	224.509.342.261,60	210.641.535.102,04	210.641.535.102,04	(13.867.807.159,56)	93,82
1.2	Dana Perimbangan	1.100.747.729.000,00	1.075.045.860.549,00	1.075.045.860.549,00	(25.701.868.451,00)	97,67
1.2.2	Dana Transfer Umum	815.012.255.000,00	816.948.229.807,00	816.948.229.807,00	1.935.974.807,00	100,24
1.2.3	Dana Transfer Khusus	285.735.474.000,00	258.097.630.742,00	258.097.630.742,00	(27.637.843.258,00)	90,33
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	354.437.862.000,00	346.887.763.674,00	346.887.763.674,00	(7.550.098.326,00)	97,87
1.3.1	Hibah	2.566.904.000,00	1.711.800.674,00	1.711.800.674,00	(855.103.326,00)	66,69
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya	96.743.553.000,00	92.803.709.000,00	92.803.709.000,00	(3.939.844.000,00)	95,93
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	228.013.715.000,00	228.013.715.000,00	228.013.715.000,00	-	100,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	27.113.690.000,00	24.358.539.000,00	24.358.539.000,00	(2.755.151.000,00)	89,84
2.	BELANJA DAERAH	1.969.222.098.819,18	1.829.088.241.098,22	1.829.088.241.098,22	(140.133.857.720,96)	92,88
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.089.137.598.159,58	1.050.346.817.667,00	1.050.346.817.667,00	(38.790.780.492,58)	96,44
2.1.1	Belanja Pegawai	656.867.383.438,58	622.547.261.167,00	622.547.261.167,00	(34.320.122.271,58)	94,78
2.1.4	Belanja Hibah	49.960.402.500,00	46.450.880.000,00	46.450.880.000,00	(3.509.522.500,00)	92,98
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	9.512.000.000,00	8.927.000.000,00	8.927.000.000,00	(585.000.000,00)	93,85
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	6.455.961.000,00	6.437.223.500,00	6.437.223.500,00	(18.737.500,00)	99,71
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	365.509.851.221,00	365.168.845.000,00	365.168.845.000,00	(341.006.221,00)	99,91
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	832.000.000,00	815.608.000,00	815.608.000,00	(16.392.000,00)	98,03
2.2	Belanja Langsung	880.084.500.659,60	778.741.423.431,22	778.741.423.431,22	(101.343.077.228,38)	88,48
2.2.1	Belanja Pegawai	187.718.741.773,10	174.582.051.301,00	174.582.051.301,00	(13.136.690.472,10)	93,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	272.562.067.650,60	250.388.658.063,00	250.388.658.063,00	(22.173.409.587,60)	91,86
2.2.3	Belanja Modal	419.803.691.235,90	353.770.714.067,22	353.770.714.067,22	(66.032.977.168,68)	84,27
	Jumlah Belanja	1.969.222.098.819,18	1.829.088.241.098,22	1.829.088.241.098,22	(140.133.857.720,96)	92,88
	surplus (devisit)	(205.430.067.709,58)	(106.835.332.068,18)	(106.835.332.068,18)	98.594.735.641,40	52,01
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	-	-	-	-	-
3.1	Penerimaan Pembiayaan	214.875.906.410,58	232.225.166.662,58	232.225.166.662,58	17.349.260.252,00	108,07
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	214.875.906.410,58	214.495.185.982,58	214.495.185.982,58	(380.720.428,00)	99,82
	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri -Perbankan	-	17.729.980.680,00	17.729.980.680,00	17.729.980.680,00	-
	Jumlah penerimaan Pembiayaan	214.875.906.410,58	232.225.166.662,58	232.225.166.662,58	17.349.260.252,00	108,07
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	9.445.838.701,00	8.228.389.150,00	8.228.389.150,00	(1.217.449.551,00)	87,11
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.189.000.000,00	8.189.000.000,00	8.189.000.000,00	-	100,00
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-
	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	1.256.838.701,00	39.389.150,00	39.389.150,00	(1.217.449.551,00)	3,13
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	9.445.838.701,00	8.228.389.150,00	8.228.389.150,00	(1.217.449.551,00)	87,11
	Pembiayaan Netto	205.430.067.709,58	223.996.777.512,58	223.996.777.512,58	18.566.709.803,00	109,04
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	(0,00)	117.161.445.444,40	117.161.445.444,40	117.161.445.444,40	

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD

NO.	SKPD	JUMLAH (Rp)			
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN			
		PENDAPATAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	3	4	5	6=4+5
1	DINPENDIKPORA	56,932,800,000.00	422,987,080,438.58	168,090,729,638.00	591,077,810,076.58
2	DINAS KESEHATAN	42,653,598,904.00	45,244,997,000.00	107,174,766,185.60	152,419,763,185.60
3	RSUD dr R. SOETRASNO	110,600,000,000.00	25,387,503,000.00	135,396,040,073.00	160,783,543,073.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1,020,000,000.00	14,928,371,000.00	157,476,926,000.00	172,405,297,000.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1,115,000,000.00	-	39,563,984,000.00	39,563,984,000.00
6	SATPOL PP		3,664,792,000.00	4,609,500,000.00	8,274,292,000.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1,380,917,000.00	2,884,002,000.00	4,264,919,000.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		2,069,430,000.00	6,472,000,000.00	8,541,430,000.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		4,892,433,000.00	10,319,052,000.00	15,211,485,000.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		1,465,700,000.00	3,593,500,000.00	5,059,200,000.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	121,472,000.00	12,526,742,000.00	38,019,346,000.00	50,546,088,000.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	130,000,000.00	2,684,044,000.00	6,302,200,000.00	8,986,244,000.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		2,827,189,000.00	2,842,567,000.00	5,669,756,000.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		8,442,391,000.00	5,317,090,000.00	13,759,481,000.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	1,313,672,500.00	5,524,572,000.00	15,938,000,000.00	21,462,572,000.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	353,281,000.00	-	2,005,500,000.00	2,005,500,000.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1,062,000,000.00	2,504,355,000.00	7,529,130,000.00	10,033,485,000.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		1,840,615,000.00	3,025,082,000.00	4,865,697,000.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	13,146,285,265.00	4,253,371,000.00	20,135,179,642.00	24,388,550,642.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	3,402,101,000.00	9,219,668,000.00	9,989,905,000.00	19,209,573,000.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		14,786,628,000.00	-	14,786,628,000.00
21.8	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		766,070,000.00	-	766,070,000.00
23	SEKRETARIAT DAERAH	9,369,262,848.00	13,571,047,000.00	45,959,417,061.00	59,530,464,061.00
24	SEKRETARIAT DPRD		3,802,311,000.00	32,188,936,000.00	35,991,247,000.00
25	KECAMATAN REMBANG		4,922,823,000.00	4,295,326,000.00	9,218,149,000.00
26	KECAMATAN KALIORI		2,060,895,000.00	623,244,000.00	2,684,139,000.00
27	KECAMATAN SULANG		1,733,390,000.00	3,944,200,000.00	5,677,590,000.00
28	KECAMATAN SUMBER		1,602,447,000.00	608,139,000.00	2,210,586,000.00
29	KECAMATAN BULU		1,463,751,000.00	695,150,000.00	2,158,901,000.00
30	KECAMATAN LASEM		1,994,075,000.00	699,731,600.00	2,693,806,600.00
31	KECAMATAN PANCUR		2,046,312,000.00	694,400,000.00	2,740,712,000.00
32	KECAMATAN SLUKE		1,322,554,000.00	935,770,000.00	2,258,324,000.00
33	KECAMATAN PAMOTAN		1,643,618,000.00	687,500,000.00	2,331,118,000.00
34	KECAMATAN GUNEM		1,627,244,000.00	548,887,000.00	2,176,131,000.00
35	KECAMATAN SALE		1,531,061,000.00	764,450,000.00	2,295,511,000.00
36	KECAMATAN KRAGAN		1,877,583,000.00	862,830,460.00	2,740,413,460.00
37	KECAMATAN SEDAN		1,695,407,000.00	762,593,000.00	2,458,000,000.00
38	KECAMATAN SARANG		2,168,937,000.00	532,960,000.00	2,701,897,000.00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN		3,115,477,000.00	7,744,700,000.00	10,860,177,000.00
40	BAPPEDA		3,497,943,000.00	6,439,500,000.00	9,937,443,000.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1,522,572,557,592.60	446,403,531,721.00	18,262,767,000.00	464,666,298,721.00
a	(SKPD)	67,386,966,592.60	14,133,317,000.00	18,262,767,000.00	32,396,084,000.00
b	(PPKD)	1,455,185,591,000.00	432,270,214,721.00	-	432,270,214,721.00
42	BKD		3,660,323,000.00	6,149,500,000.00	9,809,823,000.00
	JUMLAH	1,763,792,031,109.60	1,089,137,598,159.58	880,084,500,659.60	1,969,222,098,819.18

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD

NO.	SKPD	JUMLAH (Rp)			
		PENDAPATAN	REALISASI		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	7	8	9	10=8+9
1	DINPENDIKPORA	57,793,949,264.00	398,567,656,686.00	138,139,182,212.00	536,706,838,898.00
2	DINAS KESEHATAN	39,568,842,657.20	44,207,182,490.00	89,100,377,766.22	133,307,560,256.22
3	RSUD dr R. SOETRASNO	90,347,908,976.84	24,805,163,994.00	129,310,839,819.00	154,116,003,813.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1,129,911,600.00	14,513,602,340.00	136,501,895,605.00	151,015,497,945.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	562,585,450.00	-	36,051,748,063.00	36,051,748,063.00
6	SATPOL PP		3,566,465,868.00	4,252,403,534.00	7,818,869,402.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1,314,244,231.00	2,828,228,898.00	4,142,473,129.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		2,027,027,478.00	5,985,317,500.00	8,012,344,978.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		4,671,195,103.00	9,961,532,125.00	14,632,727,228.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		1,429,699,953.00	3,408,043,215.00	4,837,743,168.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	122,494,500.00	11,941,886,813.00	36,434,368,683.00	48,376,255,496.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	119,953,000.00	2,618,787,163.00	6,071,182,964.00	8,689,970,127.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		2,750,507,581.00	2,681,662,611.00	5,432,170,192.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		8,135,820,204.00	4,988,300,553.00	13,124,120,757.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	1,435,034,850.00	5,268,703,763.00	14,451,282,421.00	19,719,986,184.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	331,408,000.00	-	1,872,962,384.00	1,872,962,384.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	368,331,500.00	2,362,854,847.00	5,968,393,054.00	8,331,247,901.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		1,783,438,427.00	2,929,641,001.00	4,713,079,428.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	12,485,529,829.00	3,944,155,405.00	17,649,309,000.00	21,593,464,405.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	4,080,689,535.00	8,877,399,873.00	7,274,724,586.00	16,152,124,459.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		13,880,388,719.00	-	13,880,388,719.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		762,103,017.00	-	762,103,017.00
23	SEKRETARIAT DAERAH	9,409,968,717.00	12,888,089,308.00	43,938,945,767.00	56,827,035,075.00
24	SEKRETARIAT DPRD		3,642,638,192.00	27,199,769,704.00	30,842,407,896.00
25	KECAMATAN REMBANG		4,637,090,787.00	4,125,782,750.00	8,762,873,537.00
26	KECAMATAN KALIORI		1,986,781,133.00	614,297,706.00	2,601,078,839.00
27	KECAMATAN SULANG		1,625,318,951.00	3,825,715,675.00	5,451,034,626.00
28	KECAMATAN SUMBER		1,513,709,572.00	588,364,391.00	2,102,073,963.00
29	KECAMATAN BULU		1,391,291,894.00	653,626,200.00	2,044,918,094.00
30	KECAMATAN LASEM		1,954,819,870.00	693,889,790.00	2,648,709,660.00
31	KECAMATAN PANCUR		1,977,763,935.00	677,129,006.00	2,654,892,941.00
32	KECAMATAN SLUKE		1,258,265,801.00	721,215,187.00	1,979,480,988.00
33	KECAMATAN PAMOTAN		1,579,210,333.00	674,450,000.00	2,253,660,333.00
34	KECAMATAN GUNEM		1,584,328,845.00	536,580,350.00	2,120,909,195.00
35	KECAMATAN SALE		1,485,164,269.00	716,186,000.00	2,201,350,269.00
36	KECAMATAN KRAGAN		1,789,740,926.00	842,330,890.00	2,632,071,816.00
37	KECAMATAN SEDAN		1,606,214,255.00	726,013,000.00	2,332,227,255.00
38	KECAMATAN SARANG		2,075,485,594.00	525,782,412.00	2,601,268,006.00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN		2,974,364,571.00	7,327,355,260.00	10,301,719,831.00
40	BAPPEDA		3,405,466,139.00	6,325,223,359.00	9,730,689,498.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1,504,496,301,151.00	440,014,688,873.00	16,384,055,581.00	456,398,744,454.00
a	(SKPD)	82,562,676,928.00	12,215,132,373.00	16,384,055,581.00	28,599,187,954.00
b	(PPKD)	1,421,933,624,223.00	427,799,556,500.00	-	427,799,556,500.00
42	BKD		3,528,100,464.00	5,783,314,409.00	9,311,414,873.00
	JUMLAH	1,722,252,909,030.04	1,050,346,817,667.00	778,741,423,431.22	1,829,088,241,098.22

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD

NO.	SKPD	JUMLAH (Rp)			
		PENDAPATAN	BERTAMBAH (BERKURANG)		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	11=7-3	12=8-4	13=9-5	14=12+13
1	DINPENDIKPORA	861,149,264.00	(24,419,423,752.58)	(29,951,547,426.00)	(54,370,971,178.58)
2	DINAS KESEHATAN	(3,084,756,246.80)	(1,037,814,510.00)	(18,074,388,419.38)	(19,112,202,929.38)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	(20,252,091,023.16)	(582,339,006.00)	(6,085,200,254.00)	(6,667,539,260.00)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	109,911,600.00	(414,768,660.00)	(20,975,030,395.00)	(21,389,799,055.00)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	(552,414,550.00)	-	(3,512,235,937.00)	(3,512,235,937.00)
6	SATPOL PP	-	(98,326,132.00)	(357,096,466.00)	(455,422,598.00)
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	(66,672,769.00)	(55,773,102.00)	(122,445,871.00)
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	(42,402,522.00)	(486,682,500.00)	(529,085,022.00)
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	(221,237,897.00)	(357,519,875.00)	(578,757,772.00)
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	(36,000,047.00)	(185,456,785.00)	(221,456,832.00)
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1,022,500.00	(584,855,187.00)	(1,584,977,317.00)	(2,169,832,504.00)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(10,047,000.00)	(65,256,837.00)	(231,017,036.00)	(296,273,873.00)
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SİPIL	-	(76,681,419.00)	(160,904,389.00)	(237,585,808.00)
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	(306,570,796.00)	(328,789,447.00)	(635,360,243.00)
15	DINAS PERHUBUNGAN	121,362,350.00	(255,868,237.00)	(1,486,717,579.00)	(1,742,585,816.00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(21,873,000.00)	-	(132,537,616.00)	(132,537,616.00)
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	(693,668,500.00)	(141,500,153.00)	(1,560,736,946.00)	(1,702,237,099.00)
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	(57,176,573.00)	(95,440,999.00)	(152,617,572.00)
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(660,755,436.00)	(309,215,595.00)	(2,485,870,642.00)	(2,795,086,237.00)
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	678,588,535.00	(342,268,127.00)	(2,715,180,414.00)	(3,057,448,541.00)
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	(906,239,281.00)	-	(906,239,281.00)
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	(3,966,983.00)	-	(3,966,983.00)
23	SEKRETARIAT DAERAH	40,705,869.00	(682,957,692.00)	(2,020,471,294.00)	(2,703,428,986.00)
24	SEKRETARIAT DPRD	-	(159,672,808.00)	(4,989,166,296.00)	(5,148,839,104.00)
25	KECAMATAN REMBANG	-	(285,732,213.00)	(169,543,250.00)	(455,275,463.00)
26	KECAMATAN KALIORI	-	(74,113,867.00)	(8,946,294.00)	(83,060,161.00)
27	KECAMATAN SULANG	-	(108,071,049.00)	(118,484,325.00)	(226,555,374.00)
28	KECAMATAN SUMBER	-	(88,737,428.00)	(19,774,609.00)	(108,512,037.00)
29	KECAMATAN BULU	-	(72,459,106.00)	(41,523,800.00)	(113,982,906.00)
30	KECAMATAN LASEM	-	(39,255,130.00)	(5,841,810.00)	(45,096,940.00)
31	KECAMATAN PANCUR	-	(68,548,065.00)	(17,270,994.00)	(85,819,059.00)
32	KECAMATAN SLUKE	-	(64,288,199.00)	(214,554,813.00)	(278,843,012.00)
33	KECAMATAN PAMOTAN	-	(64,407,667.00)	(13,050,000.00)	(77,457,667.00)
34	KECAMATAN GUNEM	-	(42,915,155.00)	(12,306,650.00)	(55,221,805.00)
35	KECAMATAN SALE	-	(45,896,731.00)	(48,264,000.00)	(94,160,731.00)
36	KECAMATAN KRAGAN	-	(87,842,074.00)	(20,499,570.00)	(108,341,644.00)
37	KECAMATAN SEDAN	-	(89,192,745.00)	(36,580,000.00)	(125,772,745.00)
38	KECAMATAN SARANG	-	(93,451,406.00)	(7,177,588.00)	(100,628,994.00)
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	(141,112,429.00)	(417,344,740.00)	(558,457,169.00)
40	BAPPEDA	-	(92,476,861.00)	(114,276,641.00)	(206,753,502.00)
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(18,076,256,441.60)	(6,388,842,848.00)	(1,878,711,419.00)	(8,267,554,267.00)
a	(SKPD)	15,175,710,335.40	(1,918,184,627.00)	(1,878,711,419.00)	(3,796,896,046.00)
b	(PPKD)	(33,251,966,777.00)	(4,470,658,221.00)	-	(4,470,658,221.00)
42	BKD	-	(132,222,536.00)	(366,185,591.00)	(498,408,127.00)
	JUMLAH	(41,539,122,079.56)	(38,790,780,492.58)	(101,343,077,228.38)	(140,133,857,720.96)

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD

NO.	SKPD	BERTAMBAH (BERKURANG)			
		PENDAPATAN	%		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	15	16	17	18
1	DINPENDIKpora	101.51	94.23	82.18	90.80
2	DINAS KESEHATAN	92.77	97.71	83.14	87.46
3	RSUD dr R. SOETRASNO	81.69	97.71	95.51	95.85
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	110.78	97.22	86.68	87.59
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50.46	-	91.12	91.12
6	SATPOL PP		97.32	92.25	94.50
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		95.17	98.07	97.13
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		97.95	92.48	93.81
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		95.48	96.54	96.20
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		97.54	94.84	95.62
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	100.84	95.33	95.83	95.71
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	92.27	97.57	96.33	96.70
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		97.29	94.34	95.81
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		96.37	93.82	95.38
15	DINAS PERHUBUNGAN	109.24	95.37	90.67	91.88
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	93.81		93.39	93.39
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	34.68	94.35	79.27	83.03
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		96.89	96.85	96.86
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	94.97	92.73	87.65	88.54
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	119.95	96.29	72.82	84.08
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		93.87		93.87
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		99.48		99.48
23	SEKRETARIAT DAERAH	100.43	94.97	95.60	95.46
24	SEKRETARIAT DPRD		95.80	84.50	85.69
25	KECAMATAN REMBANG		94.20	96.05	95.06
26	KECAMATAN KALIORI		96.40	98.56	96.91
27	KECAMATAN SULANG		93.77	97.00	96.01
28	KECAMATAN SUMBER		94.46	96.75	95.09
29	KECAMATAN BULU		95.05	94.03	94.72
30	KECAMATAN LASEM		98.03	99.17	98.33
31	KECAMATAN PANCUR		96.65	97.51	96.87
32	KECAMATAN SLUKE		95.14	77.07	87.65
33	KECAMATAN PAMOTAN		96.08	98.10	96.68
34	KECAMATAN GUNEM		97.36	97.76	97.46
35	KECAMATAN SALE		97.00	93.69	95.90
36	KECAMATAN KRAGAN		95.32	97.62	96.05
37	KECAMATAN SEDAN		94.74	95.20	94.88
38	KECAMATAN SARANG		95.69	98.65	96.28
39	INSPEKTORAT KABUPATEN		95.47	94.61	94.86
40	BAPPEDA		97.36	98.23	97.92
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	98.81	98.57	89.71	98.22
a	(SKPD)	122.52	86.43	89.71	88.28
b	(PPKD)	97.71	98.97		98.97
42	BKD		96.39	94.05	94.92
	JUMLAH	97.64	96.44	88.48	92.88

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		PENDAPATAN	MENJADI		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	19	20	21	22=20+21
1	DINPENDIKPORA	57,793,949,264.00	398,567,656,686.00	138,139,182,212.00	536,706,838,898.00
2	DINAS KESEHATAN	39,568,842,657.20	44,207,182,490.00	89,100,377,766.22	133,307,560,256.22
3	RSUD dr R. SOETRASNO	90,347,908,976.84	24,805,163,994.00	129,310,839,819.00	154,116,003,813.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1,129,911,600.00	14,513,602,340.00	136,501,895,605.00	151,015,497,945.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	562,585,450.00	-	36,051,748,063.00	36,051,748,063.00
6	SATPOL PP		3,566,465,868.00	4,252,403,534.00	7,818,869,402.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1,314,244,231.00	2,828,228,898.00	4,142,473,129.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		2,027,027,478.00	5,985,317,500.00	8,012,344,978.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		4,671,195,103.00	9,961,532,125.00	14,632,727,228.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		1,429,699,953.00	3,408,043,215.00	4,837,743,168.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	122,494,500.00	11,941,886,813.00	36,434,368,683.00	48,376,255,496.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	119,953,000.00	2,618,787,163.00	6,071,182,964.00	8,689,970,127.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		2,750,507,581.00	2,681,662,611.00	5,432,170,192.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		8,135,820,204.00	4,988,300,553.00	13,124,120,757.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	1,435,034,850.00	5,268,703,763.00	14,451,282,421.00	19,719,986,184.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	331,408,000.00	-	1,872,962,384.00	1,872,962,384.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	368,331,500.00	2,362,854,847.00	5,968,393,054.00	8,331,247,901.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		1,783,438,427.00	2,929,641,001.00	4,713,079,428.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	12,485,529,829.00	3,944,155,405.00	17,649,309,000.00	21,593,464,405.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	4,080,689,535.00	8,877,399,873.00	7,274,724,586.00	16,152,124,459.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		13,880,388,719.00	-	13,880,388,719.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		762,103,017.00	-	762,103,017.00
23	SEKRETARIAT DAERAH	9,409,968,717.00	12,888,089,308.00	43,938,945,767.00	56,827,035,075.00
24	SEKRETARIAT DPRD		3,642,638,192.00	27,199,769,704.00	30,842,407,896.00
25	KECAMATAN REMBANG		4,637,090,787.00	4,125,782,750.00	8,762,873,537.00
26	KECAMATAN KALIORI		1,986,781,133.00	614,297,706.00	2,601,078,839.00
27	KECAMATAN SULANG		1,625,318,951.00	3,825,715,675.00	5,451,034,626.00
28	KECAMATAN SUMBER		1,513,709,572.00	588,364,391.00	2,102,073,963.00
29	KECAMATAN BULU		1,391,291,894.00	653,626,200.00	2,044,918,094.00
30	KECAMATAN LASEM		1,954,819,870.00	693,889,790.00	2,648,709,660.00
31	KECAMATAN PANCUR		1,977,763,935.00	677,129,006.00	2,654,892,941.00
32	KECAMATAN SLUKE		1,258,265,801.00	721,215,187.00	1,979,480,988.00
33	KECAMATAN PAMOTAN		1,579,210,333.00	674,450,000.00	2,253,660,333.00
34	KECAMATAN GUNEM		1,584,328,845.00	536,580,350.00	2,120,909,195.00
35	KECAMATAN SALE		1,485,164,289.00	716,186,000.00	2,201,350,269.00
36	KECAMATAN KRAGAN		1,789,740,926.00	842,330,890.00	2,632,071,816.00
37	KECAMATAN SEDAN		1,606,214,255.00	726,013,000.00	2,332,227,255.00
38	KECAMATAN SARANG		2,075,485,594.00	525,782,412.00	2,601,268,006.00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN		2,974,364,571.00	7,327,355,260.00	10,301,719,831.00
40	BAPPEDA		3,405,466,139.00	6,325,223,359.00	9,730,689,498.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1,504,496,301,151.00	440,014,688,873.00	16,384,055,581.00	456,398,744,454.00
a	(SKPD)	82,562,676,928.00	12,215,132,373.00	16,384,055,581.00	28,599,187,954.00
b	(PPKD)	1,421,933,624,223.00	427,799,556,500.00	-	427,799,556,500.00
42	BKD		3,528,100,464.00	5,783,314,409.00	9,311,414,873.00
	JUMLAH	1,722,252,909,030.04	1,050,346,817,667.00	778,741,423,431.22	1,829,088,241,098.22

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		PENDAPATAN	BERTAMBAH (BERKURANG)		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	23=19-3	24=20-4	25=21-5	26=24+25
1	DINPENDIKpora	861,149,264.00	(24,419,423,752.58)	(29,951,547,426.00)	(54,370,971,178.58)
2	DINAS KESEHATAN	(3,084,756,246.80)	(1,037,814,510.00)	(18,074,388,419.38)	(19,112,202,929.38)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	(20,252,091,023.16)	(582,339,006.00)	(6,085,200,254.00)	(6,667,539,260.00)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	109,911,600.00	(414,768,660.00)	(20,975,030,395.00)	(21,389,799,055.00)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	(552,414,550.00)	-	(3,512,235,937.00)	(3,512,235,937.00)
6	SATPOL PP	-	(98,326,132.00)	(357,096,466.00)	(455,422,598.00)
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	-	(66,672,769.00)	(55,773,102.00)	(122,445,871.00)
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	(42,402,522.00)	(486,682,500.00)	(529,085,022.00)
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	-	(221,237,897.00)	(357,519,875.00)	(578,757,772.00)
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	-	(36,000,047.00)	(185,456,785.00)	(221,456,832.00)
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	1,022,500.00	(584,855,187.00)	(1,584,977,317.00)	(2,169,832,504.00)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(10,047,000.00)	(65,256,837.00)	(231,017,036.00)	(296,273,873.00)
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	(76,681,419.00)	(160,904,389.00)	(237,585,808.00)
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	(306,570,796.00)	(328,789,447.00)	(635,360,243.00)
15	DINAS PERHUBUNGAN	121,362,350.00	(255,868,237.00)	(1,486,717,579.00)	(1,742,585,816.00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(21,873,000.00)	-	(132,537,616.00)	(132,537,616.00)
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	(693,668,500.00)	(141,500,153.00)	(1,560,736,946.00)	(1,702,237,099.00)
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	-	(57,176,573.00)	(95,440,999.00)	(152,617,572.00)
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(660,755,436.00)	(309,215,595.00)	(2,485,870,642.00)	(2,795,086,237.00)
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	678,588,535.00	(342,268,127.00)	(2,715,180,414.00)	(3,057,448,541.00)
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	(906,239,281.00)	-	(906,239,281.00)
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	(3,966,983.00)	-	(3,966,983.00)
23	SEKRETARIAT DAERAH	40,705,869.00	(682,957,692.00)	(2,020,471,294.00)	(2,703,428,986.00)
24	SEKRETARIAT DPRD	-	(159,672,808.00)	(4,989,166,296.00)	(5,148,839,104.00)
25	KECAMATAN REMBANG	-	(285,732,213.00)	(169,543,250.00)	(455,275,463.00)
26	KECAMATAN KALIORI	-	(74,113,867.00)	(8,946,294.00)	(83,060,161.00)
27	KECAMATAN SULANG	-	(108,071,049.00)	(118,484,325.00)	(226,555,374.00)
28	KECAMATAN SUMBER	-	(88,737,428.00)	(19,774,609.00)	(108,512,037.00)
29	KECAMATAN BULU	-	(72,459,106.00)	(41,523,800.00)	(113,982,906.00)
30	KECAMATAN LASEM	-	(39,255,130.00)	(5,841,810.00)	(45,096,940.00)
31	KECAMATAN PANCUR	-	(68,548,065.00)	(17,270,994.00)	(85,819,059.00)
32	KECAMATAN SLUKE	-	(64,288,199.00)	(214,554,813.00)	(278,843,012.00)
33	KECAMATAN PAMOTAN	-	(64,407,667.00)	(13,050,000.00)	(77,457,667.00)
34	KECAMATAN GUNEM	-	(42,915,155.00)	(12,306,650.00)	(55,221,805.00)
35	KECAMATAN SALE	-	(45,896,731.00)	(48,264,000.00)	(94,160,731.00)
36	KECAMATAN KRAMAN	-	(87,842,074.00)	(20,499,570.00)	(108,341,644.00)
37	KECAMATAN SEDAN	-	(89,192,745.00)	(36,580,000.00)	(125,772,745.00)
38	KECAMATAN SARANG	-	(93,451,406.00)	(7,177,588.00)	(100,628,994.00)
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	(141,112,429.00)	(417,344,740.00)	(558,457,169.00)
40	BAPPEDA	-	(92,476,861.00)	(114,276,641.00)	(206,753,502.00)
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(18,076,256,441.60)	(6,388,842,848.00)	(1,878,711,419.00)	(8,267,554,267.00)
a	(SKPD)	15,175,710,335.40	(1,918,184,627.00)	(1,878,711,419.00)	(3,796,896,046.00)
b	(PPKD)	(33,251,966,777.00)	(4,470,658,221.00)	-	(4,470,658,221.00)
42	BKD	-	(132,222,536.00)	(366,185,591.00)	(498,408,127.00)
	JUMLAH	(41,539,122,079.56)	(38,790,780,492.58)	(101,343,077,228.38)	(140,133,857,720.96)

REKAPITULASI ANGGARAN SKPD

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		PENDAPATAN	%		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	27	28	29	30
1	DINPENDIKpora	101.51	94.23	82.18	90.80
2	DINAS KESEHATAN	92.77	97.71	83.14	87.46
3	RSUD dr R. SOETRASNO	81.69	97.71	95.51	95.85
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	110.78	97.22	86.68	87.59
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	50.46		91.12	91.12
6	SATPOL PP		97.32	92.25	94.50
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		95.17	98.07	97.13
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		97.95	92.48	93.81
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		95.48	96.54	96.20
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA		97.54	94.84	95.62
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	100.84	95.33	95.83	95.71
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	92.27	97.57	96.33	96.70
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		97.29	94.34	95.81
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		96.37	93.82	95.38
15	DINAS PERHUBUNGAN	109.24	95.37	90.67	91.88
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	93.81		93.39	93.39
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	34.68	94.35	79.27	83.03
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		96.89	96.85	96.86
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	94.97	92.73	87.65	88.54
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	119.95	96.29	72.82	84.08
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		93.87		
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		99.48		93.87
23	SEKRETARIAT DAERAH	100.43	94.97	95.60	99.48
24	SEKRETARIAT DPRD		95.80	84.50	95.46
25	KECAMATAN REMBANG		94.20	96.05	85.69
26	KECAMATAN KALIORI		96.40	98.56	95.06
27	KECAMATAN SULANG		93.77	97.00	96.91
28	KECAMATAN SUMBER		94.46	96.75	96.01
29	KECAMATAN BULU		95.05	94.03	95.09
30	KECAMATAN LASEM		98.03	99.17	94.72
31	KECAMATAN PANCUR		96.65	97.51	98.33
32	KECAMATAN SLUKE		95.14	77.07	96.87
33	KECAMATAN PAMOTAN		96.08	98.10	87.65
34	KECAMATAN GUNEM		97.36	97.76	96.68
35	KECAMATAN SALE		97.00	93.69	97.46
36	KECAMATAN KRAGAN		95.32	97.62	95.90
37	KECAMATAN SEDAN		94.74	95.20	96.05
38	KECAMATAN SARANG		95.69	98.65	94.88
39	INSPEKTORAT KABUPATEN		95.47	94.61	96.28
40	BAPPEDA		97.36	98.23	94.86
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	98.81	98.57	89.71	97.92
a	(SKPD)	122.52	86.43	89.71	88.28
b	(PPKD)	97.71	98.97		98.97
42	BKD		96.39	94.05	94.92
	JUMLAH	97.64	96.44	88.48	92.88

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN							
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10+3+4+5+6+7+8+9
1	DINPENDIKPORA	422,987,080,438.58	-	-	-	-	-	-	422,987,080,438.58
2	DINAS KESEHATAN	45,244,997,000.00	-	-	-	-	-	-	45,244,997,000.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	25,387,503,000.00	-	-	-	-	-	-	25,387,503,000.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	14,928,371,000.00	-	-	-	-	-	-	14,928,371,000.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SATPOL PP	3,664,792,000.00	-	-	-	-	-	-	3,664,792,000.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,380,917,000.00	-	-	-	-	-	-	1,380,917,000.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,069,430,000.00	-	-	-	-	-	-	2,069,430,000.00
9	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	4,892,433,000.00	-	-	-	-	-	-	4,892,433,000.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	1,465,700,000.00	-	-	-	-	-	-	1,465,700,000.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	12,526,742,000.00	-	-	-	-	-	-	12,526,742,000.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2,684,044,000.00	-	-	-	-	-	-	2,684,044,000.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIRIL	2,827,189,000.00	-	-	-	-	-	-	2,827,189,000.00
14	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8,442,391,000.00	-	-	-	-	-	-	8,442,391,000.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	5,524,572,000.00	-	-	-	-	-	-	5,524,572,000.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-	-	-	-
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2,504,355,000.00	-	-	-	-	-	-	2,504,355,000.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1,840,615,000.00	-	-	-	-	-	-	1,840,615,000.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,253,371,000.00	-	-	-	-	-	-	4,253,371,000.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	9,219,668,000.00	-	-	-	-	-	-	9,219,668,000.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	14,786,628,000.00	-	-	-	-	-	-	14,786,628,000.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	766,070,000.00	-	-	-	-	-	-	766,070,000.00
23	SEKRETARIAT DAERAH	13,571,047,000.00	-	-	-	-	-	-	13,571,047,000.00
24	SEKRETARIAT DPRD	3,802,311,000.00	-	-	-	-	-	-	3,802,311,000.00
25	KECAMATAN REMBANG	4,922,823,000.00	-	-	-	-	-	-	4,922,823,000.00
26	KECAMATAN KALIORI	2,060,895,000.00	-	-	-	-	-	-	2,060,895,000.00
27	KECAMATAN SULANG	1,733,390,000.00	-	-	-	-	-	-	1,733,390,000.00
28	KECAMATAN SUMBER	1,602,447,000.00	-	-	-	-	-	-	1,602,447,000.00
29	KECAMATAN BULU	1,483,751,000.00	-	-	-	-	-	-	1,483,751,000.00
30	KECAMATAN LASEM	1,994,075,000.00	-	-	-	-	-	-	1,994,075,000.00
31	KECAMATAN PANCUR	2,046,312,000.00	-	-	-	-	-	-	2,046,312,000.00
32	KECAMATAN SLUKE	1,322,554,000.00	-	-	-	-	-	-	1,322,554,000.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	1,643,618,000.00	-	-	-	-	-	-	1,643,618,000.00
34	KECAMATAN GUNEM	1,627,244,000.00	-	-	-	-	-	-	1,627,244,000.00
35	KECAMATAN SALE	1,531,061,000.00	-	-	-	-	-	-	1,531,061,000.00
36	KECAMATAN KRAGAN	1,877,583,000.00	-	-	-	-	-	-	1,877,583,000.00
37	KECAMATAN SEDAN	1,695,407,000.00	-	-	-	-	-	-	1,695,407,000.00
38	KECAMATAN SARANG	2,168,937,000.00	-	-	-	-	-	-	2,168,937,000.00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	3,115,477,000.00	-	-	-	-	-	-	3,115,477,000.00
40	BAPPEDA	3,497,943,000.00	-	-	-	-	-	-	3,497,943,000.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	14,133,317,000.00	-	49,960,402,500.00	9,512,000,000.00	6,455,961,000.00	365,509,851,221.00	832,000,000.00	446,403,531,721.00
a	(SKPD)	14,133,317,000.00	-	-	-	-	-	-	14,133,317,000.00
b	(PPKD)	-	49,960,402,500.00	9,512,000,000.00	6,455,961,000.00	365,509,851,221.00	832,000,000.00	432,270,214,721.00	3,660,323,000.00
42	BKD	3,660,323,000.00	-	49,960,402,500.00	9,512,000,000.00	6,455,961,000.00	365,509,851,221.00	832,000,000.00	1,089,137,598,159.58
	JUMLAH	656,867,383,438.58	-	49,960,402,500.00	9,512,000,000.00	6,455,961,000.00	365,509,851,221.00	832,000,000.00	1,089,137,598,159.58

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	REALISASI							
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	JUMLAH
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18= 11+12+13+14+15+16+17
1	DINPENDIKPOR	398,567,656,686.00	-	-	-	-	-	-	398,567,656,686.00
2	DINAS KESEHATAN	44,207,182,490.00	-	-	-	-	-	-	44,207,182,490.00
3	RSUD dr R. SOETRASNO	24,805,163,994.00	-	-	-	-	-	-	24,805,163,994.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	14,513,602,340.00	-	-	-	-	-	-	14,513,602,340.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SATPOL PP	3,566,465,868.00	-	-	-	-	-	-	3,566,465,868.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,314,244,231.00	-	-	-	-	-	-	1,314,244,231.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,027,027,478.00	-	-	-	-	-	-	2,027,027,478.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	4,671,195,103.00	-	-	-	-	-	-	4,671,195,103.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	1,429,699,953.00	-	-	-	-	-	-	1,429,699,953.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	11,941,886,813.00	-	-	-	-	-	-	11,941,886,813.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2,618,787,163.00	-	-	-	-	-	-	2,618,787,163.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2,750,507,581.00	-	-	-	-	-	-	2,750,507,581.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8,135,820,204.00	-	-	-	-	-	-	8,135,820,204.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	5,268,703,763.00	-	-	-	-	-	-	5,268,703,763.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-	-	-	-
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2,362,854,847.00	-	-	-	-	-	-	2,362,854,847.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1,783,438,427.00	-	-	-	-	-	-	1,783,438,427.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,944,155,405.00	-	-	-	-	-	-	3,944,155,405.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	8,877,399,873.00	-	-	-	-	-	-	8,877,399,873.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	13,880,388,719.00	-	-	-	-	-	-	13,880,388,719.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	762,103,017.00	-	-	-	-	-	-	762,103,017.00
23	SEKRETARIAT DAERAH	12,888,089,308.00	-	-	-	-	-	-	12,888,089,308.00
24	SEKRETARIAT DPRD	3,642,638,192.00	-	-	-	-	-	-	3,642,638,192.00
25	KECAMATAN REMBANG	4,637,090,787.00	-	-	-	-	-	-	4,637,090,787.00
26	KECAMATAN KALIORI	1,986,781,133.00	-	-	-	-	-	-	1,986,781,133.00
27	KECAMATAN SULANG	1,625,318,951.00	-	-	-	-	-	-	1,625,318,951.00
28	KECAMATAN SUMBER	1,513,709,572.00	-	-	-	-	-	-	1,513,709,572.00
29	KECAMATAN BULU	1,391,291,894.00	-	-	-	-	-	-	1,391,291,894.00
30	KECAMATAN LASEM	1,954,819,870.00	-	-	-	-	-	-	1,954,819,870.00
31	KECAMATAN PANCUR	1,977,763,935.00	-	-	-	-	-	-	1,977,763,935.00
32	KECAMATAN SLUKE	1,258,265,801.00	-	-	-	-	-	-	1,258,265,801.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	1,579,210,333.00	-	-	-	-	-	-	1,579,210,333.00
34	KECAMATAN GUNEM	1,584,328,845.00	-	-	-	-	-	-	1,584,328,845.00
35	KECAMATAN SALE	1,485,164,269.00	-	-	-	-	-	-	1,485,164,269.00
36	KECAMATAN KRAGAN	1,789,140,926.00	-	-	-	-	-	-	1,789,140,926.00
37	KECAMATAN SEDAN	1,606,214,255.00	-	-	-	-	-	-	1,606,214,255.00
38	KECAMATAN SARANG	2,075,485,594.00	-	-	-	-	-	-	2,075,485,594.00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	2,974,364,571.00	-	-	-	-	-	-	2,974,364,571.00
40	BAPPEDA	3,405,466,139.00	-	-	-	-	-	-	3,405,466,139.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12,215,132,373.00	-	46,450,880,000.00	8,927,000,000.00	6,437,223,500.00	365,168,845,000.00	815,608,000.00	440,014,688,873.00
a	(SKPD)	12,215,132,373.00	-	-	-	-	-	-	12,215,132,373.00
b	(PPKD)	-	46,450,880,000.00	8,927,000,000.00	6,437,223,500.00	365,168,845,000.00	815,608,000.00	427,799,556,500.00	
42	BKD	3,528,100,464.00	-	-	-	-	-	-	3,528,100,464.00
	JUMLAH	622,547,261,167.00	-	46,450,880,000.00	8,927,000,000.00	6,437,223,500.00	365,168,845,000.00	815,608,000.00	1,050,346,817,667.00

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)							
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	JUMLAH
1	2	19=11-3	20=12-4	21=13-5	22=14-6	23=15-7	24=16-8	25=17-9	26= 19+20+21+22+23+24+25
1	DINPENDIKPORA	(24,419,423,752.58)	-	-	-	-	-	-	(24,419,423,752.58)
2	DINAS KESEHATAN	(1,037,814,510.00)	-	-	-	-	-	-	(1,037,814,510.00)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	(582,339,006.00)	-	-	-	-	-	-	(582,339,006.00)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(414,768,660.00)	-	-	-	-	-	-	(414,768,660.00)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SATPOL PP	(98,326,132.00)	-	-	-	-	-	-	(98,326,132.00)
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	(66,672,769.00)	-	-	-	-	-	-	(66,672,769.00)
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(42,402,522.00)	-	-	-	-	-	-	(42,402,522.00)
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	(221,237,897.00)	-	-	-	-	-	-	(221,237,897.00)
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	(36,000,047.00)	-	-	-	-	-	-	(36,000,047.00)
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	(584,855,187.00)	-	-	-	-	-	-	(584,855,187.00)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(65,256,837.00)	-	-	-	-	-	-	(65,256,837.00)
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(76,681,419.00)	-	-	-	-	-	-	(76,681,419.00)
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	(306,570,796.00)	-	-	-	-	-	-	(306,570,796.00)
15	DINAS PERHUBUNGAN	(255,868,237.00)	-	-	-	-	-	-	(255,868,237.00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-	-	-	-
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	(141,500,153.00)	-	-	-	-	-	-	(141,500,153.00)
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(57,176,573.00)	-	-	-	-	-	-	(57,176,573.00)
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(309,215,595.00)	-	-	-	-	-	-	(309,215,595.00)
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	(342,268,127.00)	-	-	-	-	-	-	(342,268,127.00)
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	(906,239,281.00)	-	-	-	-	-	-	(906,239,281.00)
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	(3,966,983.00)	-	-	-	-	-	-	(3,966,983.00)
23	SEKRETARIAT DAERAH	(682,957,692.00)	-	-	-	-	-	-	(682,957,692.00)
24	SEKRETARIAT DPRD	(159,672,808.00)	-	-	-	-	-	-	(159,672,808.00)
25	KECAMATAN REMBANG	(285,732,213.00)	-	-	-	-	-	-	(285,732,213.00)
26	KECAMATAN KALIORI	(74,113,867.00)	-	-	-	-	-	-	(74,113,867.00)
27	KECAMATAN SULANG	(108,071,049.00)	-	-	-	-	-	-	(108,071,049.00)
28	KECAMATAN SUMBER	(88,737,428.00)	-	-	-	-	-	-	(88,737,428.00)
29	KECAMATAN BULU	(72,459,106.00)	-	-	-	-	-	-	(72,459,106.00)
30	KECAMATAN LASEM	(39,255,130.00)	-	-	-	-	-	-	(39,255,130.00)
31	KECAMATAN PANCUR	(68,548,065.00)	-	-	-	-	-	-	(68,548,065.00)
32	KECAMATAN SLUKE	(64,288,199.00)	-	-	-	-	-	-	(64,288,199.00)
33	KECAMATAN PAMOTAN	(64,407,667.00)	-	-	-	-	-	-	(64,407,667.00)
34	KECAMATAN GUNEM	(42,915,155.00)	-	-	-	-	-	-	(42,915,155.00)
35	KECAMATAN SALE	(45,898,731.00)	-	-	-	-	-	-	(45,898,731.00)
36	KECAMATAN KRAGAN	(87,842,074.00)	-	-	-	-	-	-	(87,842,074.00)
37	KECAMATAN SEDAN	(89,192,745.00)	-	-	-	-	-	-	(89,192,745.00)
38	KECAMATAN SARANG	(93,451,406.00)	-	-	-	-	-	-	(93,451,406.00)
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	(141,112,429.00)	-	-	-	-	-	-	(141,112,429.00)
40	BAPPEDA	(92,476,881.00)	-	-	-	-	-	-	(92,476,881.00)
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(1,918,184,627.00)	-	(3,509,522,500.00)	(585,000,000.00)	(18,737,500.00)	(341,006,221.00)	(16,392,000.00)	(6,388,842,848.00)
a	(SKPD)	(1,918,184,627.00)	-	-	-	-	-	-	(1,918,184,627.00)
b	(PPKD)	-	-	(3,509,522,500.00)	(585,000,000.00)	(18,737,500.00)	(341,006,221.00)	(16,392,000.00)	(4,470,658,221.00)
42	BKD	(132,222,536.00)	-	-	-	-	-	-	(132,222,536.00)
	JUMLAH	(34,320,122,271.58)	-	(3,509,522,500.00)	(585,000,000.00)	(18,737,500.00)	(341,006,221.00)	(16,392,000.00)	(38,790,780,492.58)

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGE

NO.	ORGANISASI	% Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga JUMLAH							
		27	28	29	30	31	32	33	34
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
1	DINPENDIKPORA	94.23							94.23
2	DINAS KESEHATAN	97.71							97.71
3	RSUD dr R. SOETRASNO	97.71							97.71
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	97.22							97.22
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-							-
6	SATPOL PP	97.32							97.32
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.17							95.17
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	97.95							97.95
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	95.48							95.48
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	97.54							97.54
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	95.33							95.33
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	97.57							97.57
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	97.29							97.29
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	96.37							96.37
15	DINAS PERHUBUNGAN	95.37							95.37
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-							-
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	94.35							94.35
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	96.89							96.89
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	92.73							92.73
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	96.29							96.29
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	93.87							93.87
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	99.48							99.48
23	SEKRETARIAT DAERAH	94.97							94.97
24	SEKRETARIAT DPRD	95.80							95.80
25	KECAMATAN REMBANG	94.20							94.20
26	KECAMATAN KALIORI	96.40							96.40
27	KECAMATAN SULANG	93.77							93.77
28	KECAMATAN SUMBER	94.46							94.46
29	KECAMATAN BULU	95.05							95.05
30	KECAMATAN LASEM	98.03							98.03
31	KECAMATAN PANCUR	96.65							96.65
32	KECAMATAN SLUKE	95.14							95.14
33	KECAMATAN PAMOTAN	96.08							96.08
34	KECAMATAN GUNEM	97.36							97.36
35	KECAMATAN SALE	97.00							97.00
36	KECAMATAN KRAGAN	95.32							95.32
37	KECAMATAN SEDAN	94.74							94.74
38	KECAMATAN SARANG	95.69							95.69
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	95.47							95.47
40	BAPPEDA	97.36							97.36
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	86.43							86.43
8	(SKPD)	86.43							86.43
b	(PPKD)	-	-	92.98	93.85	99.71	99.91	98.03	98.97
42	BKD	96.39		92.98	93.85	99.71	99.91	98.03	96.39
	JUMLAH	94.78	-	92.98	93.85	99.71	99.91	98.03	96.44

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	PEMBAHASAN MENJADI						
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga
		35	36	37	38	39	40	41
1	2	35	36	37	38	39	40	41
1	DINPENDIKPORA	398,567,656,686.00	-	-	-	-	-	398,567,656,686.00
2	DINAS KESEHATAN	44,207,182,490.00						44,207,182,490.00
3	RSUD dr. R. SOETRASNO	24,805,163,994.00						24,805,163,994.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	14,513,602,340.00						14,513,602,340.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-						-
6	SATPOL PP	3,566,465,868.00						3,566,465,868.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,314,244,231.00						1,314,244,231.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,027,027,478.00						2,027,027,478.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	4,671,195,103.00						4,671,195,103.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	1,425,699,953.00						1,429,699,953.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	11,941,886,813.00						11,941,886,813.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2,618,787,163.00						2,618,787,163.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2,750,507,581.00						2,750,507,581.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8,135,820,204.00						8,135,820,204.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	5,268,703,763.00						5,268,703,763.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-						-
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	2,362,854,847.00						2,362,854,847.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1,783,438,427.00						1,783,438,427.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,944,155,405.00						3,944,155,405.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	8,877,399,873.00						8,877,399,873.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	13,880,388,719.00						13,880,388,719.00
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	762,103,017.00						762,103,017.00
23	SEKRETARIAT DAERAH	12,888,089,308.00						12,888,089,308.00
24	SEKRETARIAT DPRD	3,642,638,192.00						3,642,638,192.00
25	KECAMATAN REMBANG	4,637,090,787.00						4,637,090,787.00
26	KECAMATAN KALIORI	1,986,781,133.00						1,986,781,133.00
27	KECAMATAN SULANG	1,625,318,951.00						1,625,318,951.00
28	KECAMATAN SUMBER	1,513,709,572.00						1,513,709,572.00
29	KECAMATAN BULU	1,391,291,894.00						1,391,291,894.00
30	KECAMATAN LASEM	1,954,819,870.00						1,954,819,870.00
31	KECAMATAN PANCUR	1,977,763,935.00						1,977,763,935.00
32	KECAMATAN SLUKE	1,258,265,801.00						1,258,265,801.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	1,579,210,333.00						1,579,210,333.00
34	KECAMATAN GUNEM	1,584,328,845.00						1,584,328,845.00
35	KECAMATAN SALE	1,485,164,269.00						1,485,164,269.00
36	KECAMATAN KRAGAN	1,789,740,926.00						1,789,740,926.00
37	KECAMATAN SEDAN	1,606,214,255.00						1,606,214,255.00
38	KECAMATAN SARANG	2,075,485,594.00						2,075,485,594.00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	2,974,364,571.00						2,974,364,571.00
40	BAPPEDA	3,405,466,139.00						3,405,466,139.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	12,215,132,373.00	-	46,450,880,000.00	8,927,000,000.00	6,437,223,500.00	365,168,845,000.00	815,608,000.00
a (SKPD)		12,215,132,373.00						12,215,132,373.00
b (PPKD)			-	46,450,880,000.00	8,927,000,000.00	6,437,223,500.00	365,168,845,000.00	815,608,000.00
42	BKD	3,528,100,464.00						3,528,100,464.00
	JUMLAH	622,547,261,167.00	-	46,450,880,000.00	8,927,000,000.00	6,437,223,500.00	365,168,845,000.00	815,608,000.00
								1,050,346,817,667.00

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	PEMBAHASAN BERTAMBAH/ (BERKURANG)							
		Belanja Pegawai	Belanja Bunga	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Belanja Tidak Terduga	JUMLAH
		43=35-3	44=36-4	45=37-5	46=38-6	47=39-7	48=40-8	49=41-9	50=43+44+45+46+47+48+49
1	2	43=35-3	44=36-4	45=37-5	46=38-6	47=39-7	48=40-8	49=41-9	50=43+44+45+46+47+48+49
1	DINPENDIKPORA	(24,419,423,752.58)	-	-	-	-	-	-	(24,419,423,752.58)
2	DINAS KESEHATAN	(1,037,814,510.00)	-	-	-	-	-	-	(1,037,814,510.00)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	(582,339,006.00)	-	-	-	-	-	-	(582,339,006.00)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(414,768,660.00)	-	-	-	-	-	-	(414,768,660.00)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	-	-	-	-
6	SATPOL PP	(98,326,132.00)	-	-	-	-	-	-	(98,326,132.00)
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	(66,672,769.00)	-	-	-	-	-	-	(66,672,769.00)
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(42,402,522.00)	-	-	-	-	-	-	(42,402,522.00)
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	(221,237,897.00)	-	-	-	-	-	-	(221,237,897.00)
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	(36,000,047.00)	-	-	-	-	-	-	(36,000,047.00)
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	(584,855,187.00)	-	-	-	-	-	-	(584,855,187.00)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(65,256,837.00)	-	-	-	-	-	-	(65,256,837.00)
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(76,681,419.00)	-	-	-	-	-	-	(76,681,419.00)
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	(306,570,796.00)	-	-	-	-	-	-	(306,570,796.00)
15	DINAS PERHUBUNGAN	(255,868,237.00)	-	-	-	-	-	-	(255,868,237.00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-	-	-	-	-
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	(141,500,153.00)	-	-	-	-	-	-	(141,500,153.00)
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(57,176,573.00)	-	-	-	-	-	-	(57,176,573.00)
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(309,215,595.00)	-	-	-	-	-	-	(309,215,595.00)
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	(342,268,127.00)	-	-	-	-	-	-	(342,268,127.00)
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	(906,239,281.00)	-	-	-	-	-	-	(906,239,281.00)
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	(3,966,983.00)	-	-	-	-	-	-	(3,966,983.00)
23	SEKRETARIAT DAERAH	(682,957,692.00)	-	-	-	-	-	-	(682,957,692.00)
24	SEKRETARIAT DPRD	(159,672,808.00)	-	-	-	-	-	-	(159,672,808.00)
25	KECAMATAN REMBANG	(285,732,213.00)	-	-	-	-	-	-	(285,732,213.00)
26	KECAMATAN KALIORI	(74,113,867.00)	-	-	-	-	-	-	(74,113,867.00)
27	KECAMATAN SULANG	(108,071,049.00)	-	-	-	-	-	-	(108,071,049.00)
28	KECAMATAN SUMBER	(88,737,428.00)	-	-	-	-	-	-	(88,737,428.00)
29	KECAMATAN BULU	(72,459,106.00)	-	-	-	-	-	-	(72,459,106.00)
30	KECAMATAN LASEM	(39,255,130.00)	-	-	-	-	-	-	(39,255,130.00)
31	KECAMATAN PANCUR	(68,548,065.00)	-	-	-	-	-	-	(68,548,065.00)
32	KECAMATAN SLUKE	(64,288,199.00)	-	-	-	-	-	-	(64,288,199.00)
33	KECAMATAN PAMOTAN	(64,407,667.00)	-	-	-	-	-	-	(64,407,667.00)
34	KECAMATAN GUNEM	(42,915,155.00)	-	-	-	-	-	-	(42,915,155.00)
35	KECAMATAN SALE	(45,896,731.00)	-	-	-	-	-	-	(45,896,731.00)
36	KECAMATAN KRAGAN	(87,842,074.00)	-	-	-	-	-	-	(87,842,074.00)
37	KECAMATAN SEDAN	(89,192,745.00)	-	-	-	-	-	-	(89,192,745.00)
38	KECAMATAN SARANG	(93,451,406.00)	-	-	-	-	-	-	(93,451,406.00)
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	(141,112,429.00)	-	-	-	-	-	-	(141,112,429.00)
40	BAPPEDA	(92,476,861.00)	-	-	-	-	-	-	(92,476,861.00)
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(1,918,184,627.00)	-	(3,509,522,500.00)	(585,000,000.00)	(18,737,500.00)	(341,006,221.00)	(16,392,000.00)	(6,388,842,848.00)
a	(SKPD)	(1,918,184,627.00)	-	-	-	-	-	-	(1,918,184,627.00)
b	(PPKD)	-	-	(3,509,522,500.00)	(585,000,000.00)	(18,737,500.00)	(341,006,221.00)	(16,392,000.00)	(4,470,658,221.00)
42	BKD	(132,222,536.00)	-	-	-	-	-	-	(132,222,536.00)
	JUMLAH	(34,320,122,271.58)	-	(3,509,522,500.00)	(585,000,000.00)	(18,737,500.00)	(341,006,221.00)	(16,392,000.00)	(38,790,780,492.58)

BELANJA
REKAPITULASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO.	ORGANISASI	% Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja Tidak Terduga JUMLAH							
		51	52	53	54	55	56	57	58
1	2	51	52	53	54	55	56	57	58
1	DINPENDIKpora	94.23							94.23
2	DINAS KESEHATAN	97.71							97.71
3	RSUD dr. R. SOETRASNO	97.71							97.71
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	97.22							97.22
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-							-
6	SATPOL PP	97.32							97.32
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.17							95.17
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	97.95							97.95
9	DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	95.48							95.48
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	97.54							97.54
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	95.33							95.33
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	97.57							97.57
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	97.29							97.29
14	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	96.37							96.37
15	DINAS PERHUBUNGAN	95.37							95.37
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-							-
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	94.35							94.35
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	96.89							96.89
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	92.73							92.73
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	96.29							96.29
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	93.87							93.87
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	99.48							99.48
23	SEKRETARIAT DAERAH	94.97							94.97
24	SEKRETARIAT DPRD	95.80							95.80
25	KECAMATAN REMBANG	94.20							94.20
26	KECAMATAN KALIORI	96.40							96.40
27	KECAMATAN SULANG	93.77							93.77
28	KECAMATAN SUMBER	94.46							94.46
29	KECAMATAN BULU	95.05							95.05
30	KECAMATAN LASEM	98.03							98.03
31	KECAMATAN PANCUR	96.65							96.65
32	KECAMATAN SLUKE	95.14							95.14
33	KECAMATAN PAMOTAN	96.08							96.08
34	KECAMATAN GUNEM	97.36							97.36
35	KECAMATAN SALE	97.00							97.00
36	KECAMATAN KRAGAN	95.32							95.32
37	KECAMATAN SEDAN	94.74							94.74
38	KECAMATAN SARANG	95.69							95.69
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	95.47							95.47
40	BAPPEDA	97.36		-					97.36
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	86.43	-	92.98	93.85	99.71	99.91	98.03	98.57
a	(SKPD)	86.43	-	-	-	-	-	-	86.43
b	(PPKD)	-	-	92.98	93.85	99.71	99.91	98.03	98.97
42	BKD	96.39							96.39
	JUMLAH	94.78	-	92.98	93.85	99.71	99.91	98.03	96.44

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	DINPENDIKPORA	34,368,255,289.90	41,713,506,055.20	92,008,968,292.90	168,090,729,638.00
2	DINAS KESEHATAN	33,523,937,583.20	39,409,535,101.40	34,241,293,501.00	107,174,766,185.60
3	RSUD dr R. SOETRASNO	44,156,907,000.00	35,650,119,073.00	55,589,014,000.00	135,396,040,073.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3,674,480,000.00	2,609,646,000.00	151,192,800,000.00	157,476,926,000.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	777,122,500.00	1,132,607,500.00	37,654,254,000.00	39,563,984,000.00
6	SATPOL PP	2,134,276,000.00	1,833,153,000.00	642,071,000.00	4,609,500,000.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,768,170,000.00	1,110,332,000.00	5,500,000.00	2,884,002,000.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	927,955,000.00	2,284,045,000.00	3,260,000,000.00	6,472,000,000.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	2,693,385,000.00	5,942,471,000.00	1,683,196,000.00	10,319,052,000.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	1,196,995,000.00	2,334,965,000.00	61,540,000.00	3,593,500,000.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2,343,476,000.00	34,444,222,000.00	1,231,648,000.00	38,019,346,000.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1,456,880,000.00	3,532,270,000.00	1,313,050,000.00	6,302,200,000.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1,334,330,000.00	1,405,052,000.00	103,185,000.00	2,842,567,000.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1,223,490,000.00	3,797,428,000.00	296,172,000.00	5,317,090,000.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	1,603,900,000.00	11,027,005,000.00	3,307,095,000.00	15,938,000,000.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	558,385,000.00	1,060,085,000.00	387,030,000.00	2,005,500,000.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	922,085,000.00	2,873,395,000.00	3,733,650,000.00	7,529,130,000.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	557,559,000.00	1,705,157,000.00	762,366,000.00	3,025,082,000.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,288,301,000.00	5,635,208,000.00	10,211,670,642.00	20,135,179,642.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	1,730,154,000.00	3,572,326,000.00	4,687,425,000.00	9,989,905,000.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SEKRETARIAT DAERAH	22,100,425,000.00	20,116,772,061.00	3,742,220,000.00	45,959,417,061.00
24	SEKRETARIAT DPRD	3,733,683,000.00	27,467,337,000.00	987,916,000.00	32,188,936,000.00
25	KECAMATAN REMBANG	1,212,455,000.00	1,096,701,400.00	1,986,169,600.00	4,295,326,000.00
26	KECAMATAN KALIORI	242,006,000.00	285,803,500.00	95,434,500.00	623,244,000.00
27	KECAMATAN SULANG	387,644,000.00	326,356,000.00	3,230,200,000.00	3,944,200,000.00
28	KECAMATAN SUMBER	247,910,000.00	309,859,000.00	50,370,000.00	608,139,000.00
29	KECAMATAN BULU	258,625,000.00	212,925,000.00	223,600,000.00	695,150,000.00
30	KECAMATAN LASEM	214,504,900.00	282,681,000.00	202,545,700.00	699,731,600.00
31	KECAMATAN PANCUR	234,210,000.00	266,390,000.00	193,800,000.00	694,400,000.00
32	KECAMATAN SLUKE	268,855,000.00	361,940,000.00	304,975,000.00	935,770,000.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	297,345,000.00	247,905,000.00	142,250,000.00	687,500,000.00
34	KECAMATAN GUNEM	202,100,000.00	204,695,000.00	142,092,000.00	548,887,000.00
35	KECAMATAN SALE	289,440,000.00	263,820,000.00	211,190,000.00	764,450,000.00
36	KECAMATAN KRAMAN	248,544,000.00	407,402,460.00	206,884,000.00	862,830,460.00
37	KECAMATAN SEDAN	314,430,000.00	210,313,000.00	237,850,000.00	762,593,000.00
38	KECAMATAN SARANG	248,200,000.00	277,760,000.00	7,000,000.00	532,960,000.00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	5,229,740,000.00	2,385,679,000.00	129,281,000.00	7,744,700,000.00
40	BAPPEDA	2,146,106,000.00	4,144,569,000.00	148,825,000.00	6,439,500,000.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5,950,087,500.00	7,472,019,500.00	4,840,660,000.00	18,262,767,000.00
a	(SKPD)	5,950,087,500.00	7,472,019,500.00	4,840,660,000.00	18,262,767,000.00
b	(PPKD)	2,652,388,000.00	3,148,612,000.00	348,500,000.00	6,149,500,000.00
42	BKD	187,718,741,773.10	272,562,067,650.60	419,803,691,235.90	880,084,500,659.60
	JUMLAH				

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	REALISASI			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	7	8	9	10=7+8+9
1	DINPENDIKPORA	32,563,529,595.00	39,664,064,632.00	65,911,587,985.00	138,139,182,212.00
2	DINAS KESEHATAN	25,838,336,673.00	32,227,091,818.00	31,034,949,275.22	89,100,377,766.22
3	RSUD dr R. SOETRASNO	43,997,159,616.00	36,969,941,687.00	48,343,738,516.00	129,310,839,819.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2,950,427,000.00	1,562,705,255.00	131,988,763,350.00	136,501,895,605.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	725,952,000.00	721,632,163.00	34,604,163,900.00	36,051,748,063.00
6	SATPOL PP	1,914,277,000.00	1,709,230,234.00	628,896,300.00	4,252,403,534.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,729,559,000.00	1,093,169,898.00	5,500,000.00	2,828,228,898.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	836,100,000.00	1,990,395,100.00	3,158,822,400.00	5,985,317,500.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	2,665,476,500.00	5,700,833,875.00	1,595,221,750.00	9,961,532,125.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	1,148,835,000.00	2,200,421,465.00	58,786,750.00	3,408,043,215.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2,231,386,517.00	32,999,116,166.00	1,203,866,000.00	36,434,368,683.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1,425,540,000.00	3,360,225,804.00	1,285,417,160.00	6,071,182,964.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1,293,065,000.00	1,286,501,881.00	102,095,730.00	2,681,662,611.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1,166,329,000.00	3,585,229,573.00	236,741,980.00	4,988,300,553.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	1,522,840,000.00	10,498,451,771.00	2,429,990,650.00	14,451,282,421.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	540,050,000.00	958,747,674.00	374,164,710.00	1,872,962,384.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	854,321,000.00	2,772,362,804.00	2,341,709,250.00	5,968,393,054.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	531,740,000.00	1,638,472,001.00	759,429,000.00	2,929,641,001.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,188,758,000.00	4,856,319,618.00	8,604,231,382.00	17,649,309,000.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	1,654,364,000.00	3,213,290,585.00	2,407,070,001.00	7,274,724,586.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SEKRETARIAT DAERAH	21,714,653,000.00	18,659,442,389.00	3,564,850,378.00	43,938,945,767.00
24	SEKRETARIAT DPRD	3,576,438,000.00	22,680,341,754.00	942,989,950.00	27,199,769,704.00
25	KECAMATAN REMBANG	1,146,060,000.00	1,061,857,850.00	1,917,864,900.00	4,125,782,750.00
26	KECAMATAN KALIORI	240,656,000.00	281,067,404.00	92,574,302.00	614,297,706.00
27	KECAMATAN SULANG	386,344,000.00	321,570,000.00	3,117,801,675.00	3,825,715,675.00
28	KECAMATAN SUMBER	238,360,000.00	300,044,391.00	49,960,000.00	588,364,391.00
29	KECAMATAN BULU	229,225,000.00	206,402,500.00	217,998,700.00	653,626,200.00
30	KECAMATAN LASEM	214,504,900.00	279,348,890.00	200,036,000.00	693,889,790.00
31	KECAMATAN PANCUR	227,134,000.00	259,568,526.00	190,426,480.00	677,129,006.00
32	KECAMATAN SLUKE	217,355,000.00	207,918,187.00	295,942,000.00	721,215,187.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	287,645,000.00	244,885,000.00	141,920,000.00	674,450,000.00
34	KECAMATAN GUNEM	201,050,000.00	196,764,750.00	138,765,600.00	536,580,350.00
35	KECAMATAN SALE	289,440,000.00	218,695,000.00	208,051,000.00	716,186,000.00
36	KECAMATAN KRAGAN	238,759,000.00	401,533,890.00	202,038,000.00	842,330,890.00
37	KECAMATAN SEDAN	297,485,000.00	192,466,000.00	236,062,000.00	726,013,000.00
38	KECAMATAN SARANG	248,200,000.00	270,582,412.00	7,000,000.00	525,782,412.00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	5,028,060,000.00	2,175,693,117.00	123,602,143.00	7,327,355,260.00
40	BAPPEDA	2,119,006,000.00	4,060,296,709.00	145,920,650.00	6,325,223,359.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5,363,155,500.00	6,464,353,881.00	4,556,546,200.00	16,384,055,581.00
a	(SKPD)	5,363,155,500.00	6,464,353,881.00	4,556,546,200.00	16,384,055,581.00
b	(PPKD)				-
42	BKD	2,540,475,000.00	2,897,621,409.00	345,218,000.00	5,783,314,409.00
	JUMLAH	174,582,051,301.00	250,388,658,063.00	353,770,714,087.22	778,741,423,431.22

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
		(Rp)			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	11=7-3	12=8-4	13=9-5	14=11+12+13
1	DINPENDIKPORA	(1,804,725,694.90)	(2,049,441,423.20)	(26,097,380,307.90)	(29,951,547,426.00)
2	DINAS KESEHATAN	(7,685,600,910.20)	(7,182,443,283.40)	(3,206,344,225.78)	(18,074,388,419.38)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	(159,747,384.00)	1,319,822,614.00	(7,245,275,484.00)	(6,085,200,254.00)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(724,053,000.00)	(1,046,940,745.00)	(19,204,036,650.00)	(20,975,030,395.00)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	(51,170,500.00)	(410,975,337.00)	(3,050,090,100.00)	(3,512,235,937.00)
6	SATPOL PP	(219,999,000.00)	(123,922,766.00)	(13,174,700.00)	(357,096,466.00)
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	(38,611,000.00)	(17,162,102.00)	-	(55,773,102.00)
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(91,855,000.00)	(293,649,900.00)	(101,177,600.00)	(486,682,500.00)
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	(27,908,500.00)	(241,637,125.00)	(87,974,250.00)	(357,519,875.00)
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	(48,160,000.00)	(134,543,535.00)	(2,753,250.00)	(185,456,785.00)
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	(112,089,483.00)	(1,445,105,834.00)	(27,782,000.00)	(1,584,977,317.00)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(31,340,000.00)	(172,044,196.00)	(27,632,840.00)	(231,017,036.00)
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(41,265,000.00)	(118,550,119.00)	(1,089,270.00)	(160,904,389.00)
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	(57,161,000.00)	(212,198,427.00)	(59,430,020.00)	(328,789,447.00)
15	DINAS PERHUBUNGAN	(81,060,000.00)	(528,553,229.00)	(877,104,350.00)	(1,486,717,579.00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(18,335,000.00)	(101,337,326.00)	(12,865,290.00)	(132,537,616.00)
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	(67,764,000.00)	(101,032,196.00)	(1,391,940,750.00)	(1,560,736,946.00)
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(25,819,000.00)	(66,684,999.00)	(2,937,000.00)	(95,440,999.00)
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(99,543,000.00)	(778,888,382.00)	(1,607,439,260.00)	(2,485,870,642.00)
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	(75,790,000.00)	(359,035,415.00)	(2,280,354,999.00)	(2,715,180,414.00)
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SEKRETARIAT DAERAH	(385,772,000.00)	(1,457,329,672.00)	(177,369,622.00)	(2,020,471,294.00)
24	SEKRETARIAT DPRD	(157,245,000.00)	(4,786,995,246.00)	(44,926,050.00)	(4,989,166,296.00)
25	KECAMATAN REMBANG	(66,395,000.00)	(34,843,550.00)	(68,304,700.00)	(169,543,250.00)
26	KECAMATAN KALIORI	(1,350,000.00)	(4,736,096.00)	(2,860,198.00)	(8,946,294.00)
27	KECAMATAN SULANG	(1,300,000.00)	(4,786,000.00)	(112,398,325.00)	(118,484,325.00)
28	KECAMATAN SUMBER	(9,550,000.00)	(9,814,609.00)	(410,000.00)	(19,774,609.00)
29	KECAMATAN BULU	(29,400,000.00)	(6,522,500.00)	(5,601,300.00)	(41,523,800.00)
30	KECAMATAN LASEM	-	(3,332,110.00)	(2,509,700.00)	(5,841,810.00)
31	KECAMATAN PANCUR	(7,076,000.00)	(6,821,474.00)	(3,373,520.00)	(17,270,994.00)
32	KECAMATAN SLUKE	(51,500,000.00)	(154,021,813.00)	(9,033,000.00)	(214,554,813.00)
33	KECAMATAN PAMOTAN	(9,700,000.00)	(3,020,000.00)	(330,000.00)	(13,050,000.00)
34	KECAMATAN GUNEM	(1,050,000.00)	(7,930,250.00)	(3,326,400.00)	(12,306,650.00)
35	KECAMATAN SALE	-	(45,125,000.00)	(3,139,000.00)	(48,264,000.00)
36	KECAMATAN KRAMAN	(9,785,000.00)	(5,868,570.00)	(4,846,000.00)	(20,499,570.00)
37	KECAMATAN SEDAN	(16,945,000.00)	(17,847,000.00)	(1,788,000.00)	(36,580,000.00)
38	KECAMATAN SARANG	-	(7,177,588.00)	-	(7,177,588.00)
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	(201,680,000.00)	(209,985,883.00)	(5,678,857.00)	(417,344,740.00)
40	BAPPEDA	(27,100,000.00)	(84,272,291.00)	(2,904,350.00)	(114,276,641.00)
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(586,932,000.00)	(1,007,665,619.00)	(284,113,800.00)	(1,878,711,419.00)
a	(SKPD)	(586,932,000.00)	(1,007,665,619.00)	(284,113,800.00)	(1,878,711,419.00)
b	(PPKD)	-	-	-	-
42	BKD	(111,913,000.00)	(250,990,591.00)	(3,282,000.00)	(366,185,591.00)
	JUMLAH	(13,136,690,472.10)	(22,173,409,587.60)	(36,032,977,168.68)	(101,343,077,228.38)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
		% Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal JUMLAH			
1	2	15	16	17	18
1	DINPENDIKPORA	94.75	95.09	71.64	82.18
2	DINAS KESEHATAN	77.07	81.77	90.64	83.14
3	RSUD dr R. SOETRASNO	99.64	103.70	86.97	95.51
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	80.30	59.88	87.30	86.68
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	93.42	63.71	91.90	91.12
6	SATPOL PP	89.69	93.24	97.95	92.25
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	97.82	98.45	100.00	98.07
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	90.10	87.14	96.90	92.48
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	98.96	95.93	94.77	96.54
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	95.98	94.24	95.53	94.84
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	95.22	95.80	97.74	95.83
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	97.85	95.13	97.90	96.33
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	96.91	91.56	98.94	94.34
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	95.33	94.41	79.93	93.82
15	DINAS PERHUBUNGAN	94.95	95.21	73.48	90.67
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	96.72	90.44	96.68	93.39
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	92.65	96.48	62.72	79.27
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	95.37	96.09	99.61	96.85
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	97.68	86.18	84.26	87.65
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	95.62	89.95	51.35	72.82
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SEKRETARIAT DAERAH	98.25	92.76	95.26	95.60
24	SEKRETARIAT DPRD	95.79	82.57	95.45	84.50
25	KECAMATAN REMBANG	94.52	96.82	96.56	96.05
26	KECAMATAN KALIORI	99.44	98.34	97.00	98.56
27	KECAMATAN SULANG	99.66	98.53	96.52	97.00
28	KECAMATAN SUMBER	96.15	96.83	99.19	96.75
29	KECAMATAN BULU	88.63	96.94	97.49	94.03
30	KECAMATAN LASEM	100.00	98.82	98.76	99.17
31	KECAMATAN PANCUR	96.98	97.44	98.26	97.51
32	KECAMATAN SLUKE	80.84	57.45	97.04	77.07
33	KECAMATAN PAMOTAN	96.74	98.78	99.77	98.10
34	KECAMATAN GUNEM	99.48	96.13	97.66	97.76
35	KECAMATAN SALE	100.00	82.90	98.51	93.69
36	KECAMATAN KRAGAN	96.06	98.56	97.66	97.62
37	KECAMATAN SEDAN	94.61	91.51	99.25	95.20
38	KECAMATAN SARANG	100.00	97.42	100.00	98.65
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	96.14	91.20	95.61	94.61
40	BAPPEDA	98.74	97.97	98.05	98.23
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	90.14	86.51	94.13	89.71
a	(SKPD)	90.14	86.51	94.13	89.71
b	(PPKD)	-	-	-	-
42	BKD	95.78	92.03	99.06	94.05
	JUMLAH	93.00	91.86	84.27	88.48

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		MENJADI			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	19	20	21	22=19+20+21
1	DINPENDIKPORA	32,563,529,595.00	39,664,064,632.00	65,911,587,985.00	138,139,182,212.00
2	DINAS KESEHATAN	25,838,336,673.00	32,227,091,818.00	31,034,949,275.22	89,100,377,766.22
3	RSUD dr R. SOETRASNO	43,997,159,616.00	36,969,941,687.00	48,343,738,516.00	129,310,839,819.00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2,950,427,000.00	1,562,705,255.00	131,988,763,350.00	136,501,895,605.00
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	725,952,000.00	721,632,163.00	34,604,163,900.00	36,051,748,063.00
6	SATPOL PP	1,914,277,000.00	1,709,230,234.00	628,896,300.00	4,252,403,534.00
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1,729,559,000.00	1,093,169,898.00	5,500,000.00	2,828,228,898.00
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	836,100,000.00	1,990,395,100.00	3,158,822,400.00	5,985,317,500.00
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	2,665,476,500.00	5,700,833,875.00	1,595,221,750.00	9,961,532,125.00
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	1,148,835,000.00	2,200,421,465.00	58,786,750.00	3,408,043,215.00
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	2,231,386,517.00	32,999,116,166.00	1,203,866,000.00	36,434,368,683.00
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1,425,540,000.00	3,360,225,804.00	1,285,417,160.00	6,071,182,964.00
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1,293,065,000.00	1,286,501,881.00	102,095,730.00	2,681,662,611.00
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1,166,329,000.00	3,585,229,573.00	236,741,980.00	4,988,300,553.00
15	DINAS PERHUBUNGAN	1,522,840,000.00	10,498,451,771.00	2,429,990,650.00	14,451,282,421.00
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	540,050,000.00	958,747,674.00	374,164,710.00	1,872,962,384.00
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	854,321,000.00	2,772,362,804.00	2,341,709,250.00	5,968,393,054.00
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	531,740,000.00	1,638,472,001.00	759,429,000.00	2,929,641,001.00
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,188,758,000.00	4,856,319,618.00	8,604,231,382.00	17,649,309,000.00
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	1,654,364,000.00	3,213,290,585.00	2,407,070,001.00	7,274,724,586.00
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SEKRETARIAT DAERAH	21,714,653,000.00	18,659,442,389.00	3,564,850,378.00	43,938,945,767.00
24	SEKRETARIAT DPRD	3,576,438,000.00	22,680,341,754.00	942,989,950.00	27,199,769,704.00
25	KECAMATAN REMBANG	1,146,060,000.00	1,061,857,850.00	1,917,864,900.00	4,125,782,750.00
26	KECAMATAN KALIORI	240,656,000.00	281,067,404.00	92,574,302.00	614,297,706.00
27	KECAMATAN SULANG	386,344,000.00	321,570,000.00	3,117,801,675.00	3,825,715,675.00
28	KECAMATAN SUMBER	238,360,000.00	300,044,391.00	49,960,000.00	588,364,391.00
29	KECAMATAN BULU	229,225,000.00	206,402,500.00	217,998,700.00	653,626,200.00
30	KECAMATAN LASEM	214,504,900.00	279,348,890.00	200,036,000.00	693,889,790.00
31	KECAMATAN PANCUR	227,134,000.00	259,568,526.00	190,426,480.00	677,129,006.00
32	KECAMATAN SLUKE	217,355,000.00	207,918,187.00	295,942,000.00	721,215,187.00
33	KECAMATAN PAMOTAN	287,645,000.00	244,885,000.00	141,920,000.00	674,450,000.00
34	KECAMATAN GUNEM	201,050,000.00	196,764,750.00	138,765,600.00	536,580,350.00
35	KECAMATAN SALE	289,440,000.00	218,695,000.00	208,051,000.00	716,186,000.00
36	KECAMATAN KRAGAN	238,759,000.00	401,533,890.00	202,038,000.00	842,330,890.00
37	KECAMATAN SEDAN	297,485,000.00	192,466,000.00	236,062,000.00	726,013,000.00
38	KECAMATAN SARANG	248,200,000.00	270,582,412.00	7,000,000.00	525,782,412.00
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	5,028,060,000.00	2,175,693,117.00	123,602,143.00	7,327,355,260.00
40	BAPPEDA	2,119,006,000.00	4,060,296,709.00	145,920,650.00	6,325,223,359.00
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5,363,155,500.00	6,464,353,881.00	4,556,546,200.00	16,384,055,581.00
a	(SKPD)	5,363,155,500.00	6,464,353,881.00	4,556,546,200.00	16,384,055,581.00
b	(PPKD)				-
42	BKD	2,540,475,000.00	2,897,621,409.00	345,218,000.00	5,783,314,409.00
	JUMLAH	174,582,051,301.00	250,388,658,063.00	353,770,714,067.22	778,741,423,431.22

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		BERTAMBAH/ (BERKURANG)			
		Belanja Pegawai	Belanja Barang Jasa	Belanja Modal	JUMLAH
1	2	23=19-3	24=20-4	25=21-5	26=23+24+25
1	DINPENDIKPORA	(1,804,725,694.90)	(2,049,441,423.20)	(26,097,380,307.90)	(29,951,547,426.00)
2	DINAS KESEHATAN	(7,685,600,910.20)	(7,182,443,283.40)	(3,206,344,225.78)	(18,074,388,419.38)
3	RSUD dr R. SOETRASNO	(159,747,384.00)	1,319,822,614.00	(7,245,275,484.00)	(6,085,200,254.00)
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	(724,053,000.00)	(1,046,940,745.00)	(19,204,036,650.00)	(20,975,030,395.00)
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	(51,170,500.00)	(410,975,337.00)	(3,050,090,100.00)	(3,512,235,937.00)
6	SATPOL PP	(219,999,000.00)	(123,922,766.00)	(13,174,700.00)	(357,096,466.00)
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	(38,611,000.00)	(17,162,102.00)	-	(55,773,102.00)
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(91,855,000.00)	(293,649,900.00)	(101,177,600.00)	(486,682,500.00)
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	(27,908,500.00)	(241,637,125.00)	(87,974,250.00)	(357,519,875.00)
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	(48,160,000.00)	(134,543,535.00)	(2,753,250.00)	(185,456,785.00)
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	(112,089,483.00)	(1,445,105,834.00)	(27,782,000.00)	(1,584,977,317.00)
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	(31,340,000.00)	(172,044,196.00)	(27,632,840.00)	(231,017,036.00)
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	(41,265,000.00)	(118,550,119.00)	(1,089,270.00)	(160,904,389.00)
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	(57,161,000.00)	(212,198,427.00)	(59,430,020.00)	(328,789,447.00)
15	DINAS PERHUBUNGAN	(81,060,000.00)	(528,553,229.00)	(877,104,350.00)	(1,486,717,579.00)
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	(18,335,000.00)	(101,337,326.00)	(12,865,290.00)	(132,537,616.00)
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	(67,764,000.00)	(101,032,196.00)	(1,391,940,750.00)	(1,560,736,946.00)
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	(25,819,000.00)	(66,684,999.00)	(2,937,000.00)	(95,440,999.00)
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	(99,543,000.00)	(778,888,382.00)	(1,607,439,260.00)	(2,485,870,642.00)
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	(75,790,000.00)	(359,035,415.00)	(2,280,354,999.00)	(2,715,180,414.00)
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SEKRETARIAT DAERAH	(385,772,000.00)	(1,457,329,672.00)	(177,369,622.00)	(2,020,471,294.00)
24	SEKRETARIAT DPRD	(157,245,000.00)	(4,786,995,246.00)	(44,926,050.00)	(4,989,166,296.00)
25	KECAMATAN REMBANG	(66,395,000.00)	(34,843,550.00)	(68,304,700.00)	(169,543,250.00)
26	KECAMATAN KALIORI	(1,350,000.00)	(4,736,096.00)	(2,860,198.00)	(8,946,294.00)
27	KECAMATAN SULANG	(1,300,000.00)	(4,786,000.00)	(112,398,325.00)	(118,484,325.00)
28	KECAMATAN SUMBER	(9,550,000.00)	(9,814,609.00)	(410,000.00)	(19,774,609.00)
29	KECAMATAN BULU	(29,400,000.00)	(6,522,500.00)	(5,601,300.00)	(41,523,800.00)
30	KECAMATAN LASEM	-	(3,332,110.00)	(2,509,700.00)	(5,841,810.00)
31	KECAMATAN PANCUR	(7,076,000.00)	(6,821,474.00)	(3,373,520.00)	(17,270,994.00)
32	KECAMATAN SLUKE	(51,500,000.00)	(154,021,813.00)	(9,033,000.00)	(214,554,813.00)
33	KECAMATAN PAMOTAN	(9,700,000.00)	(3,020,000.00)	(330,000.00)	(13,050,000.00)
34	KECAMATAN GUNEM	(1,050,000.00)	(7,930,250.00)	(3,326,400.00)	(12,306,650.00)
35	KECAMATAN SALE	-	(45,125,000.00)	(3,139,000.00)	(48,264,000.00)
36	KECAMATAN KRAGAN	(9,785,000.00)	(5,868,570.00)	(4,846,000.00)	(20,499,570.00)
37	KECAMATAN SEDAN	(16,945,000.00)	(17,847,000.00)	(1,788,000.00)	(36,580,000.00)
38	KECAMATAN SARANG	-	(7,177,588.00)	-	(7,177,588.00)
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	(201,680,000.00)	(209,985,883.00)	(5,678,857.00)	(417,344,740.00)
40	BAPPEDA	(27,100,000.00)	(84,272,291.00)	(2,904,350.00)	(114,276,641.00)
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(586,932,000.00)	(1,007,665,619.00)	(284,113,800.00)	(1,878,711,419.00)
a	(SKPD)	(586,932,000.00)	(1,007,665,619.00)	(284,113,800.00)	(1,878,711,419.00)
b	(PPKD)	-	-	-	-
42	BKD	(111,913,000.00)	(250,990,591.00)	(3,282,000.00)	(366,185,591.00)
	JUMLAH	(13,136,690,472.10)	(22,173,409,587.60)	(86,032,977,168.68)	(101,343,077,228.38)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		% Belanja Pegawai Belanja Barang Jasa Belanja Modal JUMLAH			
		27	28	29	30
1	2	27	28	29	30
1	DINPENDIKPORA	94.75	95.09	71.64	82.18
2	DINAS KESEHATAN	77.07	81.77	90.64	83.14
3	RSUD dr R. SOETRASNO	99.64	103.70	86.97	95.51
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	80.30	59.88	87.30	86.68
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	93.42	63.71	91.90	91.12
6	SATPOL PP	89.69	93.24	97.95	92.25
7	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	97.82	98.45	100.00	98.07
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	90.10	87.14	96.90	92.48
9	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	98.96	95.93	94.77	96.54
10	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	95.98	94.24	95.53	94.84
11	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	95.22	95.80	97.74	95.83
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	97.85	95.13	97.90	96.33
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	96.91	91.56	98.94	94.34
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	95.33	94.41	79.93	93.82
15	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	-	-
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	92.65	96.48	62.72	79.27
18	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	95.37	96.09	99.61	96.85
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	97.68	86.18	84.26	87.65
20	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	95.62	89.95	51.35	72.82
21	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
22	BUPATI DAN WAKIL BUPATI	-	-	-	-
23	SEKRETARIAT DAERAH	98.25	92.76	95.26	95.60
24	SEKRETARIAT DPRD	95.79	82.57	95.45	84.50
25	KECAMATAN REMBANG	94.52	96.82	96.56	96.05
26	KECAMATAN KALIORI	99.44	98.34	97.00	98.56
27	KECAMATAN SULANG	99.66	98.53	96.52	97.00
28	KECAMATAN SUMBER	96.15	96.83	99.19	96.75
29	KECAMATAN BULU	88.63	96.94	97.49	94.03
30	KECAMATAN LASEM	100.00	98.82	98.76	99.17
31	KECAMATAN PANCUR	96.98	97.44	98.26	97.51
32	KECAMATAN SLUKE	80.84	57.45	97.04	77.07
33	KECAMATAN PAMOTAN	96.74	98.78	99.77	98.10
34	KECAMATAN GUNEM	99.48	96.13	97.66	97.76
35	KECAMATAN SALE	100.00	82.90	98.51	93.69
36	KECAMATAN KRAGAN	96.06	98.56	97.66	97.62
37	KECAMATAN SEDAN	94.61	91.51	99.25	95.20
38	KECAMATAN SARANG	100.00	97.42	100.00	98.65
39	INSPEKTORAT KABUPATEN	96.14	91.20	95.61	94.61
40	BAPPEDA	98.74	97.97	98.05	98.23
41	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	90.14	86.51	94.13	89.71
a	(SKPD)	90.14	86.51	94.13	89.71
b	(PPKD)	-	-	-	-
42	BKD	95.78	92.03	99.06	94.05
	JUMLAH	93.00	91.86	84.27	88.48

B. REKOMENDASI

1. Pada LKPJ Bupati Rembang, Pembiayaan Netto tidak dilaporkan realisasinya sehingga tidak diketahui berapa Silpa tahun berjalan, pada tahun yang akan datang mohon data tersebut dapat dilengkapi
2. Perlu adanya pengelolaan / penyelesaian aset yang baik di setiap OPD guna tercapainya predikat WTP bagi Kabupaten Rembang
3. Pemerintah Kabupaten Rembang perlu segera menginventarisasi aset-aset bangunan beserta tanah dibawahnya terutama di Dindikpora dan DPU Taru untuk mendukung diperolehnya opini WTP dari BPK-RI pada tahun 2019.
4. Surat Keputusan Bupati Rembang tentang jalan kabupaten dan jalan poros antar desa perlu ditetapkan lebar jalan (baik jalan kabupaten maupun jalan poros antar desa) serta bangunan pelengkap jalan (urugan bahu jalan, drainase jalan dan tebing jalan).
5. Guna mendukung diperolehnya opini WTP pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Rembang harus segera menyelesaikan Piutang Pajak PBB-P2 secara maksimal

VI. PENUTUP

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam Persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna IV (empat) DPRD Kabupaten Rembang.

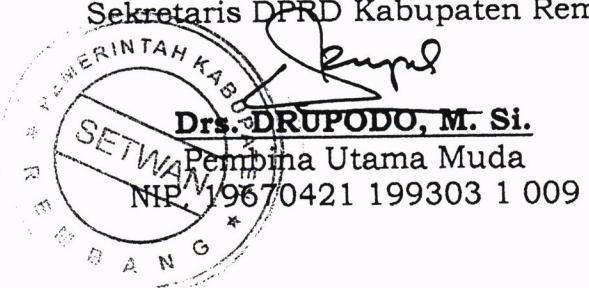
Rembang, 31 Juli 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
BANDAR ANGGARAN**

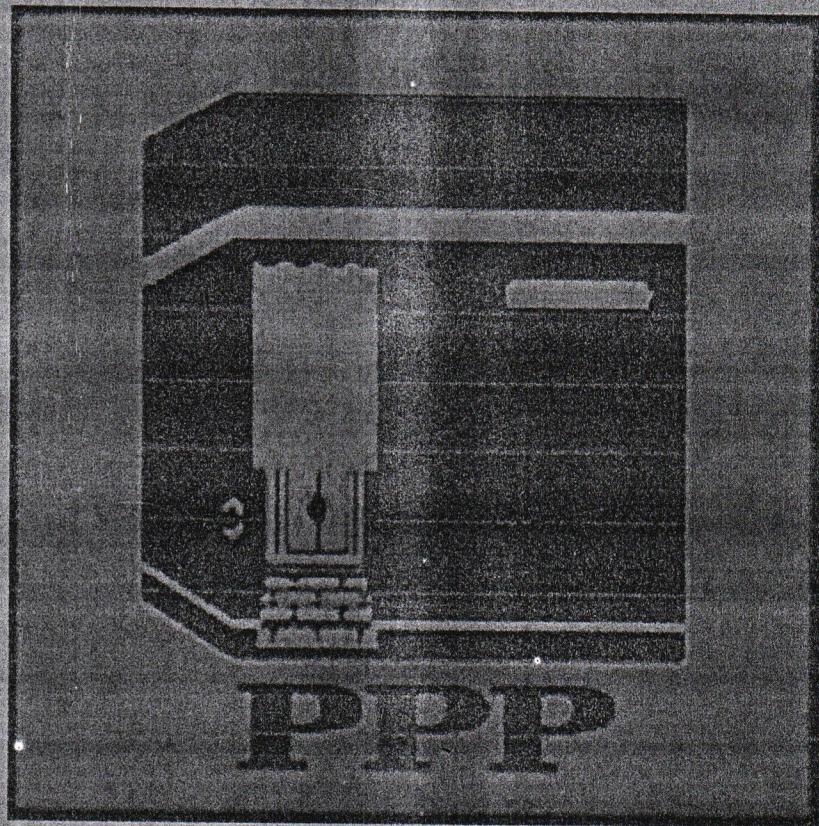
Wakil Ketua,
ttd
H. GUNASIH, S. E.

Sekretaris
ttd
Drs. DRUPODO, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang



PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN
REMBANG, TAHUN ANGGARAN 2017



DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

HARI: KAMIS, TANGGAL: 31 JULI 2018

Dibacakan oleh : MOKHAMMAD ZAENURI

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN
REMBANG , TAHUN ANGGARAN 2017

Assalamu a'laikum Warohmatullahi wabarakatuh....

Selamat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

Alhamdulillah, Wassholatu wassalamu a'laa Rosulillah ibni Abdillah, Wa a'la alihi Washohbih wamanwalah..., Amma ba'du ...

Yang kami hormati :

- Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang
- Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf.
- Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, dan semua hadirin yang dimulyakan ALLAH SWT.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian pendapat akhir ini, terlebih dahulu marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ILAHI ROBBI, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat Paripurna DPRD ini, dalam keadaan sehat Wal afiat tidak kekurangan suatu apapun.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan pada junjungan nabi besar kita, MUHAMMAD SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya sampai dihari kiyamat.

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian pendapat akhir ini, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang, dalam melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2017, meskipun dari hasil pembahasan , masih banyak adanya catatan kekurangan - kekurangan yang mesti harus diperbaiki, untuk pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berikutnya .

Kami sampaikan rasa terima kasih dan apresiasi juga kepada TAPD, yang telah bekerja keras, sehingga penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2017 ini, dapat selesai sesuai dengan jadwal waktu yang direncanakan . Mulai dari Penyampaian nota keuangan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2017 oleh sdr. Bupati , sampai Pembahasan ditingkat komisi bersama OPD , dan juga Banggar bersama TAPD.

Pada kesempatan yang berbahagia ini , kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , menyampaikan " SELAMAT HARI JADI KABUPATEN REMBANG YANG KE 277 Tahun " Semoga ke depan lebih baik dan SUKSES Mewujudkan Rembang Madani Efektif dan Efisien.

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati serta sidang Dewan yang Terhormat,

Sebelum pendapat akhir ini kami sampaikan, perkenankanlah kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menyampaikan beberapa catatan dari hasil pembahasan , untuk masukan , saran dan himbauan , sebagai berikut :

1. Dari hasil pencermatan kami , Realisasi Postur APBD Tahun Anggaran 2017 , untuk rasio porsi Perbandingan , antara Belanja Tidak Langsung (57,69 %) dengan Belanja Langsung (42,31 %) , masih jauh lebih besar pada Belanja Tidak Langsung , artinya Anggaran masih banyak diperuntukkan pada belanja Pegawai . Sedangkan Anggaran yang diperuntukkan Belanja Modal untuk Infra Struktur dan Pemberdayaan masyarakat, masih sangat kurang , Maka kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , mengusulkan agar Penganggaran ditahun berikutnya , Porsi Belanja Langsung bisa diperbesar , sehingga apa yang menjadi usulan dan harapan masyarakat dapat segera terpenuhi , yaitu penanganan Infrastruktur , baik Sarana Jalan Umum maupun yang lainnya .

2. Berkaitan dengan status Kabupaten Rembang yang masih WDP, dan atas dorongan keinginan yang kuat, agar segera mendapatkan Status WTP. Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan, agar Pemkab Rembang mengambil langkah-langkah serius, untuk segera mengatasi permasalahan Aset secara detail dan benar, sesuai ketetuan peraturan yang ada.
3. Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , mohon dan mengusulkan kepada sdr. Bupati, agar segera memerintahkan TAPD, untuk mempersiapkan penyusunan dan mengajukan Rancangan KUA / PPAS APBD Perubahan 2018, dan KUA / PPAS APBD Induk 2019 , untuk segera ditindak lanjuti , dan dilakukan pembahasan.

Sidang Dewan yang kami hormati.....,

Selanjutnya, kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan, setelah mencermati dan mengevaluasi terhadap RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017 secara keseluruhan, menyampaikan pendapat akhir , dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohiim “ ***MENERIMA DAN MENYETUJUI*** ” RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Tahun Anggaran 2017 ini , untuk ***DITETAPKAN MENJADI*** “ PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Tahun Anggaran 2017.

Demikian Pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Tentang hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2017 .

Trima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurannya.....

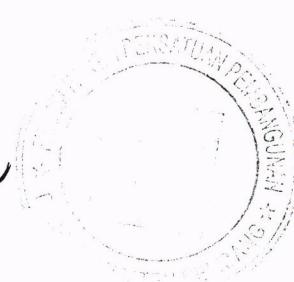
Wallahul muwafiq ila aqwamithoriq...., Wassalamu a'laikum Wr..... Wb.....

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Rembang , 31 Juli 2018

KETUA

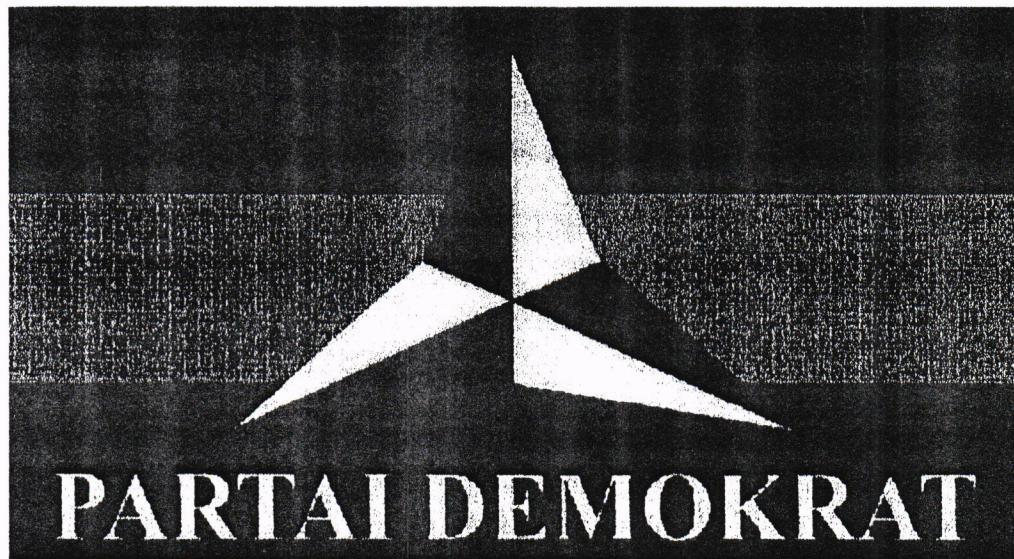
SUGIHARTO



SEKRETARIS

ZAIMUL UMAM NS

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017**



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Rembang, 31 Juli 2018

Dibacakan oleh : IMRO'ATUS SOLICAH, S.E., M.H.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI DEMOKRAT
Jl. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194**

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017**

SELASA, 31 JULI 2018

Dibacakan oleh : IMRO'ATUS SOLICAH, S.E., M.H.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. FORKOPIMDA Kabupaten Rembang
4. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
5. Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
6. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staff
7. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Mengawali pendapat fraksi ini, kami mengajak kepada hadirin yang terhormat marilah kita senantiasa memanjangkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahNya yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat hadir mengikuti rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi semoga mendapat hasil dan keputusan yang benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Rembang.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, Kami Fraksi Demokrat Menerima dan Menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebagai Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.

Dalam kesempatan yang baik ini pula kami Fraksi Demokrat memberikan rekomendasi untuk ditindak lanjuti, yaitu :

1. Kami meminta kepada Pemerintah Kabupaten Rembang agar mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPKRI harga mati untuk tahun 2019 sampai seterusnya.
2. Kami mendorong agar piutang pajak PBB P2 yang sudah lama sekali dan tidak mungkin untuk ditagih supaya segera dihapuskan agar tidak membebani APBD kita.
3. Kami meminta kepada Pemerintah Kabupaten Rembang supaya mempercepat kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur dan mencairkan hibah bansos dan bantuan keuangan lainnya karena masyarakat sangat membutuhkan dan sudah lama ditunggu-tunggu.

Bupati, Wakil Bupati dan Rapat Paripurna Dewan yang Terhormat,

Demikianlah pendapat akhir Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang serta segenap tamu undangan, kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 31 Juli 2018

**FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA

EKA SISWA KARTIKA

SEKRETARIS

IMRO'ATUS SOLICAH, S.E., M.H.



Pendapat
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN 2017

disampaikan oleh Drs. H. SUBAWOTO

Pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Selasa 31 Juli 2018

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang

Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah; Komandan Kodim Rembang, Kapolres Rembang, Kepala Kejaksan, Ketua Pengadilan Negeri

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta Pejabat di lingkuungan Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang ;

Yang Kami hormati Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali pendapat fraksi ini perkenankanlah kami menghaturkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT Atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga sampai saat ini kita semua masih bisa menikmati karunia dan rahmat-Nya. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW

Sidang Dewan yang kami Muliakan

Selanjutnya kami dari FPKB mengucapkan terima kasih kepada :

1. Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang telah diberikan kepada FPKB untuk menyampaikan Pendapat FPKB terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017
2. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang yang telah menyampaikan laporan atas terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Perbaikan dan penyempurnaan laporan pelaksanaan keuangan daerah sangat penting dalam rangka untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang tak hanya ekonomis , efektif dan efisien, tetapi juga patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pada akhirnya, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 dapat dijadikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi bagi pihak eksekutif untuk melakukan perubahan, perbaikan, dan penyempurnaan dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah, sehingga di masa yang akan datang bisa menjadi lebih baik, demi tersajinya laporan yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang .

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Setelah membaca laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017, yang disampaikan oleh Sekretaris Badan Anggaran pada tanggal 31 Juli 2018, FPKB bisa memahami laporan tersebut. Namun demikian, FPKB memandang perlu untuk memberikan pandangan, catatan, saran, rekomendasi, ataupun pernyataan terkait Ranperda ini, yaitu :

1. Terkait belum tercapainya target opini WTP pada hasil audit BPK atas LKPD Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2017. FPKB menekankan kepada Pemkab Rembang agar segera menindak-lanjuti seluruh temuan BPK dengan menjalankan rekomendasi-rekomendasi BPK. Pemkab juga

perlu mengambil langkah-langkah strategis dan sistematis untuk mengatasi masalah-masalah yang menjadi pengecualian dalam Opini WDP.

2. Terkait realisasi PAD TA 2017 yang bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp. 59.734.946.872 dari target Rp. 52.840.500.000. FPKB menekankan kepada Pemkab agar di kemudian hari target capaian ditentukan secara matang dan ditingkatkan lagi dengan mengoptimalkan semua potensi yang bisa digali.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Semua yang telah kami dalam paragraf-paragraf di atas merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan Pendapat FPKB DPRD Kabupaten Rembang terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017.

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, FPKB menyatakan Dapat Menerima dan menyetujui "Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 " untuk disahkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Rembang .

Sidang Dewan yang kami Muliakan

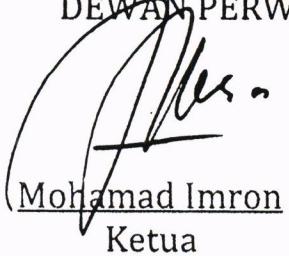
Demikian pendapat Akhir FPKB ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih

Wallahul Muwaffiq Ilaa Aq Wamittorieq

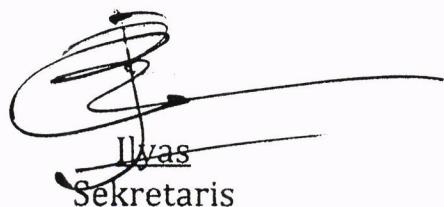
Wasalammu'allaikum Wr. Wb.

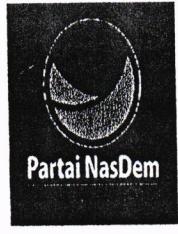
Rembang, 31 Juli 2018
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG


Mohamad Imron
Ketua




Ilwas
Sekretaris



**FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

PENDAPAT AKHIR FRAKSI

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasional Demokrat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Atas Raperda Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2017

Hari / Tanggal : Selasa / 31 Juli 2018

Dibacakan oleh : :

Assalamu' alaikum Wr, Wb

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Merdeka.....Merdeka.....Merdeka....!!! Salam Restorasi.....

Yang terhormat, Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kab. Rembang

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA)

Kab. Rembang

Yang Terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Semua Kabag di lingkungan Setda Rembang

Yang terhormat, Ka Dinas,Badan , Ka. Kantor dan Camat se- Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang, Kabag beserta jajarannya.

Lsm, Rekan Wartawan, Ormas dan semua pihak yang telah hadir pada hari ini yang kami hormati

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Mulyakan,

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT atas nikmatnya lah kita pada hari ini dapat menghadiri rapat Paripurna, Sholawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem terlebih dahulu mengucapkan " DIRGAHAYU KABUPATEN REMBANG YANG KE – 277 " semoga dengan usia yang ke 277 ini kami berharap Kabupaten Rembang semakin maju,rakyatnya sejahtera,aman,tenteram dan bahagia.

Kami juga kembali menekankan pentingnya persaudaraan dan persatuan di antara kita agar cita – cita kita bersama menjadikan Kabupaten Rembang semakin maju akan mudah tercapai. " NKRI Harga mati ".

Hadirin Sidang Paripurna Yang Berbahagia

Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem dengan ini menyetujui Raperda Pertanggung Jawaban Bupati atas pelaksanaan APBD TA. 2017 menjadi Perda Pertanggungjawaban Bupati atas Pelaksanaan APBD TA. 2017 dengan catatan – catatan sebagai berikut :

1. Kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem berharap Pemkab Rembang segera melakukan pendataan terhadap jalan – jalan yang ada di Kabupaten Rembang ini dan kemudian diterbitkan SK Bupati tentang Lebar dan Bahu Jalan tersebut.
2. Terkait dengan target Pemkab Rembang untuk mencapai WTP di tahun 2019 kami mendorong seluruh OPD di Pemkab Rembang untuk serius menginventarisasi aset – aset yang berupa bangunan ataupun tanah karena salah satu elemen yang menghambat tercapainya WTP tahun ini karen aset kita yang masih belum jelas penataannya.
3. Terkait piutang pajak (PBB) kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem mendorong Pemkab bisa lebih cepat meyelesaiannya dan kalau perlu dilakukan penghapusan terhadap piutang tersebut agar tidak menjadi penghambat tercapainya target Pemkab Rembang yang ingin memperoleh status WTP ini.
4. Terakhir kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem berulang kali menyampaikan bahwa serapan anggaran kita masih terbilang rendah maka dari itu, kami mendorong supaya Pemkab melalui OPD – OPD terkait berusaha optimal agar serapan anggaran kita naik/ lebih baik dari kemarin- kemarin.

Kami sangat mendukung upaya – upaya Pemkab Rembang untuk mencapai target yang telah dicanangkan, maka dari itu kami Fraksi PDI Perjuangan Nasdem memberikan masukan – masukan yang bisa kami berikan.

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Mulyakan,

Semoga ini menjadi evaluasi kita bersama dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Rembang ini supaya perencanaan tahun – tahun selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi . ini harapan kita bersama...

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan Nasdem,bila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan kami menyampaikan maaf yang sebesar – besarnya.

Wabillahi taufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr, Wb,

Merdeka....Merdeka....Merdeka....Salam Restorasi.

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG



Ketua

Jasmani

Sekretaris

Ali Archam, ST

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2017**



REMBANG, 31 Juli 2018



**FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA
(GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG
JL.P.Diponegoro No.88 Rembang (0295) 691194 Kode Pos 59251**

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN REMBANG TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016**

Disampaikan oleh : Puji Santoso
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Selasa 31 Juli 2017

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

SALAM INDONESIA RAYA...

Yang terhormat Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;

Yang kami hormati Sdr. Para Anggota Forkompimda dan Ketua Pengadilan Negeri

Yang kami hormati Sdr. Para Komandan / Kepala Kesatuan TNI-POLRI

Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah dan Para Pejabat dilingkungan Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Sdr.Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi, dalam kesempatan ini tidak lupa kami mengajak kepada kita semua untuk bersyukur kepada ILLAHI ROBBI atas segala karunia dan nikmat-Nya yang tiada henti. Sholawat dan salam teruntuk Baginda Nabi Muhammad SAW segenap para nabi dan rasul ILLAHI.

Fraksi Gerindra mengucapkan selamat Hari Kejaksan yang jatuh pada tanggal 22 Juli, semoga kinerjanya semakin Profesional. Selain itu kami juga mengucapkan Hari Anak Nasional yang diperingati pada tanggal 23 Juli. Anak adalah generasi penerus bangsa, marilah kita bersama-sama memberikan perlindungan, kesejahteraan dan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita dan yang tidak kalah pentingnya kita sebisa mungkin memberikan warisan yang baik berupa pembangunan dan kemajuan

Pemerintah Kabupaten Rembang agar kelak anak-anak kita bisa tersenyum. Yang berikutnya kami mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Rembang yang ke 277, mari kita bersatu padu dalam membangun Rembang menuju Rembang yang Madani dan Sejahtera.

Hadirin sidang paripurna yang kami Hormati,

Berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 yang telah didalami pada Rapat-rapat Komisi, Rapat Badan Anggaran bersama dengan TAPD dan telah memunculkan 5 Rekomendasi yang disepakati bersama.

Selain Rekomendasi tersebut, Fraksi Gerindra juga memberikan catatan sebagai bahan evaluasi Pemkab rembang kedepan.

1. Fraksi Gerindra meminta kepada Bupati Rembang agar memberikan perhatian kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pendidikan dan Olah Raga supaya lebih hati-hati didalam melaksanakan pekerjaan Fisik, karena kami melihat dengan adanya temuan LHP BPK sebesar 1,92 Milyar di 13 pekerjaan Fisik dan rata-rata temuannya berasal dari kekurangan volume pekerjaan. Padahal dari Pekerjaan tersebut telah memiliki Konsultan Pengawas dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Kedepan kami meminta agar pemerintah Daerah bisa lebih hati-hati agar hal ini tidak terulang kembali.
2. Fraksi Gerindra juga meminta kepada Inspektorat Kabupaten Rembang agar dalam memahami aturan tidak berbeda dengan BPK, karena setelah kami cross cek di Rapat Komisi dengan Dinas terkait bahwa adanya temuan di beberapa pekerjaan, itu karena adanya perbedaan di dalam melakukan penghitungan, sehingga pekerjaan tersebut setelah terjadi pengukuran dilapangan terjadi temuan 2 kali yang berbeda, yang akhirnya harus mengembalikan ke kas daerah sebanyak 2 kali juga.
3. Dengan semangat Optimisme yang tinggi, tahun 2019 Pemerintah Kabupaten HARUS bisa mendapatkan Opini BPK berupa WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), untuk itu mari kita bekerja bersama-sama

mewujudkan hal tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat Kabupaten Rembang tercinta.

Bupati, Pimpinan Sidang dan Hadirin yang Kami Hormati,

Demikian pendapat akhir kami, dan dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim kami **dapat menerima dan menyetujui RAPERDA** Pertanggung jawaban ini ditetapkan menjadi **PERDA** Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Rembang Tahun 2017. Atas segala kekurangan disampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya dan kami ucapan terima kasih. Semoga Allah SWT selalu menunjukan jalan yang benar dan terbaik bagi kita semua. Amiiin Ya Robbal Alamiin...

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 31 Juli 2018

FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD REMBANG

H. CHASANUDDIN

Wakil Ketua



PUJI SANTOSO, SP. MH.

Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI KARYA SEJAHTERA

Sekretariat: Jl. Diponegoro No 88 Rembang
Telp (0295) 693290



PENDAPAT FRAKSI KARYA SEJAHTERA DPRD KABUPATEN REMBANG

atas

Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Rembang
Hari Selasa, Tgl. 31 Juli 2018

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Pimpinan rapat dan hadirin yang terhormat.

Marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam suasana yang berbahagia ini.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan;

Pertama, selamat Hari Jadi Kabupaten Rembang yang ke-277, semoga di usia yang sudah cukup tua ini pemerintah dan warga Kabupaten Rembang senantiasa diberi kekuatan dan pertolongan untuk mewujudkan Kabupaten Rembang yang adil makmur aman sejahtera

Kedua, selamat kepada Jemaah Calon Haji dari Kabupaten Rembang yang akan berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji, semoga senantiasa diberi kesehatan, keselamatan kelancaran selama melaksanakan ibadah dan pulang menjadi haji mabrur.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Setelah melalui pembahasan antara komisi-komisi bersama SKPD terkait dan dilanjutkan pembahasan antara TAPD bersama

Banggar DPRD maka saatnya kami menyampaikan pendapat Fraksi Karya Sejahtera atas Hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017.

Kami meng-apresiasi upaya Pemerintah Kabupaten Rembang untuk melaksanakan APBD tahun 2017 walaupun masih banyak kekurangan, maka kami menyampaikan beberapa catatan/rekomendasi antara lain:

1. Target pendapatan APBD 2017 banyak tidak tercapai, di harapkan ini penjadikan perhatian bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun target pendapatan pada masa yang akan datang.
2. Kenyataan bahwa: SILPA yang cukup tinggi, temuan-temuan Hasil Pemeriksaan BPK, belum berhasil meraih predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) dll. Hal ini menunjukkan bahwa etos kerja OPD (organisasi perangkat daerah) pada tahun 2017 masih rendah, padahal ini menjadi tolok ukur integritas Pemerintah Kabupaten Rembang.
3. Mengenai asset daerah, terutama tanah dan bangunan, kami mengharap agar asset daerah yang belum jelas statusnya supaya segera ditelusuri secara detail kemudian di-inventarisir secara tertib dan terinci.
4. Belajar dari kesalahan pada temuan LHP (laporan hasil pemeriksaan) BPK pelaksanaan kegiatan tahun 2017 sehingga terdapat *“kelebihan pembayaran”* ratusan miliar rupiah, walaupun sudah dikembalikan ke Kas Daerah. Kami berharap agar pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, jangan sampai terjadi pengeluaran uang rakyat yang tidak sesuai peruntukannya.
5. Mengenai pembangunan infra struktur, masih banyak jalan antar kecamatan yang terabaikan. Contoh, jalan antara Pandangan - Sedan tepatnya di desa Sumurpule terdapat lubang menganga yang membahayakan bagi pemotor.

Kami mengingatkan akan janji Saudara Bupati bahwa pada tahun 2018 ini semua jalan menjadi “mulus” tidak ada lagi jalan yang berlobang di wilayah Kabupaten Rembang.

6. Pemerintah Kabupaten Rembang hendaknya sungguh-sungguh dalam melaksanakan Perda RPJMD agar pada tahun 2019 mendapat opini WTP (wajar tanpa pengecualian).
7. Pemerintah Kabupaten Rembang agar segera menggelar RUPS (rapat umum pemegang saham) PT RBSJ agar manajemen mampu menjadikan PT RBSJ sebagai perusahaan yang sehat.
8. Pemerintah Kabupaten Rembang agar segera menggelar RUPS (rapat umum pemegang saham) PT RME (Rembang Migas Energi) sehingga program kerja dan progress-nya lebih terukur.

Dengan beberapa catatan/rekomendasi tsb. Fraksi Karya Sejahtera menyetujui Raperda Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017 ini ditetapkan menjadi Perda.

Pimpinan rapat dan hadirin yang terhormat.

Menutup pendapat fraksi ini kami mengutip piweling Begawan Abiyasa ketika mewisudha Raden Puntadewa menjadi Raja Amarta sbb. *“Wong kang darbe panguwasa, menawa arep nibakake pitenah utawa paukuman marang wong kang luwih endhek palungguhane iku paribasan suwe mijet wohing ranti. Nanging ngertenana, wong luhur kang gelem nyanak, ngraketi lan ngajeni wong cilik iku ora bakal ilang kaluhurane”*.

(Seorang penguasa itu mudah sekali menjatuhkan hukuman kepada rakyatnya, bagaikan memijat buah ranti. Tetapi ketahuilah, penguasa yang merakyat menghargai wong cilik itu tidak akan kehilangan kewibawaannya)

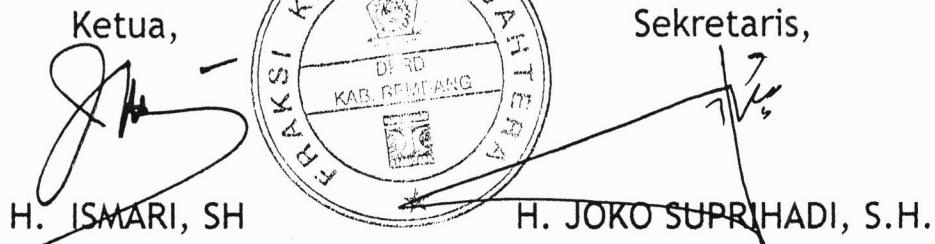
Bila ada kata-kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pendapat Fraksi Karya Sejahtera kali ini, kami mohon maaf yang

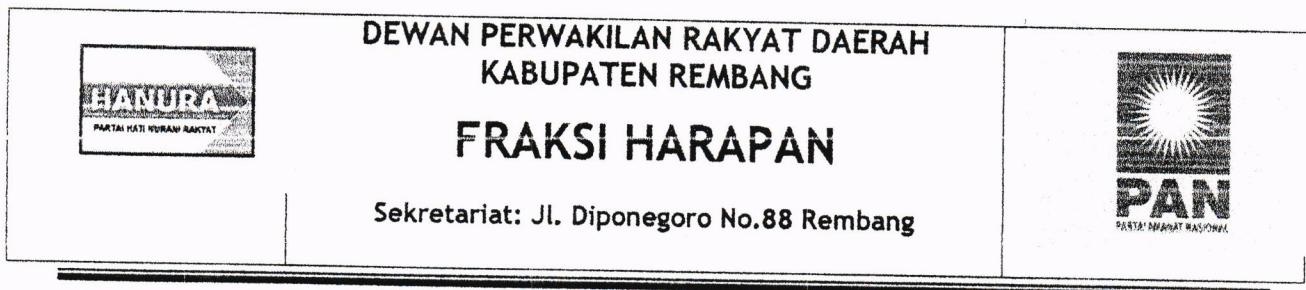
sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang.

Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA SEJAHTERA





**PENDAPAT FRAKSI HARAPAN
DPRD KABUPATEN REMBANG**

atas

Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Rembang
Hari Selasa, Tgl. 31 Juli 2018

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Pimpinan rapat dan hadirin yang terhormat.

Mengawali penyampaian pendapat fraksi ini, marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam suasana yang berbahagia ini.

Pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan; Selamat Hari Jadi Kabupaten Rembang yang ke-277, semoga di usia yang sudah cukup tua ini pemerintah dan warga Kabupaten Rembang senantiasa diberi kekuatan dan pertolongan untuk mewujudkan Kabupaten Rembang yang adil makmur aman

Pula, ucapan selamat jalan kepada Jemaah Calon Haji dari Kabupaten Rembang yang akan berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji, semoga senantiasa diberi kesehatan, keselamatan kelancaran selama melaksanakan ibadah dan pulang menjadi haji mabruk.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Setelah melalui pembahasan antara DPRD Kabupaten Rembang bersama Pemerintah Kabupaten Rembang, maka tiba-tiba saat kami menyampaikan Pendapat Fraksi Harapan atas Hasil Pembahasan Raperda Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD TA 2017.

Kami mengakui segala usaha jajaran Pemerintah Kabupaten Rembang yang telah melaksanakan APBD tahun 2017 dengan baik, namun masih terdapat kekurangan disana-sini, maka saatnya kami menyampaikan beberapa rekomendasi sbb.

1. Dalam LKPJ Saudara Bupati, tidak menyampaikan realisasinya, sehingga kita tidak bisa mengetahui berapa SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) tahun berjalan.
2. Pengelolaan asset daerah tidak baik sehingga Kabupaten Rembang tidak mendapatkan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari pemerintah pusat, karena itu kami mengharapkan agar semua OPD (organisasi perangkat daerah) asset-asset dilingkungannya terutama asset yang berupa tanah dan bangunan agar pada tahun 2019 mendatang Kabupaten Rembang mendapatkan predikat WTP.

3. Demikian pula mengenai piutang PBB-P2 agar segera diselesaikan dengan baik, paling lambat pada tahun ini.

Demikianlah Pendapat Fraksi Harapan atas Pembahasan Raperda tentang Raperda Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD TA 2017. Dengan mengucapkan “alhamdulillahi robbil ‘alamiin” Fraksi Harapan menerima Pertanggung-jawaban Bupati atas Pelaksanaan APBD TA 2017 dan ditetapkan sebagai Perda.

Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga kita senantiasa diberi ridho dan kekuatan untuk membangun Kabupaten Rembang tercinta. Amien.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

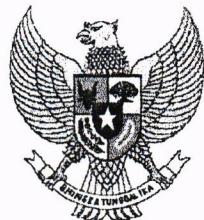
**DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI HARAPAN**

Ketua,


SUKARMA'N

Sekretaris,

SAHNINGSIH, SE



BUPATI REMBANG

**SAMBUTAN BUPATI REMBANG
ATAS HASIL PEMBAHASAN RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2017**
Tanggal, 31 Juli 2018

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Ykh. - Ketua DPRD Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Para Ketua Komisi dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Ykh. - Rekan-Rekan Forkopimda Rembang ;
- Ykh. - Para Asisten Sekda dan Kepala SKPD se Kab. Rembang ;
- Ykh. - Para Camat dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur **Alhamdulillah** kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan Rahmat dan Ridho-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna Terakhir DPRD, dalam rangka “**Penyampaian atas hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2017**” dalam keadaan sehat wal’fiat.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah bersama DPRD, menurut prinsip otonomi dan tugas perbantuan memiliki konsekuensi bahwa segala aktivitas yang dijalankan oleh eksekutif maupun legislative pada hakikatnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dalam rangka peningkatan daya saing daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya melalui kegiatan dengan mendayagunakan dana yang

bersumber dari APBD. Dan APBD merupakan refleksi kegiatan yang telah dijalankan baik oleh jajaran eksekutif maupun legislatif pada tahun anggaran tertentu, dalam mencapai tujuan utama pemerintah daerah, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Maka pada kesempatan ini juga kepada seluruh unsur Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD), saya menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang telah diberikan dalam menyampaikan berbagai penjelasan kepada pihak legislative yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD 2017.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Selanjutnya, terhadap pelaksanaan Laporan Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 yang telah dimulai dari tahapan rapat Paripurna DPRD tentang penyampaian nota pengantar Laporan Pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran Tahun 2017, pandangan umum Fraksi-fraksi, jawaban pemerintah atas pandangan umum Fraksi-fraksi, pembahasan oleh DPRD, yang akhirnya pada kesempatan yang

baik ini seluruh Fraksi menyetujui dan menerima laporan pertanggung jawaban tahun 2017 sehingga disahkan dalam rapat Paripurna DPRD yang kita laksanakan pada hari ini.

Setelah Rapat Paripurna DPRD yang saat ini kita laksanakan, maka tahapan selanjutnya kami akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Tentang Laporan Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 kepada Gubernur untuk dievaluasi dan selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.

Untuk itu, saya atas nama pribadi dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Rembang mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang baik, evaluasi dan sumbang saran yang konstruktif dari segenap anggota DPRD yang terhormat dalam rangka memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Rembang.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya juga kami sampaikan kepada seluruh komponen masyarakat, segenap Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, jajaran Forkopimda, perangkat

Pemerintah Daerah dan segenap elemen pemangku kepentingan atas kerjasama dan dukungannya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2017.

Kami mohon maaf atas beberapa target pembangunan yang belum tercapai, dan secara tulus, kami mengajak agar kemitraan ini bisa lebih dibangun dan dikuatkan lagi untuk mewujudkan Rembang Madani (Mandiri, Aman, Damai, Amanah, Nyaman, Iman).

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa meridlo usaha kita. Aamiin ya rabbal alamin.

Terima kasih atas perhatiannya,

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Bupati Rembang


H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I